

MENUJU KEMANDIRIAN WVI

Setiap Anak Hidup Utuh Sepenuhnya



MENUJU KEMANDIRIAN WVI
Setiap Anak Hidup Utuh Sepenuhnya
Copyright © Wahana Visi Indonesia

Diterbitkan oleh:

Wahana Visi Indonesia
Jl. Graha Bintaro Blok GB/GK 2 No. 09, Pondok Aren, Tangerang Selatan

Pengarah dan Penasihat:

Guntur Tampubolon
Doseba T. Sinay
Candra Wijaya
John Nelwan
Priscilla Christin



Penulis:

Alex Japalatu

Koordinator Penulisan:

Rena Tanjung

Tim Pendukung:

Philip Siahaan
Asteria Aritonang
Agnes Wulandari
Hendi Julius

Desain Isi:

Otten

Foto-foto adalah dokumentasi Wahana Visi Indonesia dan koleksi beberapa staf yang terlibat dalam pelayanan Wahana Visi Indonesia.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Daftar Isi

Kata Pengantar - Hal. 3

Bab 1 60 Tahun World Vision

International di Indonesia - Hal. 9

- Mengunjungi Indonesia - Hal. 9
- Wadah Hukum dan Penambahan Staf - Hal. 10
- Pindah Jakarta - Hal. 12

Bab 2 Yayasan Wahana Visi Indonesia Berdiri - Hal. 14

- Mempersiapkan Staf Lokal - Hal. 15
- Lahirnya Yayasan Wahana Visi Indonesia - Hal. 18

Bab 3 Kemandirian Wahana Visi Indonesia - Hal. 20

- Tantangan dan Peluang - Hal. 25

Bab 4 Empowerment - Hal. 28

- Pertama Kali di Indonesia - Hal. 30
- Kerja Sama dengan Pemerintah - Hal. 32
- WVI dan Respons Bencana - Hal. 36
- Respons Gempa Bumi dan Sulawesi Tengah - Hal. 39
- Penggalangan Dana Lokal - Hal. 42

Bab 5 Interdependence - Hal. 54

- Dewan Pembina Indonesia Terbentuk - Hal. 58
- *WV Academy*, *Circle of Friends*, dan WVI Alumni - Hal. 63
- Respons Bencana Bersama HFI - Hal. 64
- Staf Indonesia di Banyak Negara - Hal. 65

Bab 6 Twin Citizenship - Hal. 66

- Deregistrasi World Vision International di Indonesia - Hal. 68
- Suara Anak di Dunia Internasional - Hal. 70
- Suara Anak dalam Konferensi Perubahan Iklim dan Hak Anak di Paris - Hal. 71
- Berpartisipasi Pada Level Internasional - Hal. 81
- Pengasuhan dengan Cinta - Hal. 84

Bab 7 Akuntabilitas - Hal. 92

- Nilai Dasar WVI - Hal. 94
- Kepercayaan Publik - Hal. 95
- Komitmen Melayani - Hal. 98
- Penatalayan yang Bertanggung Jawab - Hal. 99
- Teknologi dan Akuntabilitas - Hal. 100
- Suara dan Aksi Warga Negara - Hal. 105

Bab 8 Transformasi Menuju Kemandirian Penuh WVI - Hal. 112

- Anggur Baru dalam Kirbat Baru - Hal. 115
- Perkuat Pendanaan Lokal - Hal. 116
- *Milestone* Kemandirian Nasional - Hal. 117

Bab 9 Memperkuat Kemitraan dan Tantangan Masa Depan - Hal. 122

- Menjalin Kemitraan - Hal. 125
- Rencana Strategis 2020-2030 - Hal. 127
- Pandemi COVID-19 - Hal. 128

Bab 10 Kesaksian dari Garis Depan - Hal. 130

Kata Pengantar

Foreword

The process of poverty alleviation a very complex endeavor that requires multi-sectoral and multi-dimensional engagements to eradicate its root causes, all of which are deeply embedded in the culture, values, beliefs and the social & political systems that define societies. Our experience over seven decades in over a hundred countries, teaches us that it takes years of sustained efforts at local, national and global levels; empowerment of individuals, families and communities; and strong partnerships among key stakeholders for these efforts to bear fruit.

Sustainable community transformation and poverty alleviation initiatives are best implemented by organisations that have a presence at local, regional and national levels; led by people who are independent, familiar with the local context, laws, regulations and policies; and well respected by the community. Through effective partnership efforts for over 20 years with Wahana Visi Indonesia World Vision International considers Wahana Visi Indonesia to be a highly evolved and mature partner in terms of its governance & executive leadership, management capacity, technical & operational skills, quality of human resources, excellent programme quality, and overall accountability for achieving outcomes. Wahana Visi Indonesia, therefore, has the autonomy and authority to implement World Vision International's humanitarian and development programmes in Indonesia, including the management of grant-funded programmes of various international donors and managing community development programmes across the country.

We are grateful to the Government of Indonesia, represented by the Ministry of Social Affairs for the constant support and encouragement to World Vision International in implementation of its various humanitarian and development programmes over the years. Following the de-registration of World Vision International and the transition of its programmes/ work to Wahana Visi Indonesia, we are sure that the existing programmes and the several initiatives undertaken by Wahana Visi Indonesia on its own, would continue to deliver the expected programme outputs and outcomes. We on our part would continue to support Wahana Visi Indonesia to deliver good quality programme implementation, comply with global humanitarian standards and reflect the core values of the global WV Partnership.

Finally, we do believe that despite all our work in the past, there still remains so much to be done and Wahana Visi Indonesia will have its hands full as it seeks to ensure the well-being of the most vulnerable children in some of the most excluded communities in the country. It takes the entire country to support this work and so working together with all stakeholders is critical as we take up the challenges for achieving the overall goal for every child in Indonesia - to enjoy life in all its fullness.

Cherian Thomas

Regional Leader, South Asia & Pacific, World Vision International

Kata Sambutan

Dengan rasa syukur saya menyambut baik usulan pembuatan buku ini sebagai bentuk dokumentasi dari perjalanan cerita pelayanan dan pengelolaan organisasi kemanusiaan yang terus berkembang di setiap masa.

World Vision International sebagai sebuah lembaga kemanusiaan yang ada di 100 negara memulai pelayanannya di Indonesia sejak 1950 dan kini di tahun 2021 resmi undur diri dari Indonesia.

Kelanjutan pelayanan bagi anak dan masyarakat yang rentan sepenuhnya akan diteruskan oleh Wahana Visi Indonesia sebagai mitra terpercaya World Vision International di Indonesia sejak 1998. Semangat mewujudkan hidup anak seutuhnya menjadi semangat membara yang dihidupi bersama masyarakat sambil terus melakukan pembenahan diri guna memastikan tata kelola organisasi yang mumpuni.

Proses pemberdayaan dan kemandirian Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi terpercaya diceritakan dengan apik dalam buku ini. Kisah semangat perjuangan teman teman pekerja kemanusiaan dalam menjangkau masyarakat mewarnai kisah kehidupan pelayanan Wahana Visi Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Kesaksian dari masyarakat, anak, mitra kerja Wahana Visi Indonesia menjadi cerita inspiratif yang dapat membangkitkan semangat untuk terus menghidupi harapan hidup anak yang utuh.

Harapan kami kiranya buku ini dapat menjadi sumber informasi mengenai proses pemberdayaan organisasi kemanusiaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada anak dan masyarakat, khususnya bagi mereka yang paling rentan. Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca terkait proses pemberdayaan yang terus dijalankan guna memberikan dampak perubahan yang ada pada kehidupan anak dan masyarakat di Indonesia.

Mari bersama kita teruskan semangat untuk mewujudkan pemenuhan hidup yang utuh bagi semua anak Indonesia.

Salam kasih

Guntur Tampubolon

Ketua Pembina Yayasan Wahana Visi Indonesia

Kata Sambutan

Perjalanan Wahana Visi Indonesia hingga saat ini merupakan perjalanan kasih kemurahan Tuhan pada anak dan masyarakat di Indonesia. Kehidupan pelayanan kemanusiaan yang berfokus pada anak dituntut terus maju seiring kemajuan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip organisasi.

Proses pengembangan diri dalam meningkatkan kapasitas organisasi menjadi proses yang dinamis dengan prinsip pemberdayaan dan kepercayaan. Kepercayaan mitra internasional World Vision kepada Wahana Visi Indonesia untuk terus dikapasitasi kemampuannya dalam menjalankan implementasi program dengan tata kelola organisasi yang mumpuni terus dijalankan hingga kini World Vision resmi selesai melakukan pelayanan di Indonesia. Kepercayaan para donor dan mitra kerja memampukan Wahana Visi Indonesia untuk terus melakukan peningkatan performa kerja secara profesional.

Pemberdayaan tidak hanya diterapkan oleh Wahana Visi Indonesia dalam menjalankan program yang berfokus kepada anak dan masyarakat. Namun pemberdayaan itu sendiri menjadi proses bagi Wahana Visi Indonesia untuk bertumbuh menjadi organisasi kemanusiaan lokal yang dipercaya oleh kemitraan *global* World Vision. Peningkatan kemampuan Wahana Visi Indonesia dalam kapasitas sumber daya manusia, manajemen tata kelola yang terbuka dan terpercaya serta kemampuan kemitraan yang semakin mumpuni membekali proses Wahana Visi Indonesia untuk melanjutkan pelayanan yang sudah ditabur oleh World Vision Internasional di Indonesia. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh World Vision International pada lembaga Wahana Visi Indonesia.

Buku ini memberikan gambaran bagaimana semua proses itu terjadi dalam setiap kisah reflektif para pekerja kemanusiaan yang terpanggil di dalam organisasi ini. Kiranya pengalaman ini dapat menginspirasi para pembaca untuk terus menghidupi proses kehidupan berorganisasi guna memberikan harapan hidup anak Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Visi kami untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya
Doa kami untuk setiap hati tekad untuk mewujudkannya.

Salam kasih

Doseba T. Sinay

CEO & Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia

60 Tahun World Vision International di Indonesia



Robert Williard “Bob” Pierce lahir pada 8 Oktober 1914 di Fort Dodge, Iowa, Amerika Serikat (AS). Bob Pierce, seorang penginjil yang mendirikan lembaga kemanusiaan World Vision International pada 1950 dan Samaritan's Purse pada 1970 .

Lembaga **World Vision International** didirikan untuk membantu meringankan beban dan merespons penderitaan jutaan anak dan perempuan akibat perang di Semenanjung Korea yang melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950.

Perang Korea telah mengakibatkan penderitaan dan kehancuran bagi warganya. Kelaparan melanda seluruh Korea. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Mereka tak berdaya melawan. Bob yang diutus oleh gerejanya untuk mengunjungi Korea trenyuh melihat penderitaan yang sangat luar biasa itu. Ia berjanji dalam hati akan melakukan apapun untuk meringankan beban mereka. Pada halaman depan Alkitabnya ia menulis *“Let my heart be broken by the things that break the heart of God”* (Biarlah hatiku hancur oleh hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan).

Penderitaan yang ia saksikan terutama di Korea sangat mempengaruhi keputusan Bob kelak. Ia kembali ke Amerika dan mulai menggalang dana sebagai bantuan darurat untuk dikirimkan ke Korea. Bob sudah membuka jejaring di negara ini, terutama dengan Kyung-Chik Han, seorang pendeta dari Gereja Presbiterian Korea. Sebagai penginjil Bob sadar, memberitakan Injil kepada orang yang sedang kelaparan dan haus, yang tak punya rumah dan menderita sakit, akan sia-sia. Kehausan rohani mereka tak akan terpenuhi manakala perut dalam keadaan lapar. Bob berujar: *“You can't feed a starving man's spirit if you don't first feed his stomach,”* kata Bob. Perkataan Bob benar belaka. Kelaparan rohani seseorang tak akan terpenuhi ketika ia dalam kondisi lapar dan haus jasmani.

¹ Kisah pendirian World Vision International dapat dibaca lebih lengkap pada buku World Vision Setengah Abad Melayani di Indonesia karya Hendro Suwito (2010) yang diterbitkan secara internal oleh Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI)

² Ibid hal. 4-5



Bob Pierce,
pendiri World Vision

Berkat foto-foto dan film tentang penderitaan masyarakat, terutama anak-anak di Korea yang ia bikin, banyak hati tersentuh untuk menyumbang. Masyarakat Amerika menyisihkan beberapa dolar dari penghasilan mereka untuk membantu anak-anak yang kelaparan dan dijangkiti berbagai penyakit. Kelak, di kemudian hari, model mengumpulkan dana seperti ini, berlangsung hingga puluhan tahun, dan karena perkembangan teknologi dan dunia yang kian modern, metode pengumpulan dana juga disesuaikan dengan keadaan. Bantuan yang terus mengalir membutuhkan penanganan profesional. Mesti ada lembaga yang mengelola agar pengumpulan dan penyaluran tercatat dan teratur dilakukan. Akhirnya, pada Agustus 1950, Bob bersama beberapa rekannya mendirikan lembaga World Vision Incorporated, yang bergerak di bidang kemanusiaan. Lembaga ini berkantor di Portland, Oregon, AS. Bob didapuk menjadi presiden pertamanya.

Perang Korea terus berkecamuk antara tahun 1950-1953. Jutaan warga sipil tewas dan terluka di kedua belah pihak. Rakyat Korea mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. World Vision terus menggalang bantuan dari berbagai tempat di AS untuk dikirimkan dalam bentuk bantuan darurat berupa pakaian, makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar. Perang yang menelan korban hampir 5 juta jiwa warga sipil ini menyisakan trauma berkepanjangan bagi anak-anak. Ratusan ribu anak menjadi yatim-piatu. Mereka memerlukan dukungan secara khusus untuk jangka waktu panjang.

World Vision merancang program bantuan jangka panjang, yakni *child sponsorship* (santunan anak) terutama bagi anak-anak yatim-piatu. Dalam program ini World Vision mengaitkan sponsor donor dengan anak penerima manfaat. Penerima manfaat akan mengirimkan catatan perkembangan anak dalam bentuk surat dan foto. Pengalaman pribadi Bob Pierce ketika mendukung pembiayaan White Jade, seorang anak perempuan korban perang saudara di Tiongkok, menjadi ilham program *sponsorship* tersebut. Program ini terus berjalan hingga kini dalam pelayanan World Vision di 100 negara di dunia.

Mengunjungi Indonesia

Sekurangnya Bob Pierce empat kali mengunjungi Indonesia selama hidupnya. Pertama pada tahun 1957 ketika diundang menjadi pembicara dalam konferensi tahunan yang diselenggarakan sebuah gereja di Bandung dan Solo. Kedua pada 1958, ketika ia kembali diundang tetapi kali ini ke Kupang. Ketiga, pada tahun 1962 saat Bob diundang ke Tomohon di Sulawesi Utara, dan keempat saat Gunung Agung meletus pada tahun 1963 dan Bob datang untuk mengatur penyaluran bantuan.

Sejak undangan pertama, selain menjadi pembicara dalam konferensi tersebut, Bob Pierce selalu bercerita tentang lembaga sosial kemanusiaan World Vision yang mereka dirikan di Amerika, dan mulai merintis pelayanan di negara-negara Asia seperti Korea, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Ketika menjadi pembicara di Bandung pada 1957 itulah, Bob mengenal Heini Germann Edey, misionaris utusan lembaga misi internasional World Evangelism Crusade (WEC) yang didukung oleh negara Inggris dan Jerman. Ketika itu Germann Edey bersama Detmar Scheunemann dan Volkhard Scheunemann melayani masyarakat di Kediri, Jawa Timur setelah sebelumnya berkarya di Bengkulu, Sumatera. Bob dan Germann dikabarkan mulai berkomunikasi secara rutin terkait perintisan pendirian World Vision di Indonesia.

Germann Edey segera berpindah tempat dari Bandung ke Batu di dekat Kota Malang karena kesehatan Agnes, istrinya, agak merosot. Udara di Batu dinilai lebih sejuk dan bersih sebab daerah pegunungan. Pemulihan kesehatan Agnes bisa lebih cepat terjadi.

Ketika berada di Malang, Germann Edey mulai bergaul dekat dengan Pendeta Petrus Octavianus (1928-2014), tokoh utama di balik pendirian dan pelayanan Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) dan Institut Injil Indonesia, yang di kemudian hari ikut mendukung berdirinya World Vision di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1959 Bob Pierce secara resmi meminta Germann Edey merintis pelayanan World Vision di Indonesia.

Setelah beberapa hal dipersiapkan baik di Amerika maupun Indonesia, pelayanan World Vision tercatat pertama kali mulai dilakukan di Indonesia pada April 1960. Pelayanan baru dilakukan setahun kemudian kemungkinan karena program *sponsorship* untuk Indonesia baru dibuka dan proses pengumpulan dan pengiriman uang serta barang ke Indonesia juga memakan waktu.

Penyaluran bantuan ditujukan kepada anak-anak Panti Asuhan (PA) William Booth di Bandung, menyusul kemudian PA Imanuel dan PA Wanita Protestan di Surabaya. Ketiga PA ini berada di bawah naungan Gereja Bala Keselamatan. Pada bulan Oktober 1960, Germann Edey melebarkan pelayanan World Vision ke Sulawesi Utara yakni ke PA Rumah Pengasihan di Tomohon.



Salah satu Panti Asuhan Anak di Kupang, NTT, yang memperoleh dukungan *sponsorship* dari World Vision International.

Empat PA di Surabaya dan Manado ini tercatat sebagai jejak awal pelayanan World Vision di Indonesia.

Seiring waktu, bantuan dari World Vision terus mengalir. Sebab itu, antara tahun 1961-1965 sekitar 30 PA di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan NTT didirikan atau dibantu penyelenggaraannya oleh World Vision. Germann Edey menjalin komunikasi yang erat dengan berbagai pihak untuk pendirian PA ini. Terutama ia berhubungan dengan tokoh dan lembaga Kristen atau gereja di daerah-daerah tersebut.

Wadah Hukum dan Penambahan Staf

Kegiatan World Vision di Indonesia berkembang pesat. Namun World Vision tetap sebuah lembaga asing yang sesewaktu dapat dipersoalkan kehadirannya oleh Pemerintah Indonesia. Karena alasan ini, pada 5 Mei 1962 atas saran dan dukungan Pendeta Petrus Octavianus didirikan Yayasan World Vision yang berkedudukan di Malang. Kantornya berada di garasi rumah Germann Edey. Pengurusnya hanya tiga orang, yakni: Germann Edey sendiri, Detmar Scheunemann, dan Lois Fitzgerald.

Meningkatnya pelayanan Yayasan World Vision harus diimbangi dengan penambahan staf. Direkrut staf, antara lain: Ong Bin Hwie, Isack Malino, Chris Theedens, Evie Oloendeda, Om Piet, Jusuf dan Chris. Mereka adalah staf mula-mula World Vision. Beberapa mahasiswa teologi dari WEC Bible School (Institut Injil Indonesia) yang dipimpin Germann Edey dan Petrus Octavianus juga aktif sebagai relawan. Ketika hujan abu terjadi akibat Gunung Agung di Bali meletus pada Maret 1963, bantuan dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke kantor World Vision di Malang. Bob Pierce sendiri datang dan memberikan pengarahan secara langsung terkait penyaluran bantuan bagi masyarakat di Bali.

Akhirnya kantor di garasi rumah Germann Edey sudah tak mampu lagi menampung staf dan barang bantuan yang jumlahnya semakin besar. World Vision akhirnya membangun gudang di Jalan Bromo 2, Malang, tempat menyimpan barang-barang bantuan tadi. Dalam tahun 1963, seluruh kegiatan Yayasan World Vision dipindahkan ke Jalan Bromo 2, Malang. Termasuk Germann Edey dan keluarganya yang menempti lantai dua gedung tersebut.

Setahun berselang, 1964, kesehatan Germann Edey memburuk. Mungkin karena terlalu lelah ia terkena *stroke* ringan. Bersama keluarga mereka harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Swiss untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik.

Posisi Germann Edey digantikan oleh Gene Daniels yang setahun sebelumnya sudah berada di Malang. Ia yang digambarkan berhati lembut dan penuh empati tak susah bekerja sama dengan staf dari Indonesia. Apalagi sudah setahun proses perkenalan dan bekerja bersama dengan staf lokal.

Kegiatan World Vision terus berjalan. Bantuan juga tetap berdatangan. Namun kondisi politik di Indonesia menjelang tahun 1965 itu cukup panas. Semangat anti asing sedang dikobarkan. Juga semangat anti Amerika. Presiden Soekarno dengan seruan "*go to hell with your aid!*" telah menyudutkan Amerika. Kondisi ini membuat sulit posisi World Vision sebagai lembaga asing.

Keputusan strategis diambil Gene Daniels. Setelah berbicara dengan beberapa pihak, diputuskan untuk membentuk lembaga nasional yang memayungi pelayanan World Vision di atas. Pada 28 Oktober 1965, berdiri Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia yang disingkat LEPKI. Lembaga ini berada di bawah supervisi Departemen Agama (Depag). LEPKI berada di bawah Depag sebab dalam program kerjanya LEPKI mengerjakan tiga hal sekaligus yakni: Pelayanan sosial kemanusiaan, pembinaan rohani, dan penyediaan literatur Kristen. Rektor IKIP Malang ketika itu, D. Dwidjoseputro diangkat sebagai ketua LEPKI, meskipun dalam operasional sehari-hari Gene Daniels tetap memegang kendali.

Namun pada tahun 1978 istri Gene Daniels sakit parah. Untuk mendapatkan perawatan yang memadai, mereka memutuskan untuk kembali ke AS. Dengan demikian berakhir pula pelayanan Gene Daniels di Indonesia. Ia digantikan oleh David L. Evans.

Kemudian terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 70 dan 77 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Bantuan Keagamaan di Indonesia. Keputusan ini mengatur pemisahan antara penyiaran keagamaan dan pelayanan sosial keagamaan. LEPKI diminta fokus pada pelayanan kemanusiaan dan tidak menggabungkan syiar agama dalam aktivitasnya.

Pindah Jakarta

“Tahun depan kantor World Vision pindah ke Jakarta,” demikian David L. Evans, seperti ditirukan oleh James Tumbuan . Padahal kata James, ia dan rekan-rekan baru saja menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya.

Alasan David masuk akal. “Salah satu alasan kuat adalah Jakarta ibu kota negara. Kalau World Vision mau berkembang kita harus berada di pusat pemerintahan,” demikian kembali ditirukan oleh James. Kelak perkataan David menjadi kenyataan, terutama ketika World Vision mesti melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait.

Seiring rencana pindah kantor, dicapai pula kesepakatan untuk memisahkan secara tegas pelayanan di bidang sosial kemanusiaan dan pelayanan di bidang agama. World Vision memilih berkonsentrasi pada pelayanan sosial, sementara LEPKI akan menangani pelayanan di bidang agama. Sebab itu LEPKI akan tetap berada di Malang, sementara World Vision akan masuk Jakarta.

Rombongan pertama yang masuk Jakarta adalah James Tumbuan bersama tiga staf lainnya. Sebuah ruangan di rumah di kawasan Menteng disewa sebagai kantor. Pada bulan April 1979 kloter kedua staf dari Malang masuk Jakarta. Proses transisi berlangsung hingga tahun 1980 ketika World Vision akhirnya membeli gedung di Jalan Wahid Hasyim 33 atau biasa disingkat WH 33, yang masih tetap dipakai hingga kini.

Sementara LEPKI di Malang berada di bawah pimpinan Pendeta M.S. Anwari. Mereka berkecimpung di bidang penerbitan literatur Kristen, pembinaan tenaga gereja, dan bidang pelayanan keagamaan lainnya. Tahun 1985 proses transisi antara World Vision dan LEPKI tuntas dilakukan.

Kantor di WH 33 mulai terasa detaknya. Mula-mula yang dilakukan adalah membuat kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen Sosial. Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Sekjen Departemen Sosial A.M. Tambunan dan *Officer in Charge* World Vision di Indonesia Glen D. Graber. Glen untuk sementara mengambil alih kepemimpinan World Vision sebab Skip L. Hubby, pengganti David Evans yang mengundurkan diri, belum tiba di Indonesia. Kesepakatan berlaku lima tahun dan secara berkala akan diperbarui.

Babak baru kerjasama World Vision International Indonesia bersama Pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan melakukan pemberdayaan masyarakat Indonesia dimulai.

³Ibid hal. 29

Jadwal kunjungan Bob Pierce yang padat ke berbagai negara membuatnya mengalami kelelahan fisik dan emosional yang luar biasa. Pada tahun 1967 lembaga memutuskan agar Bob Pierce melepas jabatannya sebagai Presiden World Vision agar ia bisa beristirahat. Keputusan ini membuat hubungan Bob Pierce dan keluarganya, dengan World Vision sedikit berjarak.

Namun Bob tidak bisa berdiam diri. Pada tahun 1970 ia mendirikan lembaga "Samaritan's Purse", organisasi yang mirip dengan World Vision, yang ia pimpin hingga meninggal pada tahun 1978 akibat leukemia.

Hubungan yang berjarak di atas kembali pulih tahun 2000, pada ulang tahun ke-50 World Vision International yang dirayakan di Korea Selatan dan Jepang. Anugerah Pekerti, anggota pengurus World Vision International dari Indonesia, hadir dalam acara tersebut. Ia menjadi saksi mata kembali "rujuk"nya lembaga World Vision dan keluarga Bob Pierce.

"Saya bersama istri menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 World Vision International di Korea dan Jepang. Ada peristiwa indah yang terjadi, World Vision "wawuh" (berbaikan) dengan istri Bob Pierce. Sejak Bob diberhentikan oleh pengurus international, istrinya total memutuskan hubungan dengan World Vision. Pada ulang tahun ke-50 World Vision, beliau bersama putrinya bersedia datang untuk meresmikan patung Bob setengah badan di kantor World Vision Korea," kenang Anugerah Pekerti⁴.***

⁴ Jawaban Anugerah Pekerti atas pertanyaan-pertanyaan dari Panitia Penulisan Buku melalui email. Pekerti kini bermukim di Amerika Serikat.

Yayasan Wahana Visi Indonesia Berdiri



Mempersiapkan Staf Lokal

Sejak awal kehadirannya, World Vision International atau World Vision dengan sepenuh hati telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan profesionalisme, baik dalam pengelolaan organisasi, peningkatan kapasitas staf lokal dan nasional, pengembangan sistem kerja, penerapan standar kualitas kerja, kualitas akuntabilitas dan audit, serta banyak lagi hal penting lainnya.

Peningkatan kapasitas para staf setidaknya mulai tercatat sejak World Vision masih berkantor di Malang, Jawa Timur. Gejolak anti-asing, juga anti-Amerika, yang dicituskan Orde Lama membuat para pemimpin World Vision berpikir untuk mengembangkan kemampuan staf lokal. Pada masa kepemimpinan Gene Daniels, beberapa staf lokal diberi peran yang signifikan. Antara lain M.S. Anwari (yang kemudian memimpin LEPKI), Isack Malino, Eddie Paimoen, Sudomo, dan Chasan Suhardi.

Ketika World Vision akhirnya masuk ke Jakarta pada 1979 diputuskan untuk membuka program *National Development Training Center* (NDTC) di Jatipadang, Jakarta Selatan. Program pelatihan dirancang selama empat bulan. Namun hanya sebentar di Jatipadang, tempat pelatihan NDTC dipindahkan ke Kampung Dukuh, Kramatjati yang memiliki lahan lebih luas. Teori sekaligus praktik dilakukan di lahan-lahan yang tersedia. Sepanjang dekade 1980 hingga pertengahan tahun 1990-an NDTC menjadi sumber utama kader terlatih pengembangan masyarakat yang menangani berbagai proyek pengembangan World Vision.

Meskipun demikian NDTC di Jakarta belum bisa memenuhi kebutuhan kader terlatih untuk semua wilayah pelayanan World Vision. Padahal kebutuhan akan kader terlatih dalam jumlah besar ini cukup mendesak. Apalagi proyek *Family Development* (FD) untuk Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga dan Anak (Propeka) dan *Community Development* (CD) untuk Program Kesejahteraan Masyarakat (Prokesmas) World Vision mencapai 300 lebih di seluruh wilayah layanan. Demi menanggulangi persoalan ini, World Vision menjalin kerja sama dengan lembaga mitra melalui Badan Kerja Sama baik dengan gereja atau lembaga lainnya. Untuk itu World Vision membuka *Regional Training Center* (RTC), agar pusat-pusat pelatihan didekatkan ke daerah-daerah layanan dimaksud. Ada tiga RTC yang dibuka yakni Kalimantan Barat (Samalantan dan Tebang Benua), beberapa RTC sekaligus di Papua, antara lain di Bokondini, Serui, dan Sentani serta di NTT antara lain di Rote, Belu, dan Ende.



Para kader peserta pelatihan NDTC tahun 1988.

Ketika World Vision membuka RTC di NTT, yang menjadi gubernur adalah dokter Benedictus Mboi. Istrinya, Nafsiah Mboi, juga seorang dokter sangat aktif dalam gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan berkeliling ke semua pulau di provinsi ini.

Dalam pendampingan-pendampingan yang ia lakukan, Nafsiah sering bertemu dengan staf World Vision yang nota bene juga berkarya di bidang pengembangan keluarga dan kegiatan sosial lainnya.

“Saya kenal World Vision waktu kami masih di NTT. Ada banyak kegiatan kesejahteraan sosial, terutama memperhatikan kesejahteraan anak-anak dari keluarga yang sangat miskin. Jadi waktu kami keliling itu, saya lihat betul bahwa begitu banyak kegiatan sosialnya. Tetapi staf bilang, mereka masih kekurangan tenaga yang bantu. Akhirnya kami putuskan untuk mendirikan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S). Itulah pertama kali saya minta tolong World Vision untuk bikin pelatihan. Setelah Pak Ben selesai menjabat, kami masuk ke Jakarta. Saya semakin akrab dengan World Vision,” kata Nafsiah⁵.

Selain kapasitas program dan staf lapangan yang terus ditingkatkan, komitmen World Vision untuk membangun kapasitas staf nasional juga mulai dilakukan. Niat itu tercermin dari penyiapan staf lokal untuk menduduki posisi tertinggi kantor World Vision di Indonesia.

⁵Wawancara dengan Ibu Nafsiah Mboi melalui zoom pada Selasa, 9 Maret 2021

Ketika tongkat kepemimpinan dialihkan kepada David Evans, kaderisasi mulai diprogramkan secara lebih nyata. Artinya, kaderisasi mulai dilakukan secara sengaja. Misalnya, dua wilayah pelayanan World Vision dipimpin orang Indonesia. Wilayah barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali oleh Bert Mamoto, sementara wilayah timur yang mencakup Sulawesi, NTT, dan Papua oleh James Tumbuan.

James dinilai berprestasi. Sebab itu, pada tahun 1982 ia diminta menjabat Direktur Operasional World Vision menggantikan Bryan Truman. Peristiwa itu terjadi dalam masa kepemimpinan Skip Hubby. Nuansa “Indonesia” mulai kental terasa pada masa ini, kalau dibandingkan ketika Germann Edey masih memimpin. Sebab meskipun semua pekerjaan ditangani oleh staf lokal, namun World Vision masih terkesan sebagai lembaga asing yang berkarya di Indonesia.

Pada 1984 pimpinan World Vision berpindah tangan dari Skip Hubby kepada Fram Jehangir. Fram adalah sosok yang sangat kebabakan. Ia sangat ingin, suatu hari kelak World Vision di Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia sendiri. Sebab itu, beberapa staf lokal yang dinilainya memiliki potensi diberi tanggung jawab yang lebih besar. Antara lain James L. Tumbuan seperti sudah dituliskan di atas. Tetapi bukan hanya James. Beberapa staf Indonesia juga pernah merasakan proses pembentukan oleh Fram, antara lain Soedarto, Trihadi Saptoadi, Esther Halim, Tri Budiardjo, Aryani Sardjono, Lily Wirawan, dan Eddy Sianipar.

“Organisasi sudah menyiapkan saya secara sistematis. Saya diberi kesempatan untuk ‘berkeliling’ di beberapa posisi. Dari operation, kemudian diberi kesempatan ke *finance*. Lalu ke *Human Resource Development* (HRD). Sebelum saya ditawarkan menjadi direktur nasional. Proses itu sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Saya juga diberi kesempatan berlatih manajemen selama dua minggu ke Filipina ketika saya masih direktur operasional. Tetapi saat saya diusulkan menjadi direktur nasional, saya justru tidak mau. Saya pikir World Vision terlalu besar untuk saya. Sampai suatu ketika, setelah dua kali diminta dan menggumuli permintaan tersebut dengan Tuhan, saya menerima dan siap menjalankan panggilan Tuhan ini,” kenang James⁶.

⁶Wawancara James L. Tumbuan melalui zoom pada 5 Maret 2021

Pada saat yang bersamaan, World Vision juga mulai menyiapkan beberapa staf Indonesia lainnya untuk menjadi pimpinan di kemudian hari. Termasuk mengisi posisi-posisi penting di kantor-kantor World Vision International di negara lain sesuai dengan kebijakan World Vision secara internasional. Misalnya, World Vision mempercayai tiga orang Indonesia sebagai pimpinan puncak (Direktur Nasional) di tiga negara di Asia Pasifik, yaitu Trihadi Saptoadi sebagai direktur nasional di Indonesia menggantikan James Tumbuan yang ke Myanmar, Esther Halim ke Kamboja. Setelah menyelesaikan masa tugasnya sebagai direktur nasional di Indonesia, Trihadi kemudian menjadi direktur nasional World Vision Laos dan World Vision Nepal, sebelum menjabat pemimpin World Vision Regional South Asia and Pacific di Singapura.

Pada masa kepemimpinan James Tumbuan program peningkatan kapasitas staf lokal dilakukan secara lebih masif dan terencana. Beberapa staf senior didukung mengikuti program magister dan sejumlah staf lain mengikuti studi lanjut di Yogyakarta, Jakarta, dan Australia. Para staf itu antara lain Roriwo Karetji, Saptono Jokopriadi, Susana Sрни dan lain-lain.

Pada tingkat regional, World Vision Asia-Pasifik membuka program pelatihan intensif di bidang kepemimpinan "Leadership 2000". Pelatihan diadakan secara berkala di Bangkok. Staf Indonesia yang ikut adalah Lily Irawan, Eddy Sianipar, Grace Hukom, dan Roriwo Karetji. Staf Indonesia lain yang turut bergabung di angkatan berikutnya adalah Asteria Aritonang, Helen Sijabat, Lucky Lumingkewas dan Mindaraga Raharja. Program ini kemudian bersalin rupa menjadi program master Pathways to Leadership bekerja sama dengan Eastern College dari Amerika Serikat. Anugerah Pekerti dosen tamu dalam program master tersebut.

Dalam hal peningkatan kapasitas staf, patut dicatat peran Anugerah Pekerti, anggota pengurus World Vision yang mendorong staf generasi muda untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Ia selalu siap memberi referensi bagi mereka yang mencari beasiswa untuk mengikuti program master ke luar negeri. Sementara di sisi lain World Vision membantu sebagian biaya dengan kesepakatan bahwa selesai studi mereka kembali bergabung dengan World Vision. Para staf mengambil bidang studi yang sejalan dengan pelayanan World Vision antara lain di bidang kesehatan masyarakat, pengembangan usaha mikro, antropologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Lahirnya Yayasan Wahana Visi Indonesia

World Vision International sepenuhnya paham bahwa sebagai lembaga internasional tidak dapat selamanya tinggal di Indonesia. Sementara keberadaan lembaga yang bertujuan memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terbatas oleh waktu. Ia diperlukan sepanjang waktu.

Oleh karena itu, World Vision International mulai menjajaki kemungkinan kemitraan jangka panjang dan berkelanjutan dengan lembaga nasional yang dapat tumbuh menjadi mitra World Vision secara penuh dan mandiri. Lembaga nasional tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki visi dan misi yang sejalan dengan World Vision International, memiliki tingkat kematangan governance, kapasitas kepemimpinan dan manajemen, keterampilan teknis operasional, sumber daya manusia, kualitas program, tingkat akuntabilitas yang sama dengan World Vision International.

Dengan dukungan dari World Vision International, beberapa tokoh nasional yang telah mengenal dan memahami sepenuhnya visi, misi dan program-program World Vision International mendirikan entitas nasional pada tahun 1995 dengan nama Yayasan World Vision Indonesia yang kemudian hari berubah namanya menjadi Yayasan Wahana Visi Indonesia di tahun 1998. Dokumen pendirian Yayasan World Vision Indonesia dan Yayasan Wahana Visi Indonesia tercatat dalam lembaran negara melalui Akta Pendirian No. 23, tanggal 22 Maret Tahun 1995 dan diperbarui melalui Akta Perubahan No.9 tertanggal 19 Agustus 1998.

Para tokoh nasional yang menjadi pendiri Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) ini adalah: Dr. Anugerah Pekerti (pakar manajemen), Sarwono (Letnan Jendral, Purn., mantan Sekretaris Jendral Depsos), Dr. Nafsiah Mboi MD, Ped., MPH (pakar kesehatan masyarakat dan aktivis kemanusiaan), Pdt. Dr. Eka Dharmaputra (pemimpin gereja dan pakar teologi), Drs. Christianto Wibisono (wartawan dan pakar ekonomi dan bisnis).

Sejak tahun 1992, World Vision bermitra dengan Yayasan WVI dalam pelaksanaan program di Indonesia dan melakukan pengembangan kapasitas organisasi yang meliputi *governance*, kepemimpinan dan manajemen dan sistem kerja, standar dan kontrol kualitas kerja, pengembangan kapasitas staf, dan berbagai hal strategis lainnya.

Proses bermitra ini dibarengi keyakinan bahwa WVI akan pelan-pelan dilepas untuk mandiri kelak. Keyakinan ini pula yang dirasakan oleh Nafsiah Mboi, salah satu tokoh pendiri ketika itu.

“Kami merasa bahwa WVI yang menjadi mitra World Vision sudah saatnya disapih. Sebab kontribusi kita kepada World Vision International cukup besar. Antara lain banyak staf Indonesia yang memimpin di luar negeri dan kita mulai menggalang donor lokal yang harus dikelola oleh lembaga lokal juga,” kata Nafsiah.***



Kemandirian Wahana Visi Indonesia



Secara bertahap, dengan pendampingan dan dukungan teknis dan dana, World Vision mempercayakan pelaksanaan program-program pelayanannya untuk dijalankan oleh Wahana Visi Indonesia atau WVI.

Jika pada dekade 1980-an pelayanan World Vision di Indonesia masih berupa program *Family Development* (FD) dan *Community Development* (CD) pada 20 provinsi di Indonesia, memasuki dekade 1990-an World Vision dipercaya melaksanakan dua program *government to government* yakni di bidang peningkatan kesehatan dasar masyarakat *Women and Their Children's Health* (WATCH) di Pegunungan Tengah, Papua serta *Sanggau Child Survival Project* (SCSP) di Sanggau, Kalimantan Barat. Dua proyek ini mampu membuat terobosan dalam meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup anak dan ibu.

Dokter Sukwan Handali, dokter teladan nasional yang pernah mengabdikan diri di Tiom, Lanny Jaya menjadi pimpinan lapangan program WATCH. Ia dibantu oleh Saptono Joko Priyadi, Susana Srini, Martha Kombong, dan staf lainnya. Semua staf adalah orang Indonesia. Dua program ini menjadi semacam "latihan" bagi staf Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya mengadaptasi dan menjalankan pendampingan teknis yang dilakukan oleh World Vision.

Pada sisi lain, kemajuan ekonomi pada era 1980-1990 ikut membantu pamor Indonesia di mata dunia. Lahir kelas menengah baru yang jumlahnya mencapai puluhan juta orang. Hidup mereka berkecukupan. Tidak sangat kaya, namun tidak miskin.

Dalam konteks perkembangan ekonomi dan kelas menengah Indonesia ini pula, mulai dipikirkan agar masyarakat Indonesia dilibatkan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Kelompok ini diarahkan untuk membantu pengentasan kemiskinan di daerah-daerah yang masih sangat tertinggal dengan menjadi pendonor atau sponsor lokal.

Program sponsor lokal untuk anak memang sedang digencarkan dan menjadi bagian dari kebijakan World Vision secara *global*. Negara-negara yang mulai maju perekonomiannya didorong melakukan kebijakan *sponsorship* di dalam negerinya sendiri. Indonesia termasuk negara yang dinilai ekonominya mulai maju pada waktu itu.

Langkah awalnya adalah para staf World Vision dan keluarga diajak menjadi sponsor lokal. Mereka diminta menyumbang Rp30 ribu setiap bulan untuk setiap anak. Jika dirasa berat, dua-tiga staf bergabung menanggung seorang anak.

Sebagai proyek percontohan, para staf mensponsori 100 orang anak di Kampung Patriot Merauke, Papua. Ternyata banyak staf dan keluarga yang tergerak hatinya untuk menyumbang. Dana yang terkumpul dipakai untuk menopang pendidikan dan perbaikan gizi 100 anak tersebut. Inisiatif ini di kemudian hari memberi inspirasi bagi pemimpin WVI untuk menawarkan program sponsor anak secara lebih luas yakni kepada masyarakat Indonesia.

WVI mengelola hasil pengumpulan dana dari para sponsor lokal ini. Sebab sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti sudah disebutkan di atas, *non-governmental organization* (NGO) asing tidak boleh melakukan kegiatan pengumpulan dana di Indonesia.

Jumlah dana santunan yang masih kecil membuat program sponsor lokal ini masih dilaksanakan dalam lingkup yang kecil pula. Setelah Kampung Patriot di Merauke, satu wilayah dibuka lagi yakni di distrik Pantai Kasuari, Merauke.

Pantai Kasuari dalam sejarah sponsor lokal yang dikelola WVI telah menjadi ikon. Wilayah ini menjadi simbol kebangkitan yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bisa berbagi dengan mereka yang lemah dan marjinal.

Pantai Kasuari menurut James Tumbuan berangkat dari minus. "Pantai Kasuari berangkat dari minus. Tetapi sekarang kita sudah melihat buah-buahnya. Berapa banyak di antara mereka yang sudah bisa membaca? Berapa banyak yang sudah menjadi pegawai pemerintah? Memang kalau dibandingkan dengan daerah lain mereka masih tertinggal, tetapi dari minus ke positif itu pencapaian yang luar biasa. Itu karena World Vision dan WVI pernah berada di sana," kata direktur nasional World Vision Indonesia periode 1997-2006 itu.

Gema *sponsorship* lokal mulai terdengar hingga ke kota-kota lain seperti Bandung dan Surabaya. Para staf WVI terus melakukan presentasi agar program ini tersosialisasi kepada lebih banyak orang. Pendekatan pribadi juga dilakukan. Pada dasarnya WVI tidak datang dan meminta dana untuk membantu anak-anak kurang mampu. Tetapi mengajak sponsor untuk ikut ambil bagian dalam kerja besar yang sedang dilakukan WVI.

"Pendekatan kami dari sejak awal tidak sekedar meminta dana, tetapi mengajak warga untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kepada anak dan masyarakat, termasuk *sponsorship*," kata Ruddy Koesnadi, Ketua Pembina (*board*) WVI periode 2015-2019 dan anggota board World Vision International periode 2010-2019.

Banyak cara ditempuh untuk menggalang sponsor yang lebih banyak. Bermula dari pagelaran Gema Pantai Kasuari, para artis sebagai figur yang dikenal publik mulai diajak ambil bagian sebagai *Hope Ambassador*. Mereka mewakili WVI membagi visi

dan harapan untuk membangun kehidupan anak lebih baik. Atau lebih tepatnya berpromosi tentang pentingnya masyarakat ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan anak-anak di daerah tertinggal. Beberapa selebriti, pengusaha dan figur publik seperti Sidney Mohede, Becky Tumewu, Erwin Parengkuan, Monita Tahalea, Hanna Carol, Dewi Makes, Fransisca Tjong, dan Imelda Fransisca menjadi *Hope Ambassador*.

Sementara artis dan figur publik lainnya seperti Henny Purwonegoro, Tika Panggabean, Edrick Candra, Ari Wibowo, Novita Anggie, Edo Kondologit, Katon Bagaskara, Ricky Jo, Rio Febrian, dan Delon menjadi sponsor anak dan mengisi acara penggalangan dana yang dilakukan WVI.

Pada periode 2005-2009 jangkauan sponsor lokal semakin diperluas oleh karena tanggapan positif dari para pendonor lokal. Wilayah pelayanan baru di Singkawang dan Sambas di Kalimantan Barat, Halmahera Utara di Maluku Utara, Maro di Merauke, Papua serta Sikka di Flores, NTT dibuka atas pembiayaan oleh sponsor lokal. Untuk wilayah Sikka, Sambas dan Halmahera Utara, pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh sponsor lokal bersama dengan *support offices*.





Semenjak World Vision Indonesia dipercaya menangani dua proyek kerjasama antar negara di atas, terjadi perubahan mendasar dalam cara pendekatan program.

Program FD dan CD (yang juga dikenal sebagai Pelayanan Kesejahteraan Anak atau Propeka dan Program Kesejahteraan Keluarga dan Anak atau Prokeska) dinilai kurang efektif lagi untuk memerangi kemiskinan secara lebih menyeluruh. World Vision mengadopsi pendekatan pengembangan masyarakat berdasarkan wilayah (*Area Development Program/ADP*). Model pendampingan ini dilakukan oleh World Vision secara *global*. Skala jangkauan pendekatan ADP lebih luas dibandingkan dengan Propeka dan Prokeska. Jangka waktunya pun lebih panjang, yakni antara 10-15 tahun, dan bila perlu bisa diperpanjang beberapa tahun lagi.

Metode ini dirasa cocok, sebab seluruh program diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Program-program yang dilakukan World Vision adalah peningkatan pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, pengorganisasian masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

Perbandingan sederhananya adalah sebagai berikut: Jika dalam Propeka dan Prokeska, anak-anak sponsor hanya berkisar 100-300 orang yang mendapatkan manfaatnya, maka pada pendekatan baru, anak yang terkena dampak program antara 1.000-4.000 dalam sebuah ADP. Jika hanya maksimal empat desa yang dijangkau dalam program terdahulu, maka dalam sistem ADP, tiga distrik bisa dijangkau sekaligus. Berarti puluhan desa bisa tercakup di dalamnya.

Sistem ADP ini juga disertai staf yang secara intensif mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Mereka tinggal di lapangan. Melebur dalam kehidupan masyarakat. Program-program dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara komprehensif. Artinya, program diarahkan agar berkelanjutan dan menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat yang dilayani.

Tantangan dan Peluang

Memandirikan entitas lokal WVI bukannya tanpa tantangan. Namun tantangan tersebut menjadi potensi bagi WVI untuk semakin berperan dalam program-program kemanusiaan di Indonesia. Krisis El Nino di Pegunungan Tengah Papua membuat staf World Vision dan WVI belajar mengelola dan menyalurkan bantuan dalam jangka panjang. Pengalaman di Papua sangat berguna kelak ketika gempa dan tsunami melanda Aceh, Pangandaran, Lombok dan likuefaksi di Palu. Disusul kemudian krisis moneter yang membuat banyak warga menjadi semakin miskin, terutama warga miskin yang tinggal di perkotaan. Menyusul kemudian kerusuhan politik di Jakarta, Timor-Timur lepas, konflik Poso, Ambon, Kalimantan, dan konflik lainnya. Program-program darurat dijalankan terutama untuk menolong mereka yang terlunta-lunta akibat konflik tersebut.

Ketika gempa dan tsunami dahsyat melanda Aceh, respons bencana langsung ditangani oleh World Vision *Global* hingga pada masa *recovery* setelah kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya program pengembangan wilayah berfokus pada Kesehatan Ibu dan Anak di dua wilayah di Aceh Jaya dan Aceh Barat ditangani oleh WVI sampai tahun 2012⁷ (berdasarkan interview dengan Charles Sinaga, Regional Manager Jawa Sumatra Tahun 2012).

Sementara itu, di sisi lain, sistem pelaporan untuk semua bantuan darurat dan rehabilitasi yang dipercayakan oleh donor nasional maupun internasional kepada World Vision Indonesia harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Ada mekanisme pelaporan yang disepakati bersama. Ada sistem yang diterapkan.

Sebab itu direkrut sejumlah *program officer* untuk memastikan laporan-laporan terperinci tentang pelaksanaan program bantuan disampaikan secara tepat waktu kepada para pendonor. Staf bagian keuangan diperkuat, terutama untuk menangani berbagai proyek khusus. Bagian ini menjadi sangat penting sebab ketika itu World Vision Indonesia mengelola dana yang terus meningkat jumlahnya. Ambil contoh, jika pada tahun 1996-1997 hanya sekitar 6 juta dollar yang dikelola, maka pada tahun 1999 melonjak menjadi 25 juta dollar, *plus* 19 juta dollar untuk program bantuan darurat dan rekonstruksi.

⁷berdasarkan interview dengan Charles Sinaga, Regional Manager Jawa Sumatra Tahun 2012

Demikian pula jumlah staf pada periode 1998-2003 itu. Jika semula hanya 200 orang, melonjak menjadi 1.000 orang. Para staf, terutama pada bagian keuangan, menjadi sangat profesional menangani pelaporan keuangan proyek-proyek bantuan berskala besar. Setelah krisis mereda di Indonesia, staf-staf Indonesia yang mumpuni kemampuannya ini ditarik untuk membantu proyek-proyek bantuan darurat berskala besar yang sedang dijalankan World Vision di negara lain.

Rentang waktu 1998-2003 adalah masa-masa sangat melelahkan bagi staf World Vision maupun WVI baik yang berada di Jakarta maupun di daerah-daerah krisis dan konflik. Tetapi masa itu menjadi masa pembelajaran yang sesungguhnya. Trial and error terjadi, dan akhirnya mampu mengelola berbagai program bantuan berskala besar secara cepat, tepat dan profesional.

Dengan demikian, tujuan pendampingan terhadap staf lokal WVI agar dapat melaksanakan program dengan standar kualitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan yang dijalankan oleh World Vision secara *global* dan mengikuti standar kualitas pekerjaan kemanusiaan (*humanitarian industry*) secara *global*, dapat terpenuhi, baik secara sengaja maupun akibat pelbagai krisis yang mengharuskan penanganan yang cepat dan tepat.

Kerja keras dan profesionalisme tak mengkhianati hasil. Laporan-laporan bulanan dan tahunan untuk program bantuan darurat dan rehabilitasi yang dijalankan World Vision dan WVI mendapat nilai tertinggi di antara program sejenis yang dijalankan World Vision di negara lain. Baik pelaksanaannya, akuntabilitas, ketepatan waktu pelaporan, dan kualitas pertanggungjawaban yang dinilai sangat baik.

Atas kerja keras itu, setelah 10 tahun bermitra, World Vision International yang diwakili oleh World Vision Indonesia, menganggap WVI telah mencapai tahapan kemandirian sesuai dengan standar kualitas organisasi *global*, dan sudah saatnya mempunyai wewenang penuh untuk bertindak sebagai mitra penuh dan mandiri dari kemitraan *global* World Vision. Kemandirian WVI merupakan syarat mutlak agar pelayanan kemanusiaan di Indonesia dapat dijalankan secara efektif dan makin mampu mengembangkan kebijakan-kebijakan nasional yang lebih profesional dan strategis untuk pengembangan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan.

WVI juga dipastikan untuk secara konsisten mengikuti berbagai aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang tentang yayasan, pembentukan pengurus, dan lain-lain.

“Transformasi dari World Vision International ke WVI atau Wahana Visi Indonesia bukan sekadar mendampingi mereka yang lemah, namun lebih daripada itu yakni membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial dari mereka yang kaya dan beruntung,” tutur Trihadi Saptoadi, Direktur Nasional WVI periode 2006-2010 dan anggota board WVI periode 2019-sekarang.

Menurut Trihadi, transformasi World Vision ke WVI terjadi tidak dalam konteks yang kosong, namun disertai oleh berbagai tantangan terhadap pelayanan lembaga ini, antara lain oleh berbagai konflik dan bencana besar dimana WVI ambil bagian dalam memberikan respons atau bantuan penanggulangannya.

“Inilah nilai yang hendak kita wartakan sebagai lembaga kemanusiaan Kristen. Kita berkarya dalam masyarakat yang paling membutuhkan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, dan gender melalui pelayanan kemanusiaan yang inklusif dan transformatif. Pelayanan seperti ini harus menjadi bagian dari kesaksian iman Kristiani,” kata dia.

⁸Bincang-bincang dengan Trihadi Saptoadi melalui zoom pada Rabu 3 Maret 2021

Empowerment

Proses transformasi telah terjadi dalam konteks pelayanan World Vision di Indonesia. Transformasi tersebut antara lain dengan berdirinya mitra pelayanan World Vision, yakni Wahana Visi Indonesia atau WVI.



Jika pada tahun 1960-1970-an World Vision masih menggabungkan pelayanan yang terbatas di bidang sosial dan keagamaan dan hanya dalam lingkup masyarakat beragama Kristen, memasuki periode 1980-an ke atas hingga kini, lembaga ini sepenuhnya memutuskan melayani di bidang sosial-kemanusiaan dan berada di bawah Departemen Sosial.

Sejak itu pula cakupan pelayanan menjadi lebih luas dan menjangkau masyarakat yang heterogen tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan gender. Identitas WVI sebagai lembaga sosial-kemanusiaan semakin menguat pada paruh kedua 1990-an, ketika lembaga ini ikut ambil bagian memberi bantuan kepada warga yang ditimpa berbagai bencana alam maupun konflik sosial yang melanda Indonesia.

Prinsip-prinsip tata kelola yang menjadi pegangan World Vision secara *global* berhasil diimplementasikan dengan baik ke dalam diri WVI. Gerak-langkah lembaga ini menjadi efektif, sebab diyakini bahwa proses pengentasan kemiskinan hanya dapat terjadi dengan kehadiran lembaga di tingkat lokal dan nasional serta melalui kemitraan yang kuat, dan pada saat yang bersamaan mempunyai jaringan *global*. Pengambilan keputusan dan akuntabilitas dilakukan dari tempat terdekat dengan pemberdayaan (*empowerment*) dan disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual.

Pertama Kali di Indonesia

World Vision adalah International NGO yang pertama kali memperkenalkan sekaligus melakukan pendampingan melalui program pengembangan keluarga (*Family Development-FD*) dan pengembangan masyarakat (*Community Development-CD*) di Indonesia. Puluhan dan kemudian ratusan daerah di Kalimantan, Papua, Jakarta, Sulawesi, Sumatera, dan NTT pernah merasakan bantuan World Vision dalam program pengembangan ini.

1972-1973

World Vision Indonesia adalah *International* NGO pertama di Indonesia yang menerapkan program Pengembangan Keluarga dan Pengembangan Masyarakat untuk membantu keluarga dan masyarakat miskin di daerah tertinggal keluar dari lingkaran tersebut. Proyek pengembangan pertama dilakukan di Laksado, Kalimantan Selatan, sebelum program yang sama dibuka di Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah), dan Lerak-Batu Ahim di Sungai Kajang, Kalimantan Barat. Beberapa tahun kemudian program PK dan PM telah dibuka di 300 daerah pada 22 provinsi di Indonesia.

1995

World Vision memakai pendekatan baru pada program pengembangan masyarakat dengan menerapkan program Pengembangan Area (*Area Development Program/ADP*). Jangkauan program ini lebih luas dan mulai berjejar dengan institusi lain seperti Pemerintah dan NGO lain agar dapat dilanjutkan atau diduplikasi. Jangka waktu program antara 10-15 tahun. Metode ini dirasa cocok sebab seluruh program diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, pengorganisasian masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

1997-2007



Kegiatan Ruang Sahabat Anak
pasca Gempa Aceh 2004

Tak dinyana, berbagai konflik dan bencana menimpa Indonesia. Konflik Ambon dan Poso, gempa Yogyakarta, kelaparan di Papua dan yang paling besar adalah rekonstruksi Aceh. Banyak pendonor yang mempercayakan sumbangannya untuk disalurkan oleh World Vision bersama mitranya WVI. Bantuan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi dalam skala besar dilakukan oleh keduanya. Program bantuan respons tsunami di Aceh adalah yang paling besar yang pernah dilakukan oleh World Vision di Indonesia.

2007-2010



Kegiatan OLE di Jakarta tahun 2009

Bencana-bencana besar yang melanda Indonesia membuat World Vision memprioritaskan upaya mitigasi bencana dengan melakukan berbagai pelatihan tanggap bencana di Jawa, NTT, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tujuannya adalah agar warga dan Pemerintah dapat menekan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi. Dalam periode ini World Vision juga aktif berkampanye dan melakukan advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan menekan laju penyebaran HIV dan AIDS di Jawa dan Papua. Selain itu tanggap darurat di Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu, dan Padang dilakukan. World Vision terus meningkatkan efektivitas pelayanan di ADP-ADP agar semakin banyak warga mampu meningkatkan kualitas kehidupannya, terutama anak-anak mereka. Lebih dari 90.000 anak tercatat dalam program santunan anak yang dijalankan World Vision di seluruh Indonesia.

2010-2020

WVI mulai terlibat secara penuh dan berperan besar dalam proses pemulihan pasca-tsunami Aceh. Area pelayanan meliputi semua wilayah pelayanan World Vision di masa tanggap darurat. WVI membuka program ADP dengan mulai memakai nama dan identitas Wahana Visi Indonesia. Setiap *Area Manager* (AM) yang menjalankan ADP semakin berperan melakukan terobosan-terobosan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga setempat, untuk mendukung program-program ADP. Dalam periode ini pula World Vision menilai sudah saatnya memberikan kewenangan penuh terhadap WVI untuk melanjutkan pelayanan World Vision sesuai visi, misi dan nilai-nilai dasar yang diyakini bersama selama 60 tahun.

Sampai akhir periode *Country Strategy* 2016-2020, WVI telah mendapatkan kepercayaan untuk membangun kerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat nasional yakni kementerian dan lembaga setingkat menteri, maupun daerah. Baik WVI maupun Pemerintah memiliki semangat yang sama yakni mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan, sebab WVI sadar memberantas kemiskinan dan tanggap darurat bencana tak dapat dikerjakan sendiri.

Kerja Sama dengan Pemerintah

“Menabung” Pohon untuk Masa Depan Anak

Kecamatan Haharu di Kabupaten Sumba Timur, NTT, adalah kawasan paling kering di Pulau Sumba. Padang terbuka. Berdebu. Penuh bebatuan.

Roda perekonomian warga bergantung sepenuhnya pada alam. Bila curah hujan cukup, panen jagung bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika kemarau panjang, ladang-ladang tak menghasilkan apapun.

Dari hasil studi yang dilakukan WVI ada beberapa faktor lain yang harus dihadapi oleh masyarakat di Haharu atau Sumba Timur pada umumnya adalah; pertama, kebiasaan berladang monokultur tanpa pengembangan intensif. Masyarakat hanya mengenal jagung sebagai bahan makanan pokok. Kedua, pemenuhan gizi menjadi tidak seimbang karena variasi bahan pangan sangat minim. Ketiga, masyarakat masih menggunakan sistem pertanian tradisional.

Pada tahun 2011 WVI menerapkan program *Increase Food Security within the Community through Sustainable Livelihood and Natural Resources Management System* (INFOCUS). Warga diajak bekerja sama membangun masa depan anak-anak mereka dengan menanam beragam tanaman lain dengan cara yang berbeda. Artinya, warga tidak hanya bertanam jagung. WVI mengenalkan jenis tanaman lain yang memiliki nilai gizi dan ekonomi yang tinggi untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dengan bertambahnya perbendaharaan bahan makanan dan tanaman produksi, diharapkan mereka memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat menghadapi segala musim. Program dimulai pada April 2012 dengan mengajak serta pemerintah kabupaten melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur.

Warga diajak mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas bidang pertanian secara gratis. Hanya diperlukan tekad dan komitmen untuk mempraktikkan ilmu yang didapat yakni; menanam pohon usia panjang dan tanaman lain yang bernilai gizi.



Salah satu hasil dari INFOCUS di Sumba Timur adalah mengalirnya kembali dua mata air yang telah lama kering karena pohon-pohon di hutan tidak ditebangi.

Tetapi apakah tanaman bisa tumbuh di atas lahan berbatu dengan curah hujan sangat minim? Kendala alam ini sudah dialami secara turun-temurun. Namun atas anjuran WVI, mereka tetap mau mencoba membuat demplot tempat menanam sayur, buah-buahan, dan pohon bernilai ekonomi tinggi. Langkah berikutnya adalah melakukan palotang, yaitu merawat tanaman dan pohon di hutan desa yang menjadi daya dukung pengairan bagi ladang-ladang warga. Palotang juga dilakukan untuk meredam potensi kebakaran hutan dan ladang. Selain mengenali jenis-jenis tanaman bernilai ekonomi dan mengandung gizi, memperkenalkan teknik perawatan tanaman, warga juga belajar tentang makanan bergizi, pola hidup sehat, cara menyimpan hasil panen dan tabungan pendidikan bagi anak-anak mereka. Lahir istilah *Utang na Anamu*: Hutan untuk masa depan anak. Ketika itu yang menjadi manajer ADP Sumba Timur adalah dokter Amsal Ginting (alm).

Bila bahan makanan habis, masyarakat Sumba Timur terbiasa melakukan budaya "*mandara*", yaitu membarter hasil panen dengan ikan atau komoditas lain sampai hasil panen habis sama sekali. Akibatnya, mereka tidak memiliki cadangan makanan di lumbung dan sangat berisiko mengalami bencana kelaparan.

Perlahan-lahan, WVI mengajak masyarakat agar mau "menabung" makanan dalam lumbung, tanpa menghilangkan budaya *mandara* yang menjadi ciri khas orang Sumba. Selanjutnya, WVI menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, agar kesadaran yang sama dapat meluas ke daerah-daerah lain.

Tujuan akhir dari kerja sama multi *stakeholder* ini adalah mengangkat potensi masyarakat sendiri dalam mengadvokasi Pemerintah agar bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Tiga tahun berlalu sejak program INFOCUS diterapkan di Sumba Timur. Perubahan positif mulai dinikmati warga. Perubahan tersebut adalah:

1. Bertambahnya ketersediaan air bersih. Sejak warga menanam pohon dan melakukan palotang (merawat hutan), mata air yang tadinya kering, mulai terisi kembali. Misalnya mata air Lukutamiang dan Punggu Ngihing mulai mengalir kembali. Air yang tersedia berujung pada peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan anak-anak.
2. Hasil menanam pohon dan berkebun pun membuka kesadaran warga untuk menabung. Hal ini terbukti dari 225 rekening baru yang dibuka di Bank NTT Sumba Timur selama tiga tahun belakangan dengan jumlah tabungan mencapai Rp1,6 miliar. Biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak di Haharu dan Sumba Timur pada umumnya kini semakin terjangkau.
3. Terdapat lahan bertani dengan metode tumpang sari seluas 22 hektar yang tersebar di tujuh desa Kecamatan Haharu. Selain itu, warga juga mengalokasikan sembilan hektar lahan hutan yang dirawat dengan sistem palotang.

Hasilnya mulai dirasakan warga. Anak-anak mereka tak ada lagi yang putus sekolah. Sementara itu orang tua semakin giat menabung bagi pendidikan anak-anak mereka. Tidak saja dalam bentuk tanaman jangka panjang seperti jati, gamalina dan mahoni, tetapi juga dalam bentuk rekening di bank.

“Kerajinan kami berbuah penghargaan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumba Timur pada Januari 2014, sebagai desa dengan jumlah penabung terbanyak,” ujar salah seorang warga Haharu.

Contoh yang baik di atas juga ditiru oleh anak-anak mereka dengan ikut menanam pohon. “Kini, saya dan teman-teman juga sudah bisa menanam, memiliki pohon, dan tabungan sendiri. Jika pohon-pohon itu sudah besar, dapat dijual untuk biaya pendidikan saya. Melalui program ini, saya juga semakin peduli terhadap lingkungan dengan menjaga tanaman liar yang tumbuh di jalan dan di hutan. Makanan di rumah pun selalu ada karena kami sendiri yang menanamnya,” kata salah seorang siswa.

“Melalui program ini, kami belajar membuka lahan secara berkelompok yang ditanami tanaman umur panjang seperti jati, gamalina, dan mahoni. Kami juga menanam sayur, kacang-kacangan, bawang serta ubi-ubian untuk dimakan hari-hari dan dijual. Pengalaman ini berdampak besar bagi saya, pola pikir saya mulai terbuka. Tadinya, saya biasa menebang pohon liar untuk dikeringkan dan dijual sebagai kayu bakar, sekarang saya bersama masyarakat lain malah merawat pohon liar,” kata seorang warga. Setelah tiga tahun melakukan palotang, dua mata air mulai mengalir yakni mata air Lukutamiang dan mata air Punggu Nginging.

Kabupaten/Kota dan Pulau Layak Anak

Dalam karyanya, WVI melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal dalam tataran kebijakan dan program pro-anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bersama Pemerintah dan masyarakat di wilayah dampingan.

Upaya tersebut antara lain di bidang pengembangan masyarakat, advokasi dan tanggap bencana di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan ekonomi di 58 titik di 14 provinsi di Indonesia.

Keseriusan WVI dalam bidang ini mendapatkan dukungan dari *European Union Civil Society Empowerment* dengan memberikan hibah sebesar EUR 650.000 untuk melaksanakan Program Penguatan Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak di Sintang, Melawi, dan Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Program berdurasi empat tahun (2016- 2020) ini menysasar 3 Forum Anak, 10 Organisasi Masyarakat Sipil di Kalimantan Barat, 3 gugus tugas KLA, pemerintah daerah dan sejumlah fasilitator masyarakat desa, dengan fokus untuk mendukung pencapaian klaster 3 KLA, yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan.

WVI membentuk koalisi perlindungan anak di masing-masing kabupaten: KOMPAS (Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Sekadau), KOPAS (Koalisi Organisasi Peduli Anak Sintang) dan KOMPAWI (Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Melawi). Implementasi program ini dilaksanakan di 10 kecamatan dan 50 desa pada tiga kabupaten sasaran.

“Kami bersama-sama melakukan proses CVA (*Citizen Voice and Action*) yaitu penguatan suara dan aksi masyarakat yang dilakukan dengan proses dialog dan diskusi, bagaimana dari kedua belah pihak baik pemerintah memahami hak-hak pelayanan dasar dan dari sisi masyarakat memahami apa yang menjadi hak-hak masyarakat,” ujar Direktur Nasional WVI Doseba T. Sinay.

Pada tingkat daerah, WVI telah ikut memfasilitasi berbagai sesi pengembangan kapasitas daerah dalam memahami KLA, mendeklarasikan komitmen daerah menuju KLA, membangun gugus tugas dan rencana aksi, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa. Sekurangnya ada 23 kabupaten dan kota di wilayah dampingan WVI yang telah memberlakukan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Empat diantaranya telah meraih peringkat Pratama, dua peringkat Madya dan untuk peringkat Nindya serta Utama masing-masing satu.

Sejumlah 41 kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah difasilitasi pengembangannya. Sejumlah 264 Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan telah didampingi pembentukan dan keaktifannya sebagai salah satu unsur kekuatan KLA.



Pada 2018, Pulau Siri di Ternate, Maluku Utara menjadi pulau pertama di Indonesia yang mendeklarasikan komitmen Pulau Layak Anak (PLA).

Menteri Yohana Yembise hadir dalam acara deklarasi komitmen Pulau Hiri menuju Pulau Layak Anak tahun 2018.

Deklarasi komitmen Pulau Hiri menuju Pulau Layak Anak dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise. "Pencanangan Pulau Layak Anak merupakan yang pertama kali di Indonesia," ujar Menteri Yohana ketika itu. Deklarasi Pulau Hiri menuju PLA tak lepas dari kemitraan antara WVI dan pemerintah. Pulau ini sudah menjadi wilayah dampingan WVI sejak 2008.

Peran WVI di Pulau Hiri dapat dilihat dari pengabdian Charles Albertho Welhelmus Frans. Charles sudah sejak 1999 bergabung dengan WVI, dan pada 2018 bersama tim WVI Area Program Ternate bersama pemerintah dan masyarakat berhasil mendeklarasikan Pulau Hiri sebagai PLA.

“Masyarakat di Pulau Hiri sangat menerima WVI dan program-programnya. Pemerintah Kota Ternate yang mau bekerja sama dengan WVI dan mitra lainnya dalam mewujudkan kota layak anak perlu diberikan jempol,” ujar Charles yang kini menjadi Manajer Area Program Ternate ini.

Direktur Nasional WVI Doseba T. Sinay mengatakan, memfasilitasi implementasi KLA di Indonesia merupakan salah satu komitmen WVI. Langkah tersebut ditempuh dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama KemenPPPA. WVI berharap ruang untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah program pelayanan WVI dapat didukung penuh oleh KemenPPPA.

“Kolaborasi dan kemitraan untuk bertukar ide juga dapat dilakukan dengan maksimal antara kedua belah pihak. Dengan demikian, kita dapat bergandengan tangan dan memiliki komitmen yang sama menuju Indonesia Layak Anak 2030,” ujarnya.

WVI dan Respons Bencana

WVI menyadari bahwa pekerjaan tanggap darurat yakni penanggulangan bencana dan konflik tidak bisa dilakukan sendiri. Sebab itu WVI bermitra dengan berbagai lembaga donor, korporasi, sekolah, universitas, gereja, pemerintah dan berbagai lembaga lainnya baik dari dalam dan luar negeri untuk meringankan beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan.



Direktur Nasional WVI, Doseba T. Sinay menyerahkan bantuan untuk warga yang terdampak Gempa Lombok, Juli 2018.

Berbagai intervensi dilakukan seperti memberikan bantuan nontunai berupa bahan pangan kepada keluarga rentan (balita, ibu hamil, dan lansia), mendistribusikan paket kebersihan, bantuan non-pangan dan lain-lain.

Ketika gempa melanda pesisir utara Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat pada bulan Juli dan Agustus 2018, sekitar 3,5 juta warga terdampak. Sebanyak 564 orang meninggal dunia, 1.584 mengalami luka-luka, 445.343 orang mengungsi dan 149.715 rumah rusak, seperti dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terdapat 59.603 ibu hamil di antara korban terdampak, 72.582 bayi, 213.724 anak di bawah tiga tahun, serta 304.526 anak berusia di atas tiga tahun.

WVI yang telah terlatih dalam tanggap bencana segera turun tangan melakukan intervensi untuk mengurangi penderitaan warga terdampak serta memperkuat ketahanan anak-anak dan masyarakat melalui berbagai program dan aktivitas.

Global Centre menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam lingkup internasional. Sementara WVI menjalin kemitraan dengan lembaga dan pendonor dari dalam negeri. Untuk respons Lombok bantuan berhasil dihimpun dari World Vision (WV) Amerika, WV Hongkong, WV Korea, WV Canada, WV Singapura, WV Australia dan WV Malaysia. Lembaga internasional dan nasional seperti Aktion Deutschland Hilft (aliansi organisasi bantuan Jerman), Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV, HSBC, IKEA, Water Foundation, Zuellig Pharma, IBM Indonesia, Pemerintah Hongkong, serta PD Telkomsel ikut menyumbang. Total anggaran yang terkumpul sebesar USD 2.782.799 yang kalau dikurskan ke dalam rupiah (USD 1= Rp14 ribu rupiah) mencapai Rp38,9 miliar.

WVI sebagai entitas nasional memiliki wewenang untuk mengembangkan manajemen dan pelaksanaan teknis operasional berbagai program repons bencana dan pemberdayaan yang dianggap sesuai dengan konteks setempat. Sebab itu WVI menyalurkan bantuan kepada 25.000 kepala keluarga (sekitar 100.000 jiwa) untuk bantuan nonpangan, dukungan untuk anak dalam situasi darurat, kesehatan dan gizi, air, sanitasi dan kebersihan (WASH), program bantuan nontunai, dan pembangunan hunian sementara di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur.

Belum lagi selesai di Lombok, gempa bumi yang disertai tsunami dan likuefaksi menghantam Palu di Sulawesi Tengah. Menyusul kemudian pada akhir tahun 2018, tiba-tiba Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda meletus hebat pada 22 Desember 2018. Terjadi pasang yang tinggi dan longsor seluas 64 ha di bawah laut. Tsunami menghantam daerah pesisir Pandeglang, Banten dan Lampung malam itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), letusan dan longsor bawah laut itulah yang memicu tsunami. Sedikitnya 426 orang tewas, 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini.

WVI melakukan respons bencana melalui program *Sunda Straits Tsunami Emergency Response* (SSTER). Selain tanggap darurat berupa pembagian makanan dan pakaian bagi pengungsi, program ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana tsunami terutama anak-anak. Karena itu dipilih 28 desa di Kabupaten Pandeglang dan tujuh desa di Kabupaten Lampung Selatan yang paling berdampak.

Wilayah dampingan Kabupaten Pandeglang meliputi enam desa di Kecamatan Sumur, delapan desa di Kecamatan Labuan, 10 desa di Kecamatan Carita, dan masing-masing satu desa di kecamatan Cigeulis, Angsana, Sukaresmi dan Pulosari. Sementara itu di Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas lima desa di kecamatan Rajabasa dan dua desa di Kecamatan Kalianda. Total sembilan kecamatan, dua kabupaten, dan 35 desa.



Bantuan untuk warga yang terdampak tsunami di Selat Sunda, 2018.

Tujuan utama SSTER adalah mengurangi dampak akibat tsunami dan memperkuat ketahanan anak-anak dan masyarakat.

Peningkatan status gizi anak dan akses terhadap layanan dasar masyarakat menjadi prioritas. Anak-anak harus memiliki akses yang lebih baik ke lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Para orang tua yang kehilangan mata pencarian karena tsunami dibantu agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Sebab itu, masyarakat berdampak dilibatkan dalam upaya-upaya yang dijalankan WVI, agar nanti setelah respons selesai, program-program yang perlahan dilaksanakan dapat dilanjutkan oleh warga.

Dalam SSTER, WVI memberikan bantuan nonpangan berupa pembagian alat-alat rumah tangga, *Family Shelter Kit*, *Family Hygiene Kit*, *Children Hygiene Kit*, *Children Kit*, *Bazaar Peralatan Dapur*.

Khusus untuk perlindungan anak, WVI menyediakan Ruang Sahabat Anak, Pelatihan Dukungan Psikososial bagi Pendamping, Sosialisasi Perlindungan Anak bagi orang tua, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Untuk bidang kesehatan dilakukan Sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Dapur PMBA, Orientasi PMBA bagi kader dan tenaga kesehatan, Bantuan Nontunai (BNT), Penyusunan Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) PMBA dalam kebencanaan, Distribusi Peralatan Posyandu dan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM). Pada bidang ekonomi dilakukan program padat karya, bantuan nontunai multiguna melalui transfer nontunai untuk keperluan modal usaha, pendidikan anak, kesehatan, sandang, pangan, papan, dengan angka mencapai Rp3,8 miliar.

Ada pula program pengurangan resiko bencana melalui Sekolah Aman Bencana dan Mendukung Desa Tangguh Bencana. Penerima manfaat adalah 829 KK (4.184 orang di Kabupaten Lampung Selatan) dan 2.273 KK (10.007 orang di Kabupaten Pandeglang).

Respons Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah

Ketika bencana besar berupa gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu, WVI menjadi salah satu organisasi yang melakukan tanggap bencana melalui *Central Sulawesi Earthquake and Tsunami Emergency Response* (CENTRE).



Keadaan salah satu wilayah di Palu, Sulawesi Tengah, seminggu setelah dihantam gempa bumi bermagnitudo 7,4 dan tsunami.

Program tanggap bencana yang mendapat dukungan dari para mitra dan donor ini telah memberi manfaat kepada sebanyak 46.224 keluarga dengan 176.026 total penerima manfaat (80.583 di antaranya adalah anak-anak) di 240 desa pada empat wilayah (Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong) dengan total pengeluaran USD 15.377.187.

CENTRE membagi implementasi respons dalam dua tahap yaitu tahap “Tanggap Darurat” dari 1 Oktober 2018 hingga 31 Maret 2019 dan tahap “Rehabilitasi serta Pemulihan” dari 1 April 2019 hingga 30 November 2020. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang muncul pada saat penyelesaian tahap “Rehabilitasi dan Pemulihan”, WVI juga telah mengimplementasikan program untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah dampingan sejak Maret 2020.

Pada tahun kedua respons, pendampingan difokuskan pada 14 desa di Palu, Sigi, dan Donggala melalui lima sektor yaitu hunian sementara (Huntara), air, sanitasi dan kebersihan (WASH), kesehatan dan gizi, pendidikan (termasuk perlindungan anak di sekolah) serta ekonomi. Huntara dengan metode rumah



Anak-anak yang terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah belajar di ruang kelas darurat.

tumbuh memungkinkan masyarakat yang terdampak bencana untuk bisa membangun kamar atau ruang tambahan setelah mereka memiliki dana yang cukup. Untuk memastikan masyarakat yang terkena dampak dapat mengakses air, sanitasi dan kebersihan, jamban disediakan di setiap huntara. Tersedia juga sumur bor dan pipa, fasilitas cuci tangan dengan sabun, serta promosi kebersihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, program pemberian makanan tambahan dan pengembangan kebun gizi keluarga balita diterapkan untuk mengurangi jumlah balita dengan gizi buruk.

Pada bidang pendidikan, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menjadi intervensi utama melalui implementasi tiga pilar, yaitu membangun sekolah aman bencana, manajemen serta edukasi terkait pencegahan dan pengurangan bencana.

Mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak juga didukung melalui pendampingan yang dilakukan terhadap petani, nelayan dan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketahanan masyarakat terhadap bencana telah disiapkan melalui pendampingan Kelompok Siaga Bencana (KSB), pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) fokus di gempa bumi, simulasi bencana dan penyusunan dokumen kontijensi bencana baik di tingkat desa maupun sekolah.



Penggalangan Dana Lokal

Worship Night Sidney Mohede

Sidney Mohede aktif menjadi *Hope Ambassador* WVI sejak 2011 dan sudah menginspirasi anak-anak di pedalaman Indonesia. Sidney telah mengunjungi berbagai daerah layanan WVI antara lain ke Sekadau di Kalimantan Barat, Timor Tengah Selatan dan Sikka di NTT serta Asmat di Papua.

Sebagai pemimpin pujian, Sidney menggunakan talentanya untuk memperkenalkan WVI dan mengajak masyarakat untuk peduli kepada anak-anak Indonesia dengan menjadi Sponsor Anak. Sejak 2012 *Worship Night* bertajuk *Gratitude* telah digelar pada 46 gereja di 31 kota. Berkat kegiatan ini lebih dari 10.000 anak di Kalimantan, NTT, dan Papua mendapatkan dukungan sponsor melalui program sponsor anak.



Konser *Worship Night* bersama Sidney Mohede.

Dalam masa pandemi COVID-19, Sidney tetap mengupayakan dukungan kepada anak-anak Indonesia melalui *Worship Night* "Jujur" yang dilakukan secara virtual pada Juli 2020. Melalui konser ini, donasi sekitar Rp1,2 miliar berhasil terkumpul.

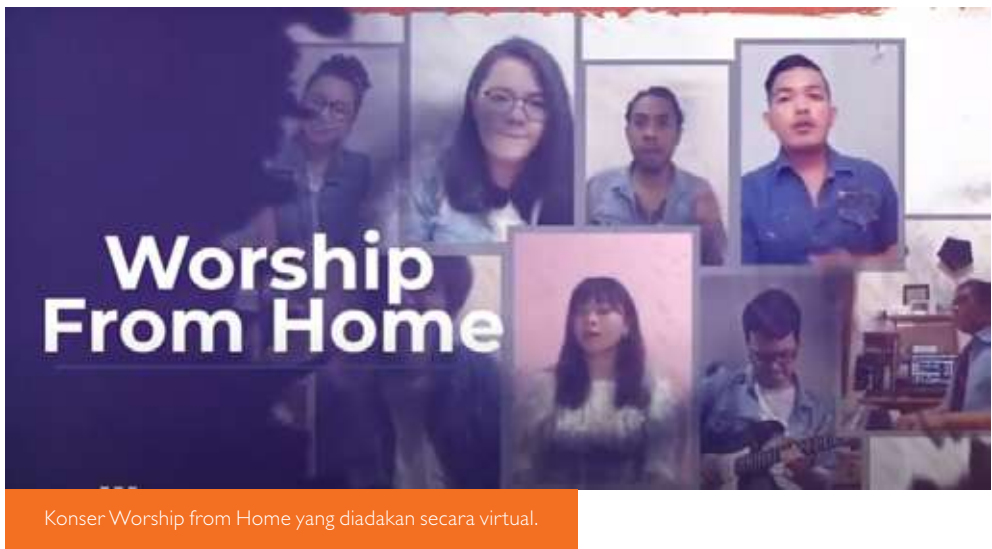


Konser TCC di salah satu gereja di Indonesia.

The Choir Company

Dukungan untuk anak Indonesia juga dilakukan oleh grup vokal asal Belanda, *The Choir Company* (TCC).

Beranggotakan 15-20 orang pria dan wanita dari inter-denominasi gereja yang berbeda di Belanda, TCC memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu program kemanusiaan. Sejak 2001 hingga 2019, sudah 10 kali TCC datang ke Indonesia dan menggalang kepedulian untuk anak-anak Indonesia. Sebagai wujud totalitas pelayanannya, setiap anggota TCC membiayai perjalanannya sendiri dari Belanda-Indonesia-Belanda. Berkat dukungan TCC lewat konser yang mereka lakukan di 52 gereja dari beberapa kota di Indonesia, 3.534 anak Indonesia sudah mendapat sponsor.



Konser di Masa Pandemi

Selain Sidney Mohede dan TCC, WVI juga mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok musisi lainnya.

Di masa pandemi COVID-19, tercatat beberapa acara musik virtual dilakukan dengan tujuan membantu penggalangan dana untuk berbagai program yang dilakukan WVI. Seperti *Worship from Home* yang didukung oleh berbagai musisi dan band rohani di Indonesia seperti Franky Koencoro, JPCC Worship, GMS Worship, dan lainnya. Selain itu ada Prayer Night bersama Sound of Praise, *Youth for Nation Concert* dengan GKI Youth Choir Jatim dan Dini Rambupiras pada bulan Agustus 2020, Suara Anak Indonesia Charity Concert pada bulan September 2020 serta *Classical Christmas Charity Concert 'HOPE'* kolaborasi dengan musisi klasik Indonesia pada bulan Desember 2020.

Melalui seluruh konser virtual ini, donasi sekitar Rp1,2 miliar berhasil terkumpul.

Peran Corporate/ Perusahaan

Perusahaan juga turut serta dalam upaya penggalangan dana bagi keberlangsungan program WVI.



Kemitraan dalam penggalangan dana ini dilakukan untuk program pengembangan maupun tanggap bencana. Berbagai perusahaan seperti HSBC, Prudential, Samsung, Dow, Mastercard, IKEA Indonesia, YPP SCTV Indosiar, Trisula Corporation, dan masih banyak lainnya turut memberi kontribusi besar bagi pelayanan WVI. Berbagai tanggap bencana yang didukung antara lain Erupsi Gunung Sinabung, Banjir Bandang di Garut, Kebakaran Hutan di Kalimantan, Gempa Pidie Jaya, Erupsi Gunung Agung, Gempa Lombok, Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah, Tsunami di Selat Sunda, Gempa Maluku, Banjir Jakarta, pandemi COVID-19, Gempa Sulawesi Barat dan terakhir siklon Seroja di NTT. Sedangkan untuk program pengembangan masyarakat, berbagai donor perusahaan mendukung kesejahteraan anak dan keluarga Indonesia melalui program literasi anak dan literasi digital, sanitasi, kesehatan ibu dan anak, pengembangan ekonomi konteks pedesaan, serta berbagai program lainnya yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan masyarakat di wilayah – wilayah dampingan WVI.

Learning Center di Biak, Papua

Bekerja sama dengan WVI dan pemerintah Kabupaten Biak, Samsung Electronics Indonesia meresmikan *Samsung Smart Learning Class* (SSLC) di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Waupnor di Kota Biak, Kabupaten Biak Numfor.



Suasana Samsung Smart Learning Class (SSLC) di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Waupnor, Biak, Papua.

WVI dan Samsung memilih Biak karena tingkat melek huruf yang masih rendah di daerah ini. Menurut Badan Pusat Statistik Biak, indeks kemiskinan Biak mencapai 76 persen dengan Indeks Pembangunan Manusia 57,22 persen. Kondisi ini diikuti oleh tingkat partisipasi rendah sekolah dasar yang mencapai 96,84 persen dan tingkat melek huruf anak-anak 11 tahun yang mampu membaca dengan pemahaman yang baik pada 31,25 persen.

Samsung menyediakan 31 unit Samsung Galaxy Tab A with S-Pen, dua unit Gear VR, dua unit Samsung Galaxy A8, dua unit Samsung Smart TV 55 inci, dan dua unit Samsung AC. Samsung juga memberikan pelatihan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan mengembangkan tim dukungan Teknologi Informasi untuk memantau dan melihat umpan balik tentang implementasi program tersebut. Samsung juga menyediakan enam unit Galaxy Tab A with S-Pen untuk digunakan WVI dalam proses *monitoring* dan evaluasi. Proses evaluasi dilakukan bersama-sama dengan dinas pendidikan setempat.

Fasilitas SSLC tidak saja menarget siswa, tetapi juga pada guru, orang tua, pemerintah daerah dan komunitas lainnya untuk memanfaatkan teknologi ini. Harapannya, proses belajar mengajar di kelas lebih menarik bagi para siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi guru, serta pengenalan dan pemanfaatan teknologi bagi masyarakat.

“Program SSLC adalah salah satu bentuk komitmen Samsung berkontribusi pada pendidikan di Indonesia. Kami yakin teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar, karena dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendorong keingintahuan bagi siswa, serta membantu guru mulai dari mencari materi ajar dan bisa menjadi alat peraga yang lebih interaktif. Kami berharap SSLC di Biak ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk siswa di SD YPK Waupnor, tapi juga sekolah di sekitarnya dan masyarakat,” ujar Kang Hyun Lee, *Vice President* Samsung Electronics Indonesia.

WVI telah bergerak untuk pendidikan di Biak sejak 2014. SSLC di SD YPK Waupnor juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan replikasi dan membuat program ini menjadi berkelanjutan.

“Dalam setiap melaksanakan program, kami senantiasa berkoordinasi pemerintah setempat dan masyarakat untuk memastikan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan program. WVI menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus dalam upaya mewujudkan kesejahteraan anak-anak. Menjadi mitra Samsung dalam pelaksanaan program Samsung Smart Learning Center di Biak diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah dan dapat digunakan oleh masyarakat di sekitar sehingga mereka dapat memanfaatkan pusat pembelajaran untuk mengakses informasi sebanyak mungkin,” ujar Doseba T. Sinay, CEO & Direktur Nasional WVI.



Seorang anak sedang membaca buku di Rumah Baca Yoboi, Sentani

Rumah Baca Sentani

WVI menggunakan pendekatan Wahana Literasi pada wilayah pada Area Program Sentani dengan melakukan pendampingan terhadap empat Rumah Baca (perpustakaan) di sekitar area Danau Sentani, Papua.

Antara lain Rumah Baca Yoboi khusus bagi anak-anak yang tinggal di pinggir atau di pulau pada area Danau Sentani. Kehadiran Rumah Baca Yoboi membuat anak-anak berkumpul dan merasakan keseruan belajar dan bermain bersama.

Rumah Baca Yoboi dan Rumah Baca lainnya di Sentani berdirinya berkat sinergi bersama masyarakat. Pada tahun 2020, Rumah Baca Yoboi berhasil meraih juara pertama Lomba Perpustakaan Umum (kampung/desa/kelurahan) yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

Solis Hanny Felle yang juga merupakan tutor di Rumah Baca Yoboi sekaligus pendamping anak di kampung Yoboi menerima penghargaan tersebut. Keaktifan, ketersediaan kurikulum membaca serta lengkapnya formasi tutor baca pendamping menjadi beberapa alasan mengapa perpustakaan sederhana ini berhasil menyabet juara.

Rumah Baca Yoboi juga telah menggunakan bahan lokal yang terintegrasi dengan kegiatan literasi membaca dasar, sekaligus turut menggunakan panduan Modul Wahana Literasi yang diterbitkan oleh WVI. Rumah Baca Yoboi juga dinilai memiliki banyak atribut dan pajangan berupa abjad dan gambar bernuansa kontekstual yang memudahkan anak untuk memahami huruf dan kata. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Rumah Baca Yoboi beraktivitas selama dua minggu sekali. Setiap anak baik usia PAUD, SD dan SMP bisa mendatangi rumah baca ini dan membaca buku-buku kesukaan mereka pada pagi hingga malam hari.

WVI sendiri telah mendampingi Kampung Yoboi sejak 2012. Kampung Yoboi juga menjadi salah satu pelopor hadirnya KBA (Kelompok Belajar Anak) yang menyasar semua usia wakil anak di Sentani. Beragam kegiatan seperti pengembangan diri dan kecakapan hidup menjadi fokus utama dalam KBA ini. Sementara itu, Rumah Baca Yoboi telah berintegrasi dengan Wahana Literasi WVI sejak April 2018.

Kampanye #BeraniMimpi

Kampanye #BeraniMimpi merupakan kampanye sosial WVI untuk generasi milenial dengan konsep yang menggabungkan *crowdfunding* dengan *voluntourism* (kombinasi antara *Volunteering* dan *Tourism*).



Kampanye Berani Mimpi Tahun 2017 untuk Rumah Belajar di Wamena.

Konsep *crowdfunding* ini dilaksanakan melalui kompetisi galang dana *online* melalui portal beranimimpi.id, sedangkan konsep *voluntourism* ditawarkan sebagai hadiah bagi tiga orang pemenang kompetisi, yakni mereka yang berhasil menggalang dana terbanyak, agar dapat menikmati keindahan alam daerah yang dituju, sekaligus merasakan indahnya berinteraksi dan berbagi cerita, pengalaman, ataupun keahlian dengan anak-anak di sana bersama salah satu *ambassador* #BeraniMimpi, yakni seorang tokoh atau artis yang dipilih untuk kepentingan ini.

Kampanye ini pernah menggalang donasi sebesar Rp554 juta untuk membangun sumur bor air bersih dan pengadaan peralatan posyandu di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Melalui kampanye yang sama, pada tahun 2017 berhasil mengumpulkan Rp225 juta untuk membangun Honai Belajar dan sarana sanitasi pada tiga sekolah di Desa Sapalek, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Di Sapalek, 180 anak SD menumpang belajar di kantor kepala desa, sementara proses belajar-mengajar hanya dilakukan pada hari sabtu, tanpa fasilitas sanitasi bagi anak-anak. Selain kebiasaan cuci tangan dan mandi yang jarang dilakukan, desa ini juga belum memiliki PAUD dan mayoritas orang tua buta huruf. Tiga *fundraiser* terbaik ikut ke Wamena untuk mengunjungi lokasi sekolah dan bertemu anak-anak Wamena secara langsung. Honai ini diresmikan langsung oleh Chelsea Islan sebagai salah satu figur publik pendukung WVI.

Melalui kampanye #BeraniMimpi, WVI berhasil membangun Honai Belajar Anak yang bisa digunakan oleh 706 anak dan 170 orang dewasa untuk belajar.

Pada tahun 2020, #BeraniMimpi Air untuk Sikka di NTT digulirkan. Program ini terutama untuk melakukan pipanisasi air bersih di Desa Hepang, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka. WVI mengajak aktor Morgan Oey serta selegram Ayla Dimitri ambil bagian berkampanye untuk mendorong masyarakat dan perusahaan menyumbang dana untuk keperluan tersebut.

Hasilnya, mulai pertengahan bulan Oktober 2020, anak-anak di Desa Hepang tak perlu lagi berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih. Pipa air bersih sudah masuk ke desa mereka berkat kerja sama WVI dan PDAM Sikka. Berkat kampanye peduli ini 180 keluarga kini dapat mengakses air bersih. Hepang merupakan salah satu desa di Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka yang setiap tahun mengalami kekeringan.

Area Program Manager Ende dan Sikka, Abner Radanni Sembong menjelaskan, untuk pengerjaan pipanisasi sepanjang 2.250 kilometer WVI menggandeng PDAM Sikka. Total biaya pengerjaan sekitar Rp360 juta berasal dari dana yang dihimpun WVI, Pemerintah Desa Hepang, dan PDAM Sikka.

"Kami membiayai pipanisasi dari sumber air sampai perbatasan desa, pemerintah desa membiayai pipanisasi ke desa mereka, lalu PDAM membuat saluran air ke rumah-rumah," ujar Abner. Kini ada 113 keran air bersih di Desa Hepang untuk memenuhi kebutuhan 180 keluarga (693 jiwa). Ke depan, pengelolaan air bersih itu ada pada PDAM Sikka.



Dr. dr. Tan Shot Yen berpartisipasi sebagai relawan dalam respons gempa Lombok 2018.

Kegiatan Volunteer (Relawan)

Peluang relawan terlibat dalam kegiatan WVI telah dimulai selama hampir lima tahun. Relawan muda mendominasi dalam kegiatan di lapangan maupun operasional di kantor pusat.

Kerjasama dengan universitas semakin memperluas jangkauan kegiatan baik dalam program pengembangan masyarakat maupun respons bencana. Tenaga ahli pun kerap memberikan waktu dan keahliannya dalam kegiatan relawan ini seperti Dr. dr. Tan Shot Yen, M. Hum seorang Ahli Gizi dalam respons gempa di Lombok & Tsunami di Banten. Kini lebih dari 2.000 data relawan tergabung dalam WVI. Kepedulian dan semangat para relawan untuk berkontribusi pada perubahan kemajuan hidup anak Indonesia ini kami percaya dapat menjadi pondasi nilai hidup mereka di masa depan.

MDGs Award

Pendidikan Harmoni Poso mendapatkan juara dua *Millennium Development Goals* (MDGs) Award untuk kategori pendidikan karakter dalam rangka rekonsiliasi warga Poso pasca trauma akibat konflik antar agama tahun 1998-2000.



WVI Kantor Operasional Sambas menerima MDGs Award untuk Sekolah Hijau pada tahun 2013.



Penghargaan diberikan di Bali pada Maret 2013. WVI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso, Muhammadiyah, GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) dan Universitas Tadulako Sulteng bersepakat untuk mulai membangun kembali lingkungan yang kondusif bagi generasi muda melalui Program Pendidikan Harmoni. Konsep dasarnya adalah mengajarkan anak-anak tentang harga diri (harmoni dengan diri sendiri), bagaimana menghargai meskipun berbeda (harmoni dengan orang lain) dan bagaimana menghargai alam (harmoni dengan alam). Program ini diluncurkan pada 2009, dan diuji coba pada 7 sekolah sebelum direplikasikan kemudian pada 31 sekolah di Sulteng.

Sementara itu dua Kantor Operasional Wahana Visi juga mendapat MDGs Awards 2013 yakni Sambas dan Sikka. Sekolah Hijau Sambas menjadi juara pertama MDG Awards 2013 kategori pendidikan oleh Organisasi Masyarakat. Sementara Pendidikan Karakter Kulababong di Sikka, NTT, menjadi juara dua MDG Awards 2013 kategori pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mendapat pendampingan dari Wahana Visi.

Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium adalah Deklarasi berisi komitmen setiap negara peserta, termasuk Indonesia, untuk mencapai delapan tujuan pembangunan, sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Kemenangan ini mengukuhkan semangat WVI untuk mengembangkan pendidikan kontekstual di berbagai lokasi dampingan WVI. "Pendidikan kontekstual terbukti mampu menjawab tantangan sosial di berbagai wilayah. Pendekatan ini mendukung bahkan memperkuat implementasi kurikulum nasional 2013. Sebagai organisasi kemanusiaan yang fokus pada anak, kami percaya bahwa proses belajar mengajar selanjutnya menjadi kenikmatan dan bukan beban bagi generasi penerus. Hal ini dapat difasilitasi melalui pendekatan pendidikan kontekstual," ujar Tjahjono Soerjodibroto, Direktur Nasional World Vision Indonesia ketika itu.

Interdependence



World Vision International berkeyakinan bahwa proses pengentasan kemiskinan hanya dapat terjadi melalui kehadiran lembaga di tingkat lokal dan nasional serta memiliki kemitraan yang kuat, dan pada saat yang sama mempunyai jaringan *global*.



World Vision International telah mengadopsi dan menerapkan bentuk kemitraan organisasi internasional (*governance*) berdasarkan pendekatan organisasi federal.

Bentuk organisasi federal tidak mengenal organisasi pusat yang mempunyai otoritas dan kuasa terhadap keseluruhan manajemen dan operasional organisasi. Dalam sistem ini kekuasaan tertinggi organisasi terletak pada anggota-anggota yang merupakan entitas nasional yang interdependent yang mandiri dan saling melengkapi.

“Masing-masing mandiri. Secara institusi WVI adalah bagian dari World Vision International. Kita adalah partner mereka, namun bukan cabang World Vision. WVI bukan cabang World Vision Internasional. WVI adalah pemilik World Vision Internasional. Sebab itu kita punya suara bagaimana organisasi ini ke depannya. Bagian ini harus sungguh dipahami,” kata Trihadi Saptoadi, Direktur Nasional World Vision Indonesia periode 2006-2010. Kini Trihadi adalah anggota *board* WVI.

Entitas nasional inilah yang akan memberikan mandat kepada pusat (*Global Centre*) untuk melakukan peran strategis dan pengembangan kebijakan dalam organisasi, termasuk memastikan tetap terjaganya visi, misi, nilai-nilai dasar organisasi di manapun program kemanusiaan dijalankan.

Kantor internasional juga mempunyai peran untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam lingkup internasional untuk makin meningkatkan efektivitas program kemanusiaan yang dijalankan.

Sedangkan pada tingkat nasional, entitas nasional diberi wewenang seluas mungkin untuk mengembangkan manajemen dan pelaksanaan teknis operasional berbagai program pemberdayaan yang dianggap sesuai dengan konteks setempat.

Salah satu syarat penting untuk menjadi entitas nasional yang mandiri (*interdependence*) ini adalah adanya organisasi nasional dengan *governance* yang kuat yang ditandai dengan adanya anggota Badan Pembina dan Pengawas (*board*) yang independen. Para *board* adalah tokoh-tokoh yang dihormati publik, berasal dari pemerintah, dunia usaha, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Semakin kita menjadi lokal dan punya board, semakin kita mempunyai suara dalam *partnership* dengan World Vision International. Hanya dengan menjadi lokal dan punya *board* inilah kita bisa menjadi anggota internasional *board*,” jelas Trihadi.

World Vision *partnership* dimiliki oleh semua negara anggota yang ada. Bila entitas nasional tidak memiliki *national board*, berarti ia tidak memiliki *international board*, sebab World Vision Internasional adalah lembaga yang dikelola oleh entitas lokal tadi. Maka istilah untuk Kantor Pusat, menurut Trihadi, bukan *headquarter* tetapi *Global Centre*.

Menurut Trihadi, World Vision International mengadopsi dan menerapkan bentuk kemitraan organisasi internasional berdasarkan pendekatan organisasi federal. Bentuk organisasi *federal* menghilangkan dan tidak mengenal organisasi pusat yang mempunyai otoritas dan kuasa terhadap keseluruhan manajemen dan operasional organisasi. Pada sistem federal, kekuasaan tertinggi organisasi terletak pada anggota-anggota yang merupakan entitas nasional yang *interdependent* yang mandiri dan saling melengkapi.

“Kita memberikan mandat kepada *Global Centre* untuk melakukan peran strategis dan pengembangan kebijakan di organisasi, termasuk memastikan tetap terjaganya visi, misi, nilai-nilai dasar organisasi di manapun program kemanusiaan dijalankan,” jelas Trihadi.

Jadi WVI bukanlah kantor cabang World Vision di Indonesia. WVI adalah entitas yang mandiri yang memiliki hak penuh untuk membentuk dan mengarahkan seluruh kebijakan di dalam World Vision, bersama negara anggota yang lainnya.

Sebab pentingnya posisi entitas lokal tadi, mencari tokoh yang mau menjadi anggota *board* bukan perkara gampang. Seorang *board* tidak saja mensyaratkan kecakapan profesional, namun juga harus merasa terpanggil untuk melayani.

“Misalnya riwayat hidupnya sudah cocok dengan yang kita butuhkan, tetapi apakah dia merasa terpanggil melayani atau tidak? Sebab kalau dia tidak terpanggil biasanya pelayanannya tidak akan lama atau akan mengundurkan diri di tengah masa pelayanan. Jadi, *you must have a calling*. Kalau tidak, berat,” kata Guntur Tampubolon, ketua *board* WVI.

Setelah menjadi *board*, persoalan belum selesai, yakni harus menahan diri agar tidak mencampuri pekerjaan eksekutif yang dikomandoi oleh direktur nasional. Hal ini terjadi menurut Guntur karena semua anggota *board* adalah profesional pada pekerjaan pokoknya.

“Problem saya terutama di sini adalah menahan diri untuk tidak campur tangan terhadap hal-hal yang menjadi ranahnya manajemen. Itu yang paling sulit buat saya. Karena sehari-hari saya sebagai eksekutif, memang urusan saya begitu, *to execute ... to manage*. Sementara sebagai *board* saya harus menempatkan diri untuk fokus pada *governance*. Pokoknya jangan ikut campur urusannya Pak Ote (Direktur Nasional WVI-pen). Jangan ikut campur urusannya dokter Candra (Direktur Manajemen Strategi-pen). Inilah hal yang paling sulit buat saya untuk tidak ikut campur hal-hal prinsip manajemen dan saya berfokus pada visi misi, *governance* dan aspek risiko. Itu yang paling sulit buat saya,” kata Guntur mengakui.

Dewan Pembina Indonesia Terbentuk

Esther Halim, adalah salah satu saksi sejarah pembentukan pertama kali Badan Pengurus Yayasan WVI pada tahun 1995.

Persoalan yang mengemuka menurut Esther adalah bagaimana bentuk lembaga yang akan menjadi mitra dari World Vision Internasional tersebut. Apakah berbentuk yayasan atau dalam bentuk yang lainnya?

“Dari awal memang direncanakan untuk membuat badan lokal. Tetapi peraturan yayasan waktu itu mengharuskan anggota board bertanggung jawab secara pribadi kalau sampai yayasan bubar. Jadi sukar sekali untuk mendapatkan orang yang mau menjadi *board* karena konsekuensinya itu,” kata Esther.

Tetapi pada sisi lain, kata dia, ada semacam kesepakatan tak tertulis bahwa apapun bentuk lembaganya kelak, visi dan misi World Vision tidak boleh berubah.

Akhirnya disepakati mitra World Vision berbentuk yayasan, yakni: Yayasan World Vision Indonesia, yang dalam Akta Perubahan di kemudian hari menjadi Yayasan Wahana Visi Indonesia yang disingkat WVI. Esther Halim tercatat dalam Akta Yayasan sebagai salah satu pendiri Yayasan bersama Sarwono, Eka Darmaputera, Soedarto, dan James Tumbuan. Sembilan orang tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kapasitas dan memahami dengan baik visi dan misi World Vision menjadi badan pengurus (*board*) pertama. Mereka antara lain:

- Dr. Anugerah Pekerti (pakar manajemen)
- Letjen (Purn) Sarwono (mantan Sekretaris Jendral Depsos RI)
- Dr. Nafsiah Mboi MD, Ped., MPH (pakar kesehatan masyarakat dan aktivis kemanusiaan)
- Pendeta Dr. Eka Dharmaputra (pemimpin gereja dan pakar teologi)
- Drs. Christianto Wibisono (wartawan dan pakar ekonomi dan bisnis).

Anugerah Pekerti, mengatakan, awalnya ia menjadi anggota pengurus (*board*) biasa. Ketika itu yang menjadi ketua pengurus adalah Mayjen. Sarwono, salah satu Dirjen di Departemen Sosial RI. Ketika Sarwono mengundurkan diri sebagai ketua, Pekerti diminta untuk menjadi ketua pengurus (*board*) menggantikannya.

“Jadi sejak tahun 1995 saya menjadi ketua pengurus (*board*) World Vision Indonesia. Lalu saya ditanya, mau ndak kalau diusulkan menjadi anggota pengurus (*board*) internasional? Ternyata saya juga terpilih. Sehingga tahun 1995 saya juga menjadi anggota internasional *board* World Vision,” kata Pekerti.

Saat menjadi ketua pengurus World Vision Indonesia maupun anggota pengurus World Vision International, Pekerti masih menjabat direktur utama di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) antara tahun 1989-1999.

Selama menjabat direktur di LPPM itu, menurut Pekerti, tak sekalipun ia mengambil hari liburnya. Akumulasi hari-hari libur itulah yang ia pakai untuk kegiatannya sebagai anggota *board* World Vision International.

“Karena menjadi *board* World Vision International memerlukan waktu tersendiri, sebab akan bepergian ke luar negeri. Tahun 1995 itu, saya sudah mengakumulasi hampir enam bulan hari libur yang belum pernah saya ambil. Maka waktu libur saya ini yang saya pakai untuk kegiatan World Vision International. (Selama menjadi anggota *board*) Saya tidak pernah absen. Saya menyelesaikan sembilan tahun, *tiga term*,” ujarnya.

Sebagai ketua pengurus (*board*) World Vision Indonesia, menurut Pekerti, ia berperan sebagai mitra pendamping SMT (*Senior Management Team*) khususnya bagi direktur nasional.

“Saya juga memastikan pengurus berperan sebagai pendamping pelaksana, mencegah penyimpangan dan mendukung tercapainya tujuan usaha. Sebagai ketua pengurus, saya setiap bulan bertemu dengan direktur nasional untuk menerima informasi tentang apa yang terjadi dalam organisasi. Kami juga bertemu mempersiapkan rapat pengurus berkala,” kata dia.

Sebagai anggota pengurus internasional, Pekerti pernah menjadi ketua beberapa komite dan *co-moderator* untuk Asia bersama Dr. Chou Lien Hwa dari Taiwan. Ia juga pernah menjadi anggota pengurus World Vision Australia selama satu masa jabatan mewakili negara lapangan dalam pengurus negara donor.

“Sebagai anggota pengurus internasional saya juga pernah menjadi anggota tim *Peer Review* di USA, India (dua kali), Ethiopia dan Indonesia. *Peer Review* adalah upaya keorganisasian WVI untuk menilai kegiatan di suatu negara apakah sesuai misi, visi, dan nilai inti yang disepakati bersama dengan mengundang rekan (*peer*) dari negara lain untuk menilai,” kata Pekerti.

Terakhir, ia terpilih sebagai moderator *Triennial Council* (sidang dewan legislatif organisasi yang dihadiri oleh utusan semua negara-pelayanan World Vision) tahun 2002 di Riverside, Amerika Serikat.

Boleh dikatakan dengan terpilihnya Pekerti sebagai anggota pengurus World Vision International, nama World Vision Indonesia dan WVI mulai diperhitungkan di tingkat internasional. Apalagi setelah itu banyak staf World Vision Indonesia yang berkarya di kantor-kantor World Vision di negara lain seperti penanganan bencana di India, Iran, Afganistan, Sudan, Kepulauan Solomon, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain.

Selama Pekerti menjadi anggota pengurus internasional, ada beberapa peristiwa keorganisasian penting di mana ia terlibat secara aktif dan ikut menentukan masa depan lembaga ini:

- a. Penggantian logo dari gambar yang mirip logo dunia ditusuk salib menjadi bintang kejora dan warna oranye. Mula-mula perusahaan *public relation* yang merancangnya mengusulkan bintang bertaju lima (cakra) berwarna oranye tanpa salib sesuai permintaan negara Barat agar mempermudah akses untuk mendapat bagian dana pembangunan kalau tidak tampil sebagai organisasi keagamaan. Anggota pengurus dari Asia dan Afrika menuntut agar tanda salib dipertahankan dan mengingatkan cakra itu senjata perang dalam Mahabharata. Akhirnya diterima bersama logo yang sekarang berlaku.
- b. Perumusan visi: *Our vision for every child life in all its fullness* (Visi kami untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya) *Our prayer for every heart the will to make it so* (Doa kami untuk setiap hati tekad untuk mewujudkannya) merupakan upaya keorganisasian yang berkembang menjadi kembara spiritual bersama mengasyikan yang melibatkan ribuan staf World Vision di seluruh dunia. Menurut Pekerti, James Tumbuan termasuk anggota kelompok kecil yang semula ditugaskan untuk merumuskan visi tersebut. "Saya tak akan lupa waktu rumusan ini dibacakan dalam rapat pengurus internasional, kami semua berdiri dan bertepuk tangan. Sungguh rumusan visi yang indah dan bermakna," kata dia. Pekerti pula yang menerjemahkan visi tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang dipakai hingga kini
- c. Pekerti bersama istri menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 World Vision di Korea dan Jepang. Ada peristiwa indah yang terjadi, World Vision wawuh (berbaikan) dengan istri Bob Pierce. Sejak Bob diberhentikan oleh pengurus internasional, istrinya total memutuskan hubungan dengan World Vision. Namun untuk ulang tahun ke-50 World Vision, beliau bersama putrinya bersedia datang untuk meresmikan patung Bob setengah badan di kantor WV Korea.

Direktur Nasional World Vision Indonesia periode 2010-2014, Tjahjono Soerjodibroto, mengakui sumbangan besar World Vision International bagi terbentuknya entitas lokal WVI. Terutama, kata dia, dalam sistem tata kelola organisasi.

"Sebagai lembaga yang mengelola dana sponsor untuk masyarakat banyak, kita perlu aturan main yang jelas. Harus tertib. Sementara WVI belum ada pengalaman waktu itu. World Vision Internasional yang membantu kita sebab sudah mempunyai sistem pengelolaan yang tertib, teruji, dilakukan di banyak negara anggota dan sudah berjalan puluhan tahun," jelas Tjahjono.

Prinsip kemitraan World Vision Internasional dan World Vision Indonesia dengan mitranya WVI terus berkembang pada zaman Tjahjono memimpin. World Vision Indonesia semakin mempercayai WVI dalam menjalankan program-program kemanusiaan di Indonesia. Hal ini terbukti dari kian besarnya dukungan dana dari negara-negara donor untuk program *sponsorship* maupun tanggap bencana. Sementara pada sisi lain, kemampuan staf WVI semakin tinggi dalam mengelola dana yang besar tersebut melalui program-program di lapangan.

“Waktu itu kita mulai buka sponsor lokal. Tapi masih kecil. Sehingga dengan mendapatkan dana melalui World Vision Internasional kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan seluas dan sebanyak mungkin. Pada saat saya menjadi direktur nasional, kita buka dan kelola sampai 50 ADP. Sebagian besar dana diperoleh dari World Vision International yang menjaringnya dari berbagai negara donor. Di Indonesia kita WVI yang mengelolanya. Jadi kita saling mengisilah sebagai mitra,” kata dia.

Sebagai mitra, menurut Tjahjono, WVI wajib mengikuti semua aturan main yang ditetapkan oleh World Vision International. Audit dari World Vision International dan beberapa negara anggota (*peer review*) dilakukan untuk memastikan semua yang dilakukan oleh WVI berjalan sesuai jalur yang ditetapkan.

“*Peer review* dilakukan dua atau tiga tahun sekali oleh negara-negara *partner* dan mitra World Vision. Mereka datang ke Indonesia untuk melakukan pengkajian, pemeriksaan dari sisi keuangan, administrasi, pengelolaan proyek dan melihat secara langsung pencapaian di lapangan,” ujar Tjahjono.

Bagi WVI, kesempatan diaudit oleh negara anggota yang lain adalah saat yang penting untuk introspeksi, memeriksa diri, apakah yang dilakukan selama ini sudah benar-benar sesuai dengan digariskan oleh lembaga atau belum.

“Mereka memberi *feedback*. Sehingga WVI bisa menilai diri apakah pelayanan sudah sesuai standar yang ditentukan atau masih ada kekurangan? Lapornya itu dibahas langsung, bersama pelaksana program dan *board* dari WVI. Kita langsung mendengar dari para auditor yang melakukan audit,” kata dia.

Anggota *peer review* biasanya adalah ahli berbagai bidang dan memiliki pengalaman panjang. Mereka bisa saja badan pengurus (*board*), manajer, staf ahli dari bidang keuangan, ahli tentang organisasi, ahli tanggap bencana, dan lain-lain.

Pada gilirannya, WVI menurut Tjahjono mulai membuka *Area Development Program* (ADP) yang dibiayai dari sponsor lokal.

“Kita harus berani membuka area-area *development* yang didanai oleh sponsor donatur dari Indonesia. Ukuran kemampuannya disesuaikan antara lain soal jumlah anak dan dana yang dikelola untuk mereka. Tapi saya ingat waktu itu, dengan dana yang terbatas kita mengupayakan untuk mencakup mulai dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita mulai dari Merauke, lalu Pantai Kasuari. Ternyata kita bisa,” kata dia.

Kala itu semakin banyak orang muda dari Indonesia yang mau menggabungkan diri ke dalam WVI. Mereka memiliki ketertarikan yang besar setelah mengetahui visi-misi lembaga ini. Bahkan menurut Tjahjono, banyak lulusan S1 dan S2 yang ikhlas meninggalkan kenyamanan mereka dan terpanggil melakukan pelayanan ke pelosok-pelosok Indonesia. Para staf ini dipersiapkan sungguh-sungguh, sebab mereka akan bekerja di pelosok-pelosok dengan situasi yang tidak mereka perkirakan sebelumnya.

Misalnya bagaimana reaksi masyarakat, kesulitan di lapangan, area cakupan yang harus ditempuh dengan jalan kaki, situasi di mana tidak ada listrik, tidak ada air, jauh dari keramaian dengan akses jalan yang susah. Para staf dipersiapkan secara serius sebelum diterjunkan ke lapangan. Minimal mereka harus melewati pelatihan selama dua sampai tiga bulan.

“Reaksi yang muncul beragam. Ada yang terpesona melihat kenyataan di lapangan dan merasa terpanggil. Ada yang bertahan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ada juga yang baru mengikuti program pelatihan sudah mengundurkan diri. Tapi lebih baik begitu, sebelum mereka diserahi tanggung jawab lebih besar di lapangan. Mereka bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri,” ujarnya.

Semasa menjadi *board* dan direktur nasional, Tjahjono pernah meninjau langsung ke pelosok-pelosok. Ia pernah berkunjung ke Boven Digul di selatan Papua, berkendara selama delapan jam, dan mobil yang mereka tumpangi tertanam dalam lumpur sehingga perlu ditarik.

“Saya jadi tahu bagaimana kesulitan yang ditemui staf di lapangan. Belum lagi reaksi masyarakat. Ada yang gampang diatur, namun ada yang susah sekali diubah pandangannya karena lama terbentuk dalam budaya tertentu,” kata Tjahjono.



Salah satu pertemuan anggota WV Academy di Kantor WVI.

WV Academy, Circle of Friends, dan WVI Alumni

Pelayanan tidak berhenti saat *board* dan Direktur Nasional menyelesaikan tugas mereka.

Pengalaman selama memimpin sangat berharga untuk menopang pertumbuhan pelayanan WVI di masa depan. Sebab itu, para mantan *board* dan Direktur Nasional berkomitmen untuk membentuk World Vision Academy (WV Academy). Lembaga ini tak mengurus tata kelola atau manajemen WVI.

WV Academy bertujuan menyosialisasikan pelayanan WVI kepada dunia usaha dan donor, gereja serta mitra lainnya. Juga untuk berbagi keahlian dengan organisasi lain yang memiliki pelayanan serupa dalam menangani kemiskinan dan ketidakadilan serta mempromosikan praktik baik untuk kepemimpinan.

Selain WV Academy, ada juga *Circle of Friends* atau *Sobat WVI*. Tujuan mereka adalah membantu WVI dalam menjaring kandidat *board*. Mereka memanfaatkan keahlian, sumber daya dan jaringannya masing-masing.

Demikian pula dengan staf yang sudah menyelesaikan pelayanan di WVI dapat bergabung dengan “WVI Alumni” untuk menjaga persekutuan, kepedulian dan dukungan antar anggota demi berkontribusi bagi pelayanan WVI di Indonesia.

Respons Bencana Bersama HFI

Penderitaan umat manusia berupa kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai bentuk kesengsaraan lainnya masih terus terjadi.

Kondisi ini dinilai sangat bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. WVI bersama mitranya World Vision yang telah 60 tahun bergelut dalam pekerjaan kemanusiaan di Indonesia menyadari tak bisa sendirian dalam menangani persoalan ini. Upaya penanggulangan yang sudah dilaksanakan masih terkendala oleh berbagai hambatan, antara lain kurangnya harmoni dan sinergi antar segenap organisasi kemanusiaan.

Disadari bahwa di samping diperlukan peningkatan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dalam upaya penanggulangan berbagai masalah kemanusiaan tersebut di atas, kini semakin dirasakan perlunya menggalang kerja sama yang lebih erat di antara segenap organisasi kemanusiaan, baik di tingkat internasional, regional, nasional maupun lokal.

Dilandasi kesadaran tersebut, 14 lembaga kemanusiaan berbasis agama, termasuk WVI, menandatangani kesepakatan untuk mendirikan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dengan tujuan kemanusiaan dan bekerja di atas landasan prinsip-prinsip kemanusiaan. Forum ini dideklarasikan di Jakarta pada 16 April 2008 dan bersifat terbuka untuk sesama organisasi kemanusiaan. Para anggota HFI adalah:

1. Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (LPB Muhammadiyah / MDMC).
2. Dompot Dhuafa
3. Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia
4. Yakkum Emergency Unit
5. Wahana Visi Indonesia (WVI)
6. KARINA (Caritas Indonesia)
7. Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
8. PKPU
9. Church World Services Indonesia
10. Habitat for Humanity Indonesia
11. Rebana Indonesia
12. Unit Pengurangan Risiko Bencana Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
13. Rumah Zakat
14. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama.

Lembaga-lembaga yang bergabung dalam HFI menaati kode yang sudah disepakati bersama antara lain, (1) Menjunjung kode etik dasar kemanusiaan (*The Humanitarian Principles*), yang meliputi *Humanity* (Kemanusiaan), *Impartiality* (Ketidakberpihakan), *Neutrality* (Netralitas), *Independency* (Independensi), dan *Transparency* (Keterbukaan); (2) Menjunjung prinsip-prinsip akuntabilitas kemanusiaan yang salah satunya adalah nonproselitisme (tidak menyebarkan

keyakinan/agama) yang berbeda dari keyakinan yang dianut oleh penyintas; dan (3) Tidak menggunakan atribut-atribut keagamaan yang berbeda dari mayoritas keyakinan yang dianut oleh penyintas selama pemberian layanan kemanusiaan.

Kode etik inilah yang menjadi pegangan bagi semua anggota dalam melaksanakan misi kemanusiaannya. Bagi WVI sendiri, bergabung ke dalam HFI membuat gerakan lembaga semakin leluasa. Tidak saja bisa bermitra dengan lembaga lain dalam menyelesaikan program-program kemanusiaan seperti sudah dilakukan di banyak tempat, antara lain dalam respons gempa di Lombok, tetapi juga membuatnya tidak dicurigai melakukan syiar agama seperti dicurigai oleh sementara orang selama ini.

Staf Indonesia di Banyak Negara


Salah satu kunci keberhasilan pelayanan World Vision International di Indonesia adalah mempersiapkan staf lokal dalam berbagai bidang keahlian.

Hasilnya mulai tampak ketika beberapa staf World Vision Indonesia dipercaya menempati posisi-posisi strategis di kantor-kantor World Vision di luar negeri. James L. Tumbuan, setelah menyelesaikan tugasnya memimpin World Vision Indonesia, menjadi direktur nasional World Vision Myanmar. Sementara itu Esther Halim menjadi direktur nasional di Kamboja. Trihadi Saptoadi yang menggantikan James sebagai direktur nasional World Vision Indonesia kemudian menjadi direktur World Vision Laos, lalu World Vision Nepal sebelum menjabat *Global Partnership Leader World Vision Regional South Asia and Pacific*. Eddy Sianipar menjadi staf inti operasional di World Vision Laos. Tri Budiardjo menjadi pemimpin operasional WV Kamboja, Janes Ginting di WV Nepal, Jimmy Nadapdap di Solomon Island, dan kini Doseba T. Sinay CEO & Direktur Nasional WVI 2014-2021 sebagai Direktur Nasional WV Vietnam.

Sejumlah staf World Vision Indonesia dipercaya bekerja di berbagai kantor World Vision di negara lain, seperti di Amerika Serikat, Australia, Pakistan, Timor Leste, Laos dan banyak negara lain. Staf Indonesia juga pernah dan sedang diperbantukan menangani program kemanusiaan di Afghanistan, Iran, Iraq, Azerbaijan, India, Nepal, Sudan, Solomon Islands, Myanmar, Libanon, dan lain sebagainya.

Twin Citizenship





Salah satu dari empat prinsip utama tata kelola organisasi (*governance*) dalam kemitraan dengan lembaga World Vision International adalah *twin citizenship*.

Artinya, baik organisasi nasional maupun *global* memiliki semangat saling menghormati satu sama lain demi kebaikan bersama seluruh anggota kemitraan. Sebab itu, dalam mengambil keputusan baik pada tingkat lokal, nasional maupun *global*, World Vision terkait satu sama lain.

“Contohnya, kalau sebuah lembaga atau produk tertentu tidak dapat diterima menjadi pendonor di Indonesia karena dinilai tidak berpihak pada anak dan melenceng dari visi misi World Vision, maka lembaga atau produk yang sama tidak bisa diterima oleh negara-negara mitra World Vision seperti Vietnam, Amerika atau Kanada atau Australia, sebagai pendonor. Ini demi kebaikan semua anggota kemitraan,” kata Trihadi

Deregistrasi World Vision International di Indonesia

Berakhirnya pelayanan World Vision International di Indonesia telah melalui tahapan-tahapan dan proses yang panjang.

Seperti dituturkan oleh John Nelwan, Country Head of World Vision Indonesia, pada bulan November tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan pemberitahuan mengakhiri Izin Prinsip kepada World Vision International di Indonesia. Pengakhiran Izin Prinsip dilandasi oleh rekomendasi Kemensos RI berdasarkan permohonan deregistrasi oleh World Vision International di Indonesia, saat berakhirnya Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Kemensos RI periode tahun 2015-2018; setelah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mengakhiri pelayanannya di Indonesia.

World Vision International telah mendampingi masyarakat Indonesia dalam program pengentasan kemiskinan sejak tahun 1960. Pada tahun 1980, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Departemen Sosial (waktu itu), secara resmi mengakui keberadaan dan peran World Vision International. Perjanjian kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Agreement* diteken. Melalui kerja sama ini, World Vision telah berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik akibat kemiskinan maupun bencana.

World Vision meyakini bahwa pengentasan kemiskinan merupakan usaha yang sangat kompleks. Dibutuhkan gerakan di tingkat lokal, nasional dan *global* serta kemitraan yang kuat agar upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat berlangsung dengan baik.

Sebab itu, pada tahun 1998 World Vision International di Indonesia mulai melakukan kemitraan dengan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI). Hal ini ditempuh untuk memastikan proses pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dapat berlangsung secara efektif sebab dilakukan oleh lembaga yang hadir di tingkat lokal dan nasional. Para pemimpinnya baik pengurus, pembina, dan pengawas (*board*) maupun pelaksananya adalah para profesional, independen, punya nama baik dan dihormati publik. Mereka cakap di bidangnya dan sangat mengenal konteks di mana WVI melayani. Mereka juga paham dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun lebih dari itu, World Vision dan para pendiri WVI melihat jauh ke depan, yakni diperlukannya sebuah organisasi nasional yang mampu mengambil alih tanggung jawab dan memastikan keberlanjutan program pengembangan yang sudah dilaksanakan selama puluhan tahun. Karena pada akhirnya, sebagai lembaga internasional, World Vision tidak bisa selamanya tinggal di Indonesia. Untuk keperluan ini, World Vision melakukan pendampingan intensif, agar WVI dapat melaksanakan program dengan standar kualitas pekerjaan kemanusiaan (*humanitarian industry*) secara *global*. WVI juga dipastikan untuk secara konsisten mengikuti berbagai aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang tentang yayasan, pembentukan kepengurusan dan lain-lain

Setelah menjalin kemitraan selama lebih dari 20 tahun, World Vision menilai WVI telah berada pada tingkat kematangan *governance* yang tinggi. Kapasitas pemimpin dan manajemen yang mumpuni, ketrampilan teknis operasional yang sangat memadai, sumber daya manusia dan program berkualitas, tingkat akuntabilitas yang tinggi, serta faktor-faktor lain yang merefleksikan kematangan untuk mandiri. World Vision akhirnya memberikan otoritas yang lebih besar kepada WVI untuk melanjutkan pelaksanaan program-program kemanusiaan dan mengelola program pengembangan masyarakat di Indonesia. Termasuk juga mengelola dana bantuan yang berasal dari sumber-sumber internasional.

Pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Sosial RI dan sejumlah lembaga pemerintah lainnya yang tergabung dalam Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA) menilai, pelayanan World Vision telah mencapai hasil yang diharapkan. Proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara intensif dapat memastikan WVI sebagai mitra lokalnya dapat mandiri dan meneruskan program-program yang dikomitmenkan untuk Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan berkunjung ke beberapa lokasi pelayanan World Vision untuk memastikan kesiapan WVI, sekaligus memantau penerimaan masyarakat dan juga pemerintah daerah (Pemda), Pemerintah mendapat kesan positif bahwa WVI sebagai mitra lokal World Vision dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Hal menarik lain dari hasil penilaian pemerintah terhadap pengakhiran dan deregistrasi World Vision International dari Indonesia adalah, World Vision berhasil meyakinkan Pemerintah terhadap aspek akuntabilitas berupa Laporan Pertanggungjawaban Program dan Keuangan. Dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) aset, semua aset yang dimiliki World Vision tidak memiliki kewajiban pajak yang harus diselesaikan, karena aset-aset tersebut dimiliki World Vision tanpa fasilitasi dari Pemerintah RI.

Dengan berakhirnya pelayanan World Vision International di Indonesia atau dikenal dengan istilah deregistrasi, maka proses penerusan/transisi dan pengalihan pelayanan kepada WVI dapat dilakukan dengan baik dan akuntabel. Secara bertahap, dengan pendampingan dan dukungan teknis dan dana, World Vision mempercayakan pelaksanaan program-program pelayanannya untuk dijalankan oleh WVI. Pendampingan intensif dilakukan agar WVI dapat melaksanakan program dengan standar kualitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan yang dijalankan oleh World Vision secara *global* dan mengikuti standar kualitas pekerjaan kemanusiaan (*humanitarian industry*) secara *global*. WVI juga dipastikan untuk secara konsisten mengikuti berbagai aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang tentang yayasan, pembentukan pengurus dan lain-lain.

Sehubungan dengan ini, WVI tetap menggunakan identitas World Vision International, seperti merek, logo, visi, dan pernyataan identitas lainnya, dan menggunakan sistem kerja World Vision dalam segala kegiatannya sebagai wujud empat prinsip utama kemitraan international model federal yang berlaku di World Vision yang terdiri dari *Empowerment*, *Interdependence*, *Twin Citizenship* dan *Accountability*. Dengan demikian WVI bukan hanya memiliki hak suara dan

peran penuh dalam kemitraan World Vision secara *global*, namun juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan penentuan arah strategis dan pengembangan kebijakan World Vision di tingkat *global*.

Meskipun telah menjadi entitas nasional yang mandiri (*interdependence*), WVI harus tetap mengikuti dan menaati secara sungguh-sungguh semua aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga pelaksanaan berbagai program bantuan dapat dijalankan dengan efektif dan bertanggung-jawab bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan. WVI juga wajib meneruskan dan menerapkan visi, misi, nilai dasar dan prinsip-prinsip kemitraan *global* World Vision secara kontekstual di Indonesia. Tetap menerapkan tata-kelola organisasi (*good governance*) sesuai hukum dan perundangan di Indonesia dan prinsip kemitraan World Vision, yang ditandai dengan adanya anggota Badan Pembina dan Pengawas (*board*) yang independen dan berfungsi secara aktif untuk memastikan program-program dilaksanakan secara kontekstual di Indonesia.

Suara Anak di Dunia Internasional

WVI adalah Yayasan Kemanusiaan Kristen dengan pendekatan tanggap darurat, pengembangan masyarakat dan advokasi, yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

WVI mendedikasikan diri untuk bekerja sama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. WVI mengedepankan program pengembangan yang bersifat jangka panjang dengan menggunakan pendekatan pengembangan wilayah berkelanjutan atau Area Program/AP melalui kantor operasional yang berada di wilayah dampingan WVI.

Pada 2018, WVI melakukan pendampingan terhadap 83.876 anak yang tersebar di 61 titik pelayanan di 14 provinsi di Indonesia. Prioritas program WVI bagi anak mencakup empat sektor, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan ekonomi.

Program-program dalam keempat sektor ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pengembangan transformasional, advokasi dan tanggap bencana. Melalui program-programnya, WVI menunjukkan komitmen yang kuat untuk turut mendukung Sustainable Development Goals/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), agenda *global* yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WVI menghubungkan sebagian target dan indikator SDGs ke dalam setiap program. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak, keluarga, dan masyarakat Indonesia.

WVI melalui pendampingannya terhadap anak-anak telah menginisiasi pembentukan 264 Forum Anak di tingkat kabupaten atau kota serta kecamatan dan desa di seluruh wilayah dampingan mereka. Beberapa anggota Forum Anak berhasil menyuarakan keprihatinan mereka di forum internasional. Seperti dilakukan oleh Yudi asal Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa lainnya.

Suara Anak dalam Konferensi Perubahan Iklim dan Hak Anak di Paris

Yudi adalah ketua Forum Anak Sumba Timur (FAST) di bawah asuhan WVI waktu itu.

Pada November 2015, ia mewakili Indonesia di kancah internasional dan berbicara tentang lingkungan dalam Konferensi Perubahan Iklim dan Hak Anak yang diselenggarakan oleh Koalisi Anak untuk Perubahan Iklim di Paris, Perancis, yang diselenggarakan oleh PBB pada 30 November hingga 11 Desember 2015.

Dalam pertemuan tersebut, Yudi membagi suka dan dukanya hidup di Haharu, kawasan paling kering di Sumba Timur. Ia menyampaikan sejumlah dampak dari kekeringan yakni kelaparan, kekurangan air minum, hingga malnutrisi. Dampak lanjutan dari kekeringan yang mereka alami adalah hilangnya waktu belajar bagi anak-anak di kampungnya karena mereka harus jalan kaki berkilo-kilometer jauhnya untuk mencari air bersih dan makanan di hutan, yang lokasinya cukup jauh dari rumah mereka. Dalam forum tersebut Yudi menyerukan harapannya akan dukungan untuk mengurangi kekeringan yang terjadi di desanya.

“Pertama, yang paling penting adalah dukungan dari orang tua atau keluarga. Apa yang mereka ajarkan di rumah dapat mendorong perilaku atau kebiasaan positif anak. Kedua, dukungan dari para guru dalam mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan penghijauan di area sekolahnya. Lalu yang terakhir adalah dukungan dari pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan memberikan ruang bagi anak untuk mengambil bagian dalam proyek penanaman pohon seperti ini,” cetus Yudi terkait kerja dan dukungan WVI yang menjalankan program di Haharu.

WVI pada ADP Sumba Timur memang menginisiasi program INFOCUS pada 2015 untuk menanggulangi kekeringan dan kekurangan pangan pada tujuh desa di Kecamatan Haharu, Sumba Timur. Salah satu program yang dilakukan adalah proyek “*Utang Na Anamu*” atau Hutan untuk Anak. Proyek ini mengajak orang tua dan anak di Sumba Timur, untuk menanam pohon berumur panjang seperti jati dan mahoni sebagai tabungan untuk masa depan mereka. Kelak, ketika pas waktunya, pohon-pohon ini bisa dijual untuk membiayai sekolah anak-anak. Selain itu dalam program yang sama, WVI juga mengajak warga untuk memelihara hutan yang ada (*palotang*) agar pada musim kemarau mereka tak kekurangan air.

Suara Merlin di Colombo

Wakil Indonesia kembali bersuara di kancah internasional. Merlin yang waktu itu adalah seorang siswi SMA Negeri I Maumere, Kabupaten Sikka, terpilih mewakili Indonesia dalam kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama forum anak dampingan World Vision dari berbagai negara se-Asia yang berlangsung di Colombo, Sri Lanka pada Oktober 2017.



Merlin (kedua dari kanan) saat berpartisipasi dalam acara End Violence against Children di Sri Lanka.

Merlin adalah salah satu anak dampingan WVI melalui Forum Anak Desa (FAD) Wolomotong, Kabupaten Sikka, NTT. Ia dinilai paling aktif dalam praktik kampanye lapangan tentang kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi hingga di level nasional tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Merlin telah melewati berbagai tahapan seleksi dan analisa praktik kampanye lapangan oleh WVI hingga akhirnya mewakili Indonesia dan tampil berpidato di hadapan pemimpin-pemimpin PBB, *international non-governmental organization* dan lokal *community-based organization* dalam agenda panel *workshop* di Sri Lanka.

"Sejak masih di bangku SD, Merlin sudah aktif dalam berbagai kegiatan bersama FAD Wolomotong sebagai salah satu kelompok anak yang dibentuk oleh WVI bersama pemerintah desa sejak tahun 2013. Sejak itu, Merlin menjadi anggota forum yang aktif dan selalu tampil cerdas dalam berbagai diskusi. Di Wolomotong, pemerintah desa menyediakan satu ruangan untuk anak-anak di desa. Anggaran pun dialokasikan. Salah satu bentuk kampanye, Merlin dan teman-teman membuat media kampanye. Lewat ruang ini anak-anak desa mampu berkreasi," ungkap Johny Noya, ADP Manager WVI Sikka.

la menerangkan bahwa ketika hendak di-*launching* tingkat Asia Pasifik, daerah dampingan WVI di seluruh Indonesia melakukan penilaian terhadap anak-anak dampingan dalam kaitan praktik-praktik kampanye lapangan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Merlin akhirnya dipilih untuk mewakili anak dampingan WVI di Sri Lanka. Selain sangat aktif dalam kegiatan kampanye, Merlin dinilai layak setelah berhasil menunjukkan kemampuan dan kecerdasan dalam berpidato tanpa teks di hadapan sejumlah pejabat di tingkat Provinsi NTT maupun di tingkat kementerian. Kami melihat Merlin tidak asing untuk tampil di depan umum. Kemampuan *public speaking*-nya sangat bagus,” papar Johny.

Merlin didampingi staf WVI Jakarta, Gracia Thomas selama berada di Sri Lanka. Merlin mempresentasikan kegiatan yang dilakukan di desa dan berkampanye tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta terlibat dalam *Focus Group Discussion* (FGD).

Anak Jakarta di Quito

Alia, siswi kelas IX SMP Jatinegara, Jakarta Timur, mewakili Indonesia dalam Forum Habitat III di Quito, ibu kota Ekuador pada Oktober 2016. Alia dalam forum tersebut menyampaikan pengalamannya sebagai anak yang hidup di perkotaan seperti Jakarta.



Alia dalam acara Forum Children and Youth Assembly di Quito.

Forum *Children and Youth Assembly* di Quito adalah acara 20 tahunan yang digagas oleh UNHABITAT, yakni badan PBB yang berfokus pada pembangunan perkotaan jangka panjang dalam forum antar generasi dan antar pemangku kepentingan. Forum ini bertujuan menyediakan *platform* bagi kaum muda untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, menunjukkan solusi dan inisiatif, dan mengembangkan kemitraan untuk membuat kota menjadi pemukiman bagi manusia yang lebih aman, adil, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Acara ini bertujuan mengubah persepsi tentang peran anak muda dalam membentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, serta menggali peluang bagi mereka untuk berperan dalam pelaksanaan, tindak lanjut dan peninjauan Agenda Perkotaan Baru.

Forum dibagi dua bagian yakni, peserta anak (di bawah 16 tahun) dan pemuda serta pemangku kepentingan lainnya. "Bagian Anak-Anak" berfokus pada masalah dan solusi perkotaan yang berdampak pada anak-anak perkotaan. Mereka melakukan pentas seni dan desain, teknologi dan debat.

Pada bagian "Pemuda dan Pemangku Kepentingan Lainnya" dibagi menjadi tiga kelompok: "Sains, Teknologi dan Inovasi", "Anak-anak dan Pemuda dalam Agenda Perkotaan Baru", dan "Arus Pemangku Kepentingan" yang memungkinkan beragam aktivis pemuda, pemuda ilmuwan dan pakar perkotaan untuk membangun jaringan, bertukar ide dan mengembangkan kemitraan menuju implementasi Kota Layak Anak.

"Saya menekankan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan kota. Selama ini saya belum melihat bahwa anak dilibatkan dalam diskusi masyarakat, karena kami dianggap belum mengerti. Padahal kami adalah bagian dari masyarakat. Kami ingin diberi ruang untuk berpendapat dan berkreasikan. Dengan begitu kami akan disibukkan dengan berbagai kegiatan positif dan tidak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang merugikan," kata Alia.

Rekomendasi utama dan hasil dari acara ini adalah dilahirkannya "Piagam Anak" dan "Komitmen Pemuda Quito," untuk dibagikan pada Konferensi Habitat III.

Suara Anak dalam Pandemi Covid-19

Roslinda (Oslin), yang kini berusia 16 tahun, dari Kabupaten Sumba Timur, NTT, ketika masih duduk sebagai siswi SMP, telah mewakili Indonesia untuk berbicara dalam rangkaian kegiatan *High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development* di New York, Amerika, 9-18 Juli 2019. Oslin ketika itu membawa berbagai komitmen dan rencananya bagi anak-anak di Sumba Timur.



Oslin saat berbicara dalam acara *High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development* di New York.

Pada forum internasional tersebut, Oslin secara khusus berbicara tentang penghapusan kekerasan terhadap anak. Dirinya turut menceritakan pengalaman dan keterlibatannya dalam melakukan advokasi perlindungan anak di wilayahnya. Meskipun berasal dari desa yang kecil dengan segala keterbatasan fasilitas dan akses, tidak membuat Oslin berdiam diri saat kekerasan anak kerap terjadi di desanya. Komitmen Oslin diwujudkan dengan terlibat aktif dalam menyelesaikan isu tersebut, yakni dengan terlibat di Forum Anak Kombapari dampingan WVI sejak tahun 2016 dan menjadi ketua sejak tahun 2018.

“Saya bersemangat untuk memperjuangkan hak anak, terutama hak untuk perlindungan dan pendidikan. Saya membayangkan setiap anak di desa dan negara saya terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” ujar Oslin.

Melalui upaya advokasi Forum Anak Kombapari perubahan telah terjadi. Kini pemerintah dan masyarakat Kombapari memiliki komitmen untuk menjadi Desa Layak Anak dan telah memastikan 100 persen anak di wilayah tersebut memiliki Akta Lahir. Selain itu, anak-anak Forum Anak Kombapari telah dilibatkan dalam Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa) dan berkontribusi mengupayakan tersedianya dana desa sejumlah Rp60 juta guna mewujudkan kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak, diterbitkannya peraturan desa perlindungan anak untuk mencegah pernikahan dini dan kewajiban kepemilikan akta lahir.

“Karena setiap anak layak mendapatkan perlindungan dan dilindungi dari setiap kekerasan,” kata Oslin.

Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberi Oslin piagam penghargaan yang diterimanya pada peringatan Hari Anak Nasional yang berlangsung di Makassar pada 23 Juli 2019. Piagam tersebut diberikan sebagai wujud penghargaan pemerintah terkait upaya yang telah dilakukan Oslin dalam memperjuangkan hak sipil anak dan akta kelahiran di wilayahnya. Pada Oktober 2020, Oslin kembali bersuara dalam forum PBB. World Vision International yang menjadi mitra WVI mengundang perwakilan PBB untuk



Oslin (berdiri, ketiga dari kanan) dalam acara High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development.

mendengarkan suara anak dari hasil penilaian cepat “*Unmasking the Impact of COVID-19 on Asia’s Most Vulnerable Children*” yang dilakukan di sembilan negara Asia Pasifik. Roslinda kini menetap di Waingapu, ibukota Kabupaten Sumba Timur untuk melanjutkan studinya ke tingkat SMA.

Oslin menyampaikan rangkuman keluhan teman-temannya saat menjalankan aktivitas belajar selama masa pandemi COVID-19.

“Kami sedih karena gara-gara pandemi kami tidak bisa bertemu teman-teman. Setelah belajar di rumah, kalau menemui hal sulit tidak bisa langsung bertanya pada guru seperti kalau di sekolah. Bagi anak-anak yang pendidikan orang tuanya minim, maka akan semakin kesulitan,” ujar Roslinda.

Menurut dia, masih banyak temannya yang belum mempunyai ponsel cerdas (*smartphone*). Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian orang tua mereka yang tidak berkecukupan akibat pandemi. Juga soal jaringan internet yang tidak ada di semua desa. Ada pula temannya yang tidak memahami bahan yang disampaikan saat *live meeting* lewat *Zoom*. Atau tiba-tiba jaringan internet putus di tengah proses belajar.



“Kalau untuk belajar dari rumah (BdR) itu kalau anak-anak kota mereka pakai *online*, tapi kalau yang saya tanyakan ke adik saya di desa, katanya seminggu bisa satu atau dua kali mereka ke sekolah,” terang Oslin.

Anak-anak ke sekolah untuk mengambil tugas dari guru yang akan mereka kerjakan di rumah, sebelum pada minggu berikutnya dikumpulkan kembali ke sekolah untuk mendapatkan penilaian.

“Tugasnya semua diambil untuk seminggu, dikerjakan di rumah, hari Senin berikutnya diantar ke sekolah lalu mengambil tugas baru,” lanjut Oslin.

Oslin juga bercerita tentang sulitnya akses air bersih, karena harus menempuh jarak cukup jauh yaitu satu hingga dua kilometer. Rata-rata yang mengambil air adalah anak-anak. Sementara itu jika membeli air harga satu tangkinya adalah Rp50.000.

Selain Oslin, anak lain yang mendapat kesempatan menyampaikan aspirasinya adalah Krish (14) asal India. Oslin bercerita, Krish menuturkan kondisi anak-anak di India seperti orang tua yang ekonominya menurun, makan yang dibatasi dari biasanya bisa tiga sampai empat kali sehari menjadi hanya dua kali sehari, dan harus bekerja membantu orang tuanya.

Sementara itu, Tira Malino, Analis Kebijakan Publik WVI menerangkan, ada eksploitasi seksual dan perdagangan anak di “Negeri Bollywood” menurut keterangan Krish tapi ia tidak menjelaskan lebih detail.

“Anak-anak dari kelompok miskin tidak bisa akses *online*. Kalau dibilang hampir sama sih di Indonesia,” ungkap Tira melalui konferensi video yang turut dihadiri Oslin.

Disebutkan pula tingkat migrasi yang sangat tinggi di India, sama seperti meningkatnya jumlah pemudik di awal pandemi COVID-19 Indonesia.

Oslin yang mengutip perkataan Krish berujar, “Rata-rata perubahannya sama, masalah ekonomi, terus juga belajar *online*. Tapi kalau belajar *online* dia tidak menjelaskan secara spesifik. Menurut saya semua negara terdampak akibat COVID-19 ini dan semua negara memiliki permasalahan yang serupa,” lanjutnya.

Namun Oslin bersyukur karena pemerintah Indonesia memberikan bantuan yang menurutnya cukup menunjang sistem belajar *online*. Contohnya dari pemerintah ada bantuan kuota belajar, dan dari sekolah ada pembagian kartu perdana Telkomsel bagi yang sangat membutuhkan.

“Kalau menurut saya sudah cukup, kalau memang untuk benar-benar belajar pasti cukup,” kata Oslin, anak keempat di keluarganya. Ayahnya adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu sekolah dasar, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa.

Sementara itu Tira menerangkan, “Permasalahan yang dialami Indonesia hampir sama dengan negara-negara lain.” Itu terlihat dari hasil penilaian cepat World Vision Asia yang menunjukkan ada dua bagian dengan dampak pandemi sangat terlihat pada anak, yaitu *livelihood* dan *education*. *Education* adalah perubahan pola belajar dari sekolah tatap muka ke *online*, sedangkan dari sisi *livelihood* adalah kesulitan keluarga meraih pendapatan.”

Hasil survei menyebutkan, 61 persen responden menyatakan mata pencahariannya terdampak. Sebanyak 52 persen rumah tangga mengonsumsi makanan dengan gizi kurang, 32 persen keluarga kehilangan asetnya, dan 27 persen sulit mengakses pelayanan medis dasar.

Dari sisi perlindungan anak, 24 persen orang tua/pengasuh terpaksa memberlakukan hukuman fisik atau kekerasan emosional, 26 persen anak mengonfirmasi pengasuh berlakukan kekerasan fisik dan psikologis sebulan terakhir. Sebanyak 47 persen orang tua/pengasuh kesulitan menghadapi perubahan perilaku anak mereka, 18 persen rumah tangga mengalami stres, dan 5 persen mengalami gangguan kesehatan mental.

Menurut Oslin, banyak hal yang ia pelajari dari partisipasi keduanya di forum internasional. Ia bisa belajar bahwa di negara lain juga mengalami dampak pandemi COVID-19 yang sama, tidak hanya di Indonesia saja.

Kampanye Anti Kekerasan Lewat Film

WVI berkomitmen melaksanakan Kampanye PKTA untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Indonesia antara lain melalui peluncuran enam film pendek dengan tema penghapusan kekerasan terhadap anak pada awal Desember 2018.



Anak-anak Jakarta berpartisipasi dalam proses pembuatan film di salah satu lokasi syuting.

Dalam bimbingan penuh Junito Drias, juru kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak waktu itu dan dukungan serius dari Asih Silawati, Area Manager Urban Jakarta, film dibuat dengan konsep dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Tema yang diambil dekat dengan keseharian mereka seperti perkawinan anak, perundungan, disabilitas dan kekerasan seksual online. Enam film tersebut dikerjakan oleh anak-anak yang berada di wilayah Jatinegara, Kamal Muara dan Penjaringan, Jakarta Utara. Melalui enam film ini WVI ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan menghentikan kekerasan terhadap anak.

Deviana, konseptor film, dan teman-temannya melakukan kampung roadshow dengan konsep nonton bareng dari kampung ke kampung di beberapa wilayah di Jakarta, menasar warga dan pemerintah setempat sebagai pesertanya. Melalui film tersebut WVI dan anak-anak yang terlibat di dalamnya ingin menyuarakan dan mengajak setiap pihak untuk berkontribusi bagi penghapusan kekerasan terhadap anak.

“Enam film pendek ini merupakan karya anak, ditulis oleh anak, diproduksi oleh anak. Tema-tema kekerasan terhadap anak yang menjadi tema film kami ambil karena hal tersebut merupakan fenomena yang sering terjadi di sekitar kami dan dialami oleh rekan-rekan sebaya kami,” kata Deviana.

Setelah *roadshow* di Jakarta, enam film pendek ini diikutkan ke dalam festival internasional Campus Party di Singapura.

Berpartisipasi Pada Level Internasional

The 7th UCLG ASPAC Congress

Secara internasional, WVI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berbagi dalam kongres ke-7 *United Cities and Local Government in Asia Pacific* (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya pada September 2018.



Salah satu sesi dalam UCLG ASPAC di Surabaya yang digagas WVI.

Seribu orang peserta dari wilayah Asia Pasifik dari berbagai latar belakang (pemerintah, sektor privat, universitas, lembaga sosial masyarakat, dan lembaga regional/ internasional) ikut serta di dalamnya. WVI bersama KPPPA dan UNICEF mengambil kesempatan dalam kongres ini untuk berbagi tentang komitmen pemerintah secara Internasional untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan *World Fit for Children* (Dunia yang Layak bagi Anak), dengan penekanan pada Kebijakan dan Anggaran untuk mendukung Kabupaten/ Kota Layak Anak. Kabupaten Jayapura, salah satu wilayah dampingan WVI bercerita tentang pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di sana, bersama dengan pemerintah dari Negara Kiribati dan Myanmar.



WVI berbagi praktik baik akuntabilitas sosial di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dalam IMF/ WB Annual Meeting di Nusa Dua Bali - 2018.

IMF/ World Bank Annual Meeting & The 4th High Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing

WVI juga ambil bagian dalam International Monetary Fund/ World Bank Annual Meeting dan The 4th High Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing atau HLM4 on CKS di Nusa Dua, Bali pada Oktober 2018.

Forum ini bertujuan menyediakan *platform* bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan mitra pembangunan untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan, terutama solusi dan inovasi lokal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan.

Wadah itu menjadi tempat bagi seluruh pemangku kepentingan bekerja sama mengatasi tantangan pembangunan melalui kerangka berbagi pengetahuan. Sebagai catatan, Kementerian PPN/Bappenas bersama World Bank menyelenggarakan HLM4 on CKS dengan mengangkat tema *Local Innovation as Driver Global Development*. Kegiatan tersebut didukung oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Tim Koordinasi Nasional Kerja sama Selatan-Selatan, Islamic Development Bank (IsDB), Kerja sama Jerman, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan USAID.

Dalam kedua forum ini, WVI berbagi praktik baik akuntabilitas sosial di bidang pelayanan kesehatan masyarakat untuk penguatan implementasi Open Government melalui South-South and Triangular Cooperation.

Open Government Partnership Summit

WVI mendapatkan kepercayaan dari World Bank untuk menjalankan sebuah proyek percontohan tentang Akuntabilitas Sosial untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Proyek percontohan ini dilaksanakan di NTT, mencakup 60 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, dan Sikka. Menggunakan pendekatan Suara dan Aksi Warga (*Citizen Voice and Action*) dari World Vision, proyek berdurasi empat tahun ini (2014-2018) di bawah koordinasi Andreas Sihotang, memberikan hasil evaluasi yang baik, berupa kontribusi dalam perubahan kekuasaan (*power*) dan hubungan (*relationship*) yang memicu sistem akuntabilitas sosial dan mengaktifasi para pemangku kepentingan untuk mengambil aksi mengatasi kesenjangan dan meningkatkan standar pelayanan. Praktik baik ini membawa WVI untuk berbagi cerita, bukan hanya di tingkat lokal dan nasional, tapi juga di tingkat internasional, melalui OGP Summit.

Pada Juli 2018 WVI ikut ambil bagian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OGP di Tbilisi, Georgia. Lebih dari 2.200 peserta dari 115 negara yang terdiri atas pejabat pemerintah, anggota masyarakat sipil, perwakilan lembaga multilateral, sektor swasta dan akademisi ambil bagian. KTT *Global OGP* ini berfokus pada keterlibatan sipil, pemberantasan korupsi dan penyampaian layanan publik. Dalam kesempatan ini, WVI bersama Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bapak Slamet Soedarsono, berbagi praktik baik kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung akuntabilitas sosial dalam pembangunan.

Pada Mei 2019, WVI kembali ambil bagian dalam KTT OGP di Ottawa, Kanada. Dalam KTT ini bertemu 79 negara anggota termasuk Indonesia, dan ribuan kelompok NGO, organisasi multilateral dan akademisi. Dalam KTT ini peserta berbagi pengetahuan dan bersama-sama menciptakan solusi bagi pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan di seluruh dunia.



WVI berbagi praktik baik dalam acara OGP di Tbilisi, Georgia.

Pengasuhan dengan Cinta

Pandemi COVID-19 membawa perubahan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Masyarakat dihadapkan pada kebiasaan baru yang berbeda dengan saat normal.



Salah satu kegiatan sosialisasi Pengasuhan Dengan Cinta di Bengkayang, Kalimantan Barat.

Selain itu, pengasuhan pun menjadi hal penting mengingat anak-anak dan orang tua lebih banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Namun, permasalahan juga muncul dengan adanya kebiasaan baru tersebut. Masih banyak warga yang belum memahami tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Orang tua pun kebingungan dengan cara mengasuh anak mereka di tengah pandemi.

Berhadapan dengan situasi ini, WVI mengadakan pelatihan “Pengasuhan dengan Cinta” (PDC) dalam konteks pandemi COVID-19 kepada para tokoh agama. Salah satu tokoh agama yang terlibat dalam pelatihan tersebut adalah Ham (41), seorang Imam di Mesjid Al-Taqwa, Kampung Nanga Agur, Desa Meragun, Kabupaten Sekadau.

“Saya diminta oleh Kepala Desa untuk ikut serta dalam pelatihan Pengasuhan dengan Cinta. Pada awalnya saya bingung mengapa WVI berkegiatan dengan tokoh agama karena setahu saya WVI lebih banyak berkegiatan dengan anak-anak secara langsung dan juga mendorong warga memiliki jamban sehat di kampung,” kata Ham ketika diminta mengikuti kegiatan pelatihan ini.

Meski begitu, kebingungan itu tidak menyurutkan niat Ham untuk terlibat dalam Pelatihan PDC. Ham bahkan belajar tentang hal-hal baru seperti bahasa kasih serta berbagai informasi dasar terkait COVID-19.

Setelah mendapatkan pelatihan, Ham kemudian melakukan sosialisasi tentang informasi dasar COVID-19 kepada umat di Masjid Al-Taqwa.

“Saya melakukan sosialisasi tentang COVID-19 setelah jumatatan. Sekarang masyarakat lebih paham tentang COVID-19. Mereka sudah tidak lagi berkerumun dan lebih disiplin menggunakan masker. Orang tua juga sering mengingatkan anak-anaknya untuk menggunakan masker dan *face shield* ketika ke sekolah,” ungkapnya.

Menurutnya, Pelatihan PDC juga membawa dampak bagi keluarga dan dirinya. Katanya, “Saya dan istri lebih bisa menahan diri ketika mengasuh anak. Kami tidak lagi marah-marah dengan anak kami. Kami jadi lebih sabar. Pengasuhan yang baik itu kami coba mulai dari keluarga kami sendiri dulu.”

Ham, yang dahulu adalah hanya seorang Bilal yang bertugas membersihkan masjid, telah dipercaya masyarakat untuk menjadi seorang imam (pemimpin umat) pada 2020 lalu. Pelatihan yang diikutinya bersama WVI merupakan pelatihan pertama. Pelatihan ini menjadi tanggung jawabnya untuk kembali membagikannya kepada masyarakat dan umat yang telah percaya padanya.

“Walaupun latar belakang saya seperti itu, saya bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah diberikan. Saya senang bisa mendapatkan pengetahuan lebih dan membagikannya kepada umat saya,” pungkas Ham.

Herdawati, ibu rumah tangga dengan dua orang anak laki-laki berusia 15 tahun dan 10 tahun. Ia juga kader WVI di Kelurahan baru, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sebelum menjadi kader, Herdawati sering mengikuti program-program dari WVI. Sering terlibat dalam program WVI itulah yang membuatnya tertarik dan diberikan kesempatan untuk menjadi relawan dalam Forum Anak.

“Saya bahkan kerap mendampingi para wakil anak WVI. Program ini sangat membantu anak-anak di lingkungan saya dalam segi kesehatan, perlindungan, dan pendidikan anak,” kata dia.

Terlibat dalam Forum Anak membuatnya semakin bersemangat menjadi relawan bersama WVI. Ia dapat mendampingi anak-anak agar mereka bisa mendapatkan perhatian langsung terutama dalam hal memenuhi hak-hak anak.

Sebagai kader ia merasa diberi peran dalam hal ini, yakni merangkul dan mengayomi orang tua dalam segi ilmu, informasi dan pendidikan, terlebih khusus dalam hal memenuhi 5 Hak Anak.

“*Alhamdulillah*, melalui pelatihan materi tentang hak anak, PDC, sponsor forum anak dan KBA (Kelompok Belajar Anak), sangat membantu saya dalam menjalankan peran sebagai kader serta fasilitator yang baik dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Peran sebagai seorang ibu, tokoh masyarakat dan kader ini juga membuat saya percaya diri untuk mengimplementasikan di lingkungan keluarga dan masyarakat,” kata Herdawati.

Herdawati menilai, program kegiatan KBA yang dilakukan WVI bersama masyarakat, sangat membantu ibu-ibu untuk memberikan dukungan kepada anak mereka. Anak-anak bisa mengekspresikan diri dan bisa bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Rasa percaya diri anak pun semakin kuat.

“Ketika melihat senyum bahagia dan wajah ceria anak-anak membuat kami sebagai kader lebih bersemangat. Ini juga menjadi kekuatan bagi saya dan teman relawan lainnya. Kami juga mendapatkan dukungan dari para sponsor. Bagi saya, WVI sudah banyak membantu para kader dalam hal pengetahuan. Kami juga mengaplikasikannya secara pribadi di lingkungan keluarga kami, begitu juga di lingkungan masyarakat, sehingga pada akhirnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat terpenuhi dengan baik,” kata dia.

Sementara itu WVI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelar *workshop* dukungan psikososial tokoh Agama Islam untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

“Untuk meningkatkan kapasitas tokoh agama Islam dalam memberikan pendampingan psikososial kepada keluarga atau masyarakat untuk pengurangan resiko bencana,” kata Radika Pinto, General Manager WVI Zonal Sulawesi dan Maluku Utara.

Peran tokoh agama Islam sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan yang membangkitkan semangat dan harapan kepada masyarakat dan para penyintas bencana.

Dalam situasi darurat bencana, secara psikologis penyintas mengalami depresi dan stres. Apalagi mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi, harta benda, tempat tinggal dan pekerjaan. Penyintas bencana bisa mengalami trauma.

Karena itu WVI mengambil langkah pemulihan mental penyintas. Salah satunya dengan penguatan dari para tokoh agama Islam.

“Pendekatan berbasis agama efektif untuk membangkitkan kembali harapan penyintas bencana,” ungkap Radika.



Acara Evaluasi dan Pembelajaran Fasilitator Pengasuhan Anak dalam Konteks Islam, kerja sama WVI dan MUI Palu.

Wakil Ketua Umum MUI Kota Palu, Sagir M. Amin mengemukakan peningkatan kapasitas tokoh agama dalam memberikan dukungan psikososial pengurangan risiko bencana, merupakan salah satu bentuk komitmen kemanusiaan bersama dengan WVI.

“Ini untuk umat, mencerdaskan umat juga menjadi tanggung jawab tokoh agama,” katanya.

Sementara Ketua MUI Kota Palu, Prof Dr KH Zainal Abidin, MAg menyebut MUI Palu tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan lembaga apapun yang diakui oleh negara atau pemerintah. “Apa yang dilakukan oleh MUI bersama dengan WVI adalah tindakan kemanusiaan, tanpa melihat latar belakang apapun,” tegas dia.

MUI bersama WVI, menurut dia, pernah melaksanakan kegiatan mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks agama. “Ini bukan kegiatan pertama yang kami lakukan bersama WVI. Sebelumnya sudah ada kegiatan berbasis gender dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta kaum rentan dalam perspektif agama,” terang dia.

Tripina Sri Rahayu, seorang ibu rumah tangga asal Desa Jaya Mentari, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tampak riang mendapatkan materi pelatihan tentang Pelatihan Dasar *Sponsorship* yang diadakan oleh WVI.

“Hal baru yang saya dapat adalah tentang pengasuhan anak di zaman milenial. Ternyata pengasuhan anak berbeda dari setiap masa. Tiap generasi memiliki pola asuh yang berbeda, termasuk generasi milenial yang kini memiliki pola asuh yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya,” ungkap Tripina.

Menurutnya, zaman dahulu orang tua cenderung mendikte anak dalam menentukan masa depan. Tetapi sekarang anak-anak yang memilih untuk diri mereka sendiri.

Gaya hidup generasi milenial sangat dipengaruhi internet. Makanan, pakaian, informasi dan bagaimana menghabiskan waktu, mereka rujuk dari internet. Itulah yang membuat Tripina senang mengikuti pelatihan di atas. Ia mendapatkan wawasan baru yakni pola pengasuhan yang tepat bagi anak-anaknya.

Megawati merasakan kesenangan serupa. Tak hanya mendapatkan Pelatihan Dasar *Sponsorship*, Megawati juga mendapatkan informasi terkait cara melakukan pola pengasuhan dengan cinta kepada anak.

“Pelatihan ini sangat membantu orang tua mengasuh anak-anak sesuai kebutuhan anak dan perkembangannya yang lebih baik lagi,” kata Megawati.

Menurut Megawati, orang tua sering memaksakan kehendak mereka. Anak-anak menurut, namun dengan terpaksa. Komunikasi yang hanya searah ini akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Tripina dan Megawati berharap dengan pelatihan oleh WVI ini, banyak orang tua bisa mengerti cara berkomunikasi efektif dengan anak.

“Orang tua juga bisa mendapatkan informasi pola pengasuhan yang tepat,” ujarnya.



Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat mendeklarasikan diri menuju Kecamatan Layak Anak. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kecamatan Sajingan Besar merupakan kecamatan yang didampingi WVI di Kabupaten Sambas.



Proses deklarasi
Sajingan Besar sebagai
Kecamatan Layak Anak.

“Kecamatan Layak Anak menjadi simbol kebangkitan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan. Juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan lingkungan tumbuh kembang yang baik bagi anak,” kata Area Program Manager WVI Kabupaten Sambas, Ignatius Anggoro.

Sajingan Besar adalah kecamatan perbatasan pertama (dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas) yang melakukan deklarasi Kecamatan Layak Anak dengan seluruh desanya sudah mendeklarasikan Desa Layak Anak (DLA) dan memiliki Forum Anak Kecamatan. Deklarasi ini berarti pemerintah kecamatan mulai memperhatikan indikator-indikator layak anak. Pemerintah semakin berkomitmen melakukan pembangunan yang berlandaskan kepentingan terbaik dan berorientasi pada kebutuhan anak.

“WVI akan terus mendukung program pemerintah, khususnya untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak,” kata Anggoro.

Supardi, Camat Sajingan Besar, menyambut baik telah dideklarasikannya Kecamatan Layak Anak di Sajingan Besar. “Semua kepala desa sudah menyetujui untuk menganggarkan APBDes demi mendukung Kecamatan Layak Anak itu,” kata dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya, menyampaikan, di Kabupaten Sambas kasus yang mendominasi adalah kekerasan pada anak. Padahal, hak anak yang mendasar, kata Hendy, adalah hak hidup dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Harapan kami, Kabupaten Sambas menjadi pelopor kabupaten layak anak. Hari ini dengan deklarasi Kecamatan Sajingan, semoga menjadi stimulus untuk diterbitkannya perda perlindungan anak. Desa menjadi jadi DLA, kecamatannya menjadi kecamatan layak anak dan kabupatennya menjadi Kota Layak Anak (KLA), sehingga dengan dicanangkannya kecamatan layak anak, harapan kami, hak anak menjadi terlindungi,” ujar Hendy.

Herlina (16), mewakili Forum Anak Sajingan Besar, mengatakan, berbagai permasalahan anak yang masih terjadi di wilayahnya antara lain kekerasan fisik pada anak, perundungan, hingga putus sekolah. “Kekerasan pada anak harus dihapuskan. Anak-anak masih memerlukan cinta dan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya,” katanya.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, menyatakan, anak adalah investasi suatu daerah, karena seperti apa Indonesia 10 hingga 20 tahun mendatang, sangat ditentukan oleh seperti apa anak-anak sekarang.

“Sebagai orang tua, kita harus betul-betul menjaga dan menyayangi anak. Jangan hadirkan kekerasan di tengah-tengah mereka,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin menyatakan akan mendorong penerbitan Perda Kabupaten Layak Anak.

“Mudah-mudahan tidak ada hambatan untuk menyusun Perda ini. Kami akan pastikan Perda Kabupaten Layak Anak dapat diselesaikan di tahun 2020,” kata Ferdinan.

Terjadinya kekerasan pada anak oleh orang tuanya mengingatkan pentingnya kesehatan jiwa bagi keluarga di masa pandemi.

Untuk itu, dukungan dari semua pihak, dimulai dari lingkaran terdekat, dibutuhkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Polisi mengungkap kasus meninggalnya seorang anak berusia 8 tahun akibat dianiaya oleh ibunya di Kota Tangerang. Ibunya melakukan hal itu karena anaknya sulit memahami pelajaran ketika belajar secara daring.

Faith and Development Manager WVI Anil Dawan mengatakan, kekerasan kepada anak dalam masa pandemi sebenarnya mengonfirmasi temuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa lebih dari 90 persen keluarga mengalami stres.

Kesehatan jiwa dalam masa pandemi seolah luput dari perhatian dan intervensi bantuan dan dukungan psikososial. Keluarga terutama orang tua dan anak-anak perlu mendapatkan dukungan dalam prinsip lingkaran ekologi seperti lembaga masyarakat, lembaga agama, dan semua pemangku kebijakan.

“Penggunaan bahasa cinta adalah keterampilan yang perlu dipahami orang tua sehingga mampu membangun komunikasi yang baik di tengah keluarga. Mengembangkan resiliensi yang dibangun dari nilai-nilai luhur iman dan agama perlu terus dihidupkan karena bisa mencegah perilaku kekerasan,” ujar Anil.

Selain itu, saluran konseling atau curhat online perlu dimaksimalkan sehingga orang tua punya teman belajar dan sahabat berbagi sehingga tak merasa sendiri dalam mengasuh anak-anaknya. Pemimpin agama dan para psikolog-psikolog perlu dilibatkan dalam upaya-upaya intervensi ini.

Psikolog dari Universitas Soegijapranata Semarang yang juga *partner* WVI, Kuriake Kharismawan, mengatakan, banyak orang tua tidak bisa mengelola emosi karena dikuasai oleh rasa takut.

“Rasanya ini yang jadi masalah para orang tua saat ini. Takut apa kata orang, takut pada keluarga besar kalau anak tidak pintar, takut akan masa depan anak, hingga takut tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pandemi. Hal ini kemudian diekspresikan tanpa mengontrol diri,” kata Kuriake.

Ketika orang tua tidak bisa mengelola rasa takut, yang akan muncul kemudian adalah penyesalan. Oleh karena itu, orang tua sedapat mungkin bisa mengukur kapan dirinya mulai merasa cemas dan takut, ingin marah. Orang tua harus mundur sejenak, menarik nafas dan menenangkan diri untuk mengendalikan emosi. “Terkadang, apa yang ditakutkan itu sesuatu yang tidak realistis. Misalnya, takut akan masa depan anak hancur jika nilainya jelek. Padahal, anak tinggal kelas pun belum tentu masa depannya hancur,” kata Kuriake.

Oleh karena itu, orang tua tidak perlu memaksakan diri atau anak, jika tidak dapat memenuhi sebuah kriteria tertentu, terutama di masa pandemi ini di saat segala aktivitas serba terbatas. Orang tua pun perlu memilah hal apa saja yang menjadi prioritas dan hal apa yang dapat dilepas atau diikhhlaskan. Misalnya, dengan mencermati pelajaran anak, orang tua tidak perlu memaksakan anak harus mendapat nilai sempurna di semua pelajaran. Hal ini akan membuat beban orang tua sedikit berkurang.

Selain itu, dukungan komunitas juga penting, terutama bagi orang tua yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, komunitas terdekat harus ikut peka dan memerhatikan siapa saja yang mungkin tengah mengalami kesulitan, dan segera menolong. Hal ini penting agar orang tua yang kesulitan tidak lagi mengalami ketakutan.

WVI telah meluncurkan buku saku berisi panduan psikososial untuk guru dan orang tua yang dapat diunduh di laman <https://www.wahanavisi.org/id/media-materi/publikasi.html>.

Akuntabilitas



Akuntabilitas tak hanya bicara tentang pemberian laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Juga bukan sekadar menaati dan mengacu pada laporan, hukum dan kebijakan nasional. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas pada lembaga kemanusiaan seperti WVI, wajib memasukkan aspek-aspek lain seperti keterlibatan penerima manfaat, kecepatan pendistribusian, ketepatan menentukan penerima manfaat, maupun manfaat dari bantuan yang disalurkan.

Akuntabilitas juga, terkait dengan kemampuan merespons permasalahan baru yang muncul berkaitan dengan pengelolaan bantuan yang diberikan. Artinya akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada lembaga donor atau para donatur, tetapi juga kepada masyarakat umum dan penerima manfaat.

“Masih banyak orang memahami akuntabilitas hanya sebatas pelaporan keuangan saja. Padahal akuntabilitas sangat luas jangkauannya, menyangkut komitmen atas keseluruhan gerak laku dan pemenuhan janji, keberpihakan dan pertanggungjawaban sebuah lembaga,” kata Ruddy Koesnadi, Akuntan Publik dan ketua *board* WVI periode 2015-2019.

Dengan demikian, masyarakat umum dan penerima manfaat program bantuan dan pengembangan harus dilibatkan dalam semua proses, sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Mereka dimintai respons atau umpan balik kepada lembaga pengelola dana dalam menjalankan program di masyarakat.

Nilai Dasar WVI

Akuntabilitas dan transparansi sangat melekat pada diri WVI. Kedua hal ini adalah nilai dasar yang diyakini.

Semua unsur akuntabilitas dan transparansi yang disebutkan di atas telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan program lembaga ini, sekurangnya selama 60 tahun berkarya di Indonesia. Kedua prinsip ini, dilengkapi dengan prinsip independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran & kesetaraan yang juga diterapkan oleh WVI, merupakan cerminan dari penerapan *good governance* di WVI.

Saat ini lebih dari 9.000 sponsor (di Indonesia) dan ribuan lainnya dari luar Indonesia menyalurkan dukungan mereka melalui WVI untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Cara mempertanggungjawabkan dukungan tersebut adalah, WVI melakukan audit reguler oleh auditor internal ataupun eksternal. WVI juga mengirimkan Laporan Tahunan kepada semua sponsor sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dan World Vision International, serta audit oleh firma audit seperti Ernst and Young, Price Waterhouse, Parker Randall, dan Grant Thornton menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan dan program yang tinggi dan memenuhi standar internasional.

Karena, menurut Ruddy, World Vision International yang menjadi mitra WVI memiliki struktur dan tata kelola (*governance*) yang sangat rapi dan profesional. Maka wajar jika WVI memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Sebagai akuntan publik dengan pengalaman lebih dari 45 tahun melakukan evaluasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, Ruddy menilai WVI telah dikelola layaknya perusahaan-perusahaan multinasional dengan berbagai aturan dan tata kelola yang ketat. WVI menurutnya telah dikelola secara profesional.

“Apa yang dimiliki World Vision dan WVI tidak kalah dengan perusahaan publik berskala besar. WVI ini bukan organisasi yang kecil. Jumlah dana yang dikelola setiap tahun cukup besar,” kata Ruddy.

Sebagai ilustrasi soal dana, untuk respons bencana Palu 2018, WVI mengelola dana tak kurang dari Rp38 miliar. Sementara kita ketahui, bencana terjadi secara beruntun di banyak daerah, dan WVI terlibat penuh di Lombok, Jawa Barat, NTT, Jakarta, Padang dan berbagai tempat lain yang dilanda bencana. WVI turun melakukan respons bencana. Kita belum menghitung jumlah dana untuk program-program pendampingan pada 58 Area Program di seluruh Indonesia.

Kepercayaan Publik

Banyak NGO datang dan pergi, bertumbuh dan mati. Namun World Vision dan mitranya WVI di Indonesia masih tetap bertahan hingga hari ini.

World Vision telah 60 tahun berkarya di Indonesia dan pada 100 negara lainnya di dunia. Menurut Ruddy, WVI bisa tetap bertahan sejauh ini karena publik memercayainya.

“Ada *trust*. Dalam hal ini public trust. Kepercayaan ini unsur sangat penting bagi WVI sebagai lembaga sosial kemanusiaan,” kata dia.

Kepercayaan yang diberikan kepada WVI tentu saja tidak muncul dalam sekejap. WVI memperolehnya setelah berproses selama puluhan tahun. Pengalaman panjang lembaga ini menangani berbagai program pengembangan, maupun respons bencana, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas telah membuatnya meraih semua itu. Bahkan bila ditemukan suatu pelanggaran atau kecurangan, hal tersebut tidak ditutup-tutupi tetapi dilakukan penindakan secara tegas. Sebab itu publik memercayainya.

WVI juga menjaga independensinya dengan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau keinginan negara donor. Salah satu, dari empat prinsip utama yang menjadi pegangan bagi WVI dalam berkarya adalah prinsip *twin citizenship*, yakni tekad yang sama untuk menghormati organisasi nasional dan *global* dengan semangat menghargai kepentingan nasional demi kebaikan bagi seluruh anggota kemitraan.

Untuk memastikan independensinya, kata Ruddy, periodisasi dan perubahan susunan *board* dilakukan secara berkala. Masa jabatan board ditetapkan selama tiga tahun. Pada akhir masa jabatan seorang anggota *board*, dilakukan asesmen oleh suatu tim, untuk melihat efektivitas kehadirannya sebagai *board*. Dari hasil asesmen tersebut anggota yang bersangkutan dapat diusulkan dan diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama dan dapat dilakukan dengan maksimal tiga masa jabatan atau sembilan tahun.

WVI hanya bertindak bagi kepentingan umum seperti telah digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta etika bersama yang dirumuskan oleh World Vision Internasional sebagai mitranya.

“Konsepsi akuntabilitas muncul oleh karena ada kejelasan fungsi dalam organisasi, termasuk cara mempertanggungjawabkan kinerja. Selama ini WVI memiliki kejelasan fungsi organisasi, punya struktur, dan tata kerja yang teratur. WVI punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan banyak aturan lainnya yang diadopsi dari World Vision Internasional,” jelas Ruddy.

Secara berseloroh Ruddy mengatakan, “Di WVI tidak ada bagian yang tidak ada aturannya. Bahkan, kalau bisa, batuk pun ada aturannya,” kata dia, untuk menggambarkan bagaimana WVI berpegang teguh pada aturan dan tata kerja yang dimiliki lembaga ini.

Akuntabilitas WVI dapat diukur dari kompetensi para staf. Dalam hal ini kemampuan teknis dan kematangan spiritual staf WVI baik yang duduk di Kantor Nasional di Jakarta maupun staf yang menjadi ujung tombak di lapangan, terus diasah. Demi mengasah kemampuan teknis ini banyak staf dikirim secara khusus untuk mendalami berbagai bidang yang relevan dengan kerja-kerja di lapangan. Termasuk mengelola bantuan dalam kapasitas yang besar seperti pernah dilakukan di Aceh, Palu, Lombok, dan tempat lainnya.

Akuntabilitas WVI juga dapat dinilai dari pelayanannya di lapangan yang non diskriminasi. WVI adalah lembaga Kristen, tetapi melayani semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras dan gender. WVI menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga agama dan lembaga terkait, selain masyarakat penerima manfaat, dalam pengelolaan programnya.

Ambil contoh dalam tanggap bencana gempa bumi Lombok. WVI membangun 426 buah hunian sementara (huntara) semi permanen bagi masyarakat terdampak di 15 dusun di Desa Sokong, Lombok Utara. Dukungan diperoleh dari Aktion Deutschland Hilft (ADH) Jerman. Dalam pembangunan huntara WVI bekerja sama dengan PKPU Human Initiative dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Masyarakat dilibatkan dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang tersebar di dusun-dusun sasaran. Bersama dengan WVI dan PKPU Human Initiative, pokmas mendata orang-orang yang berhak menerima huntara.

Selain bermitra dalam mewujudkan program di lapangan agar berjalan baik, WVI juga perlu mendapatkan umpan balik dari program dan respons yang dilakukan.

Hal ini antara lain untuk menghindari ketergantungan terhadap bantuan. Sebab respons bencana misalnya, hanya dilakukan selama paling lama tiga tahun, dan pendekatan program melalui pengembangan AP hanya antara 10-15 tahun. Setelah itu diharapkan pemerintah dan penerima manfaat bisa meneruskan program tersebut secara mandiri.

Sebab itu WVI selalu terbuka dengan memberikan informasi yang jelas, benar dan bisa dipertanggungjawabkan tentang pengelolaan bantuan kemanusiaan atau program yang dijalankan. WVI membuat kejelasan informasi dari awal; tujuan, sasaran, jumlah, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan sebagainya.

“Misalnya, WVI tidak akan pernah membangun rumah ibadat dalam pelaksanaan programnya. Jadi waktu respons gempa di Padang, WVI membangun sebuah gedung SMA yang roboh. Pemimpin agama di sana minta, apakah WVI bisa membangun mushola di kompleks tersebut? Saya jawab, WVI tidak akan pernah membangun rumah ibadat apa pun, termasuk gereja. Jadi kita ini nonproselit. Tidak melakukan upaya penyebaran ajaran Kristen melalui bantuan kemanusiaan,” kata Trihadi Saptoadi menceritakan pengalamannya dalam respons bencana gempa bumi di Padang tahun 2009.

Untuk memperkuat jejaringnya, WVI bergabung ke dalam lembaga Humanitarian Forum Indonesia (HFI) untuk bersama-sama belajar dan melakukan perbaikan, berdasarkan pengalaman memberikan bantuan kemanusiaan. Setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, menjadi bahan pembelajaran demi perbaikan.

Sejak awal, *concern* utama WVI adalah keberpihakan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya yakni penyandang cacat, ODHA, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan lainnya. Pada setiap tahapan pengelolaan bantuan kemanusiaan, kelompok rentan ini menjadi prioritas.

Meskipun nilai-nilai akuntabilitas di atas telah menjadi pegangan bersama, bukan tidak mungkin terjadi konflik kepentingan, yakni bercampurnya kepentingan pribadi ke dalam urusan organisasi. WVI sudah melakukan antisipasi dengan membuat peraturan tentang *conflict of interest* atau konflik kepentingan untuk memastikan kepentingan manajemen, penerima manfaat dan masyarakat tidak saling merugikan satu sama lainnya.

Peraturan tentang hal ini berlaku bagi semua staf. Aturan ini ditandatangani saat masuk dan diperbarui setiap tahun. Staf tidak boleh bertindak di luar kepentingan dan tujuan utama lembaga.

Komitmen Melayani

Hal lain yang menonjol dalam Wahana Visi menurut Ruddy Koesnadi adalah, komitmen untuk melayani.

Setiap tahun anggota *board* dan seluruh staf WVI harus menandatangani surat pernyataan berisi kesediaan menjalankan semua komitmen organisasi.

"Kejelasan tata aturan seperti *conflict of interest* membuat tingkat akuntabilitas lebih mudah diukur. Karena ada penjabaran yang jelas tentang fungsi-fungsi. Ada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada wewenang dari semua penyelenggara organisasi. Ada juga ukuran-ukuran kinerja yang jelas, dari tingkat *board* sebagai dewan pembina, pengawas hingga staf di lapangan. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Setiap tahun, personil dari *board* sampai ke staf wajib menandatangani surat pernyataan bebas dari konflik kepentingan tadi," kata Ruddy.

Meskipun sudah jelas, kata dia, diperlukan pengukuran secara periodik untuk memastikan apakah yang direncanakan pada awal tahun sudah dikerjakan, dan bagaimana hasilnya. Termasuk mengukur kepatuhan terhadap hukum: Apakah pengambilan keputusan telah sesuai aturan main; apakah keputusan-keputusan diambil secara benar; apakah pertanggungjawaban sudah dilakukan secara berkala?

"Setiap tiga bulan Pembina dan Pengawas (*board*) mendapat laporan dari manajemen dalam hal ini pengurus, tentang perencanaan dan pencapaian. Juga tentang hubungan dengan pemerintah dan hukum. Dalam evaluasi internal akan kelihatan apakah fungsi-fungsi sudah berjalan atau tidak, dan bagaimana tingkat akuntabilitasnya? Untuk itu *board* membentuk komite-komite untuk melaksanakan tugasnya." ujar Ruddy.

Ada empat komite yang dibentuk di dalam *board* WVI, yaitu: *Executive Committee*, *Audit & Risk*, *People & Stewardship* dan *Public Engagement*. Hasil rapat dari setiap komite dilaporkan dalam rapat *board* secara berkala. Dalam setiap rapat dibuatkan asesmen hasilnya.

Executive Committee terdiri dari ketua Pembina, ketua-ketua komite dan ketua Pengurus. Pada dasarnya komite ini melakukan evaluasi secara garis besar dan menyeluruh mengenai kebijakan dan kegiatan yayasan, tata kelola, risiko, hubungan dengan pemangku kepentingan dan isu yang diangkat oleh para ketua komite.

Audit & Risk Committee terdiri dari ketua dan anggota Pengawas dibantu oleh *Internal Audit Manager*, *Finance & Corporate Service Director*, *Strategy Management Director*, *Enterprise Risk Management*

Manager, Corporate Legal Specialist dan staf. Komite ini memberi perhatian antara lain kepada rencana dan tindak lanjut dari temuan audit dan investigasi; risiko yang dapat ditolerir (*risk appetite*) dan laporan risiko organisasi, serta *outlook* keuangan & isu keuangan utama.

Stewardship & People Committee terdiri dari anggota Pembina dibantu oleh *People & Culture Director, Strategy Management Director, Operation Director, Humanitarian and Emergency Affairs Director, Corporate Legal Specialist* dan staf. Komite ini memberi perhatian antara lain kepada kinerja dan tantangan terkait *children wellbeing, sustainability*, manajemen krisis, manajemen keamanan, pengembangan kepemimpinan serta kepatuhan terhadap kebijakan *Safeguarding*, survei staf *OurVoice, Advocacy for Justice* dan masalah legal.

Public Engagement Committee terdiri dari anggota pembina dibantu oleh *Digital, Partnership & Innovation Director, Strategic Management Director, Communication Director, Corporate Partnership Lead* dan staf. Komite ini memberi perhatian antara lain kepada pencapaian pelayanan, *outlook* pendapatan lokal, perluasan donor/ sponsor, kemajuan inisiatif pendanaan lokal.

Hasil evaluasi internal kemudian ditindaklanjuti dengan membuat pelaporan kepada publik. "Pertanggungjawaban kepada publik tentang besar dana dan pencapaian program serta jumlah penerima manfaat muncul dalam bentuk buletin maupun laporan tahunan. Setiap tahun harus dilakukan," ujarnya.

Penatalayan yang Bertanggung jawab

World Vision International dan mitranya WVI memakai istilah *stewardship* dalam pelayanannya yakni: "Kami menghayati bahwa Tuhan sudah memberikan sumber daya dan dana kepada kami untuk membuat perubahan, untuk menolong yang miskin dan terpinggirkan".

Dalam konsep *stewardship*, para pelaksana pada hakikatnya dapat dipercaya dan dinilai mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab serta memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

"*Stewardship* ini bisa dipahami sebagai Tuhan selalu memberikan *resources* kepada manusia agar ia dapat melakukan perubahan yang baik," kata Ruddy.

Integritas menurut dia, berkaitan dengan konsistensi dalam melakukan tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Sebab itu semua personil dalam WVI diharapkan memiliki pribadi yang jujur dan karakter kuat. Setiap tahun, tanpa kecuali setiap personil dari *board* sampai ke staf wajib menandatangani surat pernyataan untuk menjaga integritas. Akuntabilitas dengan sendirinya akan terjaga kalau masing-masing pihak, baik pelaksana dan pengawas memiliki integritas.

Misi World Vision, kata Ruddy, adalah memanfaatkan *resources* tadi untuk menolong orang-orang miskin. World Vision mendeklarasikan dirinya sebagai *steward*, penatalayan, yakni bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan publik dan *stakeholder*-nya. Sebab itu, semua pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebab itu penatalayan harus mengelola dengan baik dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

“Kalau kita melihat Kitab Kejadian, pada waktu manusia ditaruh di Taman Eden, mereka ditugaskan untuk memelihara dan menumbuhkan. Ada konsepsi *stewardship* di dalamnya. Demikian pula pada 1 Korintus 4: 2. Dikatakan bahwa kita dituntut untuk bisa dipercaya. Artinya, kita tidak sekedar diberikan kesempatan menjadi *steward*, tetapi kita dituntut menjadi *steward* yang bisa dipercaya. Roma 14: 12 juga bicara tentang pertanggungjawaban. Berarti nilai-nilai kristiani paralel dengan visi misi lembaga ini. Karena WVI adalah organisasi yang mengklaim diri sebagai *steward* yang punya akuntabilitas,” jelas Ruddy.

Teknologi dan Akuntabilitas

Dunia memasuki zaman digital. Pekerjaan kemanusiaan (*humanitarian industry*) harus menyesuaikan diri. Teknologi akan sangat membantu para pekerja kemanusiaan.

Selain mempermudah pekerjaan, teknologi juga menyiapkan perangkat pelaporan hasil kerja dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, penanganan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia yang kian parah, akan menempatkan teknologi di garis depan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, sekitar 132 juta

Salah seorang penerima manfaat dari respons gempa bumi Sulawesi Tengah menunjukkan kartu LMMS yang berisi data dirinya.



orang mengalami kelaparan pada 2020 akibat dampak ekonomi dan pemberlakuan *lockdown*. Pemotongan anggaran pendidikan dan meningkatnya angka kemiskinan memaksa sekitar 9,7 juta anak putus sekolah.

Namun para pekerja kemanusiaan tak boleh menyerah. Pandemi tak boleh menghentikan upaya penanganan krisis kemanusiaan. Relawan kemanusiaan harus tetap bekerja menolong sesama. WVI dalam kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan, juga memanfaatkan teknologi. Antara lain melalui *Last Mile Mobile Solution* (LMMS). Teknologi ini dirancang untuk memperkuat efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam kegiatan kemanusiaan. Antara lain LMMS mempermudah pengumpulan data jarak jauh, membantu mengelola para penerima bantuan, memungkinkan distribusi bantuan yang lebih cepat dan merata serta menyediakan sistem pelaporan yang lebih cepat bagi para penyalur bantuan. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 2008 oleh World Vision International untuk membantu kerja lapangan para stafnya dan pekerja kemanusiaan pada umumnya, terutama dalam tanggap bencana ketika masalah operasional berupa pengiriman bantuan, sasaran yang dituju, jumlah bantuan, jenis bantuan dan sebagainya tidak seluruhnya dilakukan oleh manusia. Dengan teknologi LMMS ini pekerjaan menjadi lebih mudah dan laporan yang dibuat pun sangat presisi.

Para petugas di lapangan mendaftar anggota keluarga yang perlu dibantu dengan memberi mereka kartu yang dilengkapi foto diri dan *barcode*; Pencatatan persediaan bantuan dapat dilacak secara real-time saat komoditas didistribusikan berlangsung sementara layanan pembayaran tunai dapat diinstruksikan lewat operator telepon seluler; Laporan distribusi dapat dibuat mendekati *real-time* termasuk total kepala keluarga, jumlah individu yang dibantu, total komoditas yang telah didistribusikan, dan laporan kerugian; dan fitur pemantau kesehatan memungkinkan pemberi bantuan untuk melacak manfaat dari intervensi menggunakan indikator utama nutrisi untuk memastikan bahwa bantuan sudah menjangkau mereka yang paling rentan.

Teknologi ini membuat operator lebih hemat waktu dan biaya pendaftaran. Perencanaan bisa dilakukan pra distribusi. Dan penyaluran komoditas serta pelaporan di peroleh saat yang bersamaan.

WVI telah memakai teknologi ini dalam beberapa respons bencana. Penerima manfaat dan staf WVI di lapangan melaporkan bahwa mereka jauh lebih puas saat menggunakan LMMS dibanding menggunakan tenaga manual saat menyalurkan bantuan. Para penerima manfaat senang karena mereka merasa lebih diberdayakan saat memiliki kartu layanan dan informasi pribadi mereka terjaga.

ASKA dan Aplikasi ASKA

ASKA (Asosiasi Simpan pinjam untuk Kesejahteraan Anak) adalah kelompok berbasis masyarakat yang memobilisasi dan mengelola simpanan mereka sendiri, menyediakan pinjaman untuk anggotanya, dan memberikan layanan asuransi terbatas (dana sosial).

Program ini diinisiasi oleh WVI sebagai solusi bagi masyarakat miskin yang selama ini terjerat hutang rentenir dengan bunga yang tinggi dan tidak atau kurang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal ataupun informal dengan bunga pinjaman yang tinggi.



Salah satu kegiatan ASKA di Sulawesi Selatan yang diikuti oleh para istri petani coklat.

Program ini dimulai di tahun 2012 dengan satu kelompok yang beranggotakan 13 orang ibu di Kecamatan Kebon Pala, Jakarta. Dengan skema pertemuan secara reguler (mingguan atau dua mingguan), semua anggota dapat mengumpulkan dana yang disimpan di kotak khusus dengan tiga kunci berbeda dan dipegang oleh tiga orang yang berbeda. Sistem ini juga meningkatkan keamanan uang mereka dan tingkat kepercayaan antar anggota dan pengelola. Tabungan dibangun dengan mekanisme pembelian saham, yang selanjutnya dipinjamkan kembali ke anggota dengan maksimal dua kali nilai saham.

Sistem saham ini memungkinkan anggota dapat menyimpan uang sesuai dengan kondisi keuangannya. Jumlah saham yang dapat dibeli adalah satu sampai lima saham per pertemuan. Sebagai contoh, bila anggota berjumlah 25 orang dengan nilai saham adalah Rp20.000 per saham, maka dalam satu siklus (24 pertemuan setiap minggu), jumlah total uang yang disimpan anggota dapat mencapai Rp12.000.000 – Rp60.000.000. Jumlah yang cukup besar untuk dipinjam anggota sebagai tambahan modal usaha mikronya. Jasa pinjaman kemudian ditambahkan ke modal kelompok untuk memperbesar kapasitas kelompok dalam memberikan layanan pinjaman. Pada akhir siklus, seluruh saham, jasa pinjaman dan denda yang terkumpul, dikembalikan kepada anggota sesuai dengan jumlah saham masing-masing. Jasa pinjaman dan denda menjadi pengembangan nilai saham. Pengalaman dari kelompok dampingan WVI, menunjukkan bahwa pertambahan nilai saham berkisar lebih dari 10% dalam setiap siklusnya sehingga anggota tidak merasakan rugi dalam melakukan penabung.

ASKA sendiri memberikan manfaat yang baik para anggotanya antara lain bisa disiplin menabung, adanya akses dana yang mudah untuk keperluan tambahan modal usaha, pendidikan anak dan kebutuhan keluarga. Selain itu, masyarakat mendapat kesempatan belajar untuk memimpin, lebih disiplin, dan bisa mengenal satu dengan yang lain.

Berdasarkan monitoring dan diskusi terfokus, model ASKA terbukti menjadi sarana belajar masyarakat miskin untuk membangun tabungan, disiplin mengelola uang keluarga, membangun karakter peminjam yang baik dan mengubah perilaku dalam membelanjakan uang. Perkembangan jumlah kelompok dari 2015, 2016 dan 2017 adalah 60, 94 dan 122 kelompok dengan jumlah anggota meningkat dari 1.214 orang; 2.179 orang dan 2.614 orang; nilai tabungan masyarakat



Homepage aplikasi ASKA berbasis Android.

miskin berturut-turut adalah 7.935 meningkat menjadi 111.729 dan meningkat menjadi USD 138.814 per tahun.

“Saya baru 10 bulan ikut ASKA, tetapi saya sudah bisa merasakan manfaatnya. Saya sudah pernah pinjam di ASKA untuk modal usaha saya. Awalnya saya ragu ikut ASKA, tapi ternyata ASKA sangat membantu ekonomi keluarga saya,” kata Mintarsih (38), penghuni Rusun Cilincing, Jakarta Utara.

Pada awalnya pencatatan dilakukan secara manual menggunakan pena dan buku namun hal ini memiliki kelemahan seperti hilangnya catatan. Maka selanjutnya pada tahun 2018, Aplikasi ASKA berbasis Android diluncurkan dengan dukungan dari PT. Accenture sebagai mitra WVI yang mendukung pembuatan aplikasi secara pro bono. Aplikasi ASKA terbukti bisa membangun sistem informasi yang transparan, mandiri dan merekam jejak keuangan dengan baik.

mPosyandu

Guna mendukung peningkatan kualitas tumbuh kembang dan gizi anak Indonesia, WVI didukung oleh HSBC, telah mengembangkan Posyandu Mobile yang disingkat mPosyandu.



Salah satu contoh penggunaan mPosyandu dengan telepon berbasis Android saat kegiatan posyandu berlangsung.

mPosyandu merupakan salah satu hasil dari program Pos Pintar yang dikoordinir oleh dr. Yosellina. Aplikasi mPosyandu diluncurkan pada 1 Maret 2016 di Wisma Antara, Jakarta Pusat, yang merupakan bagian dari proyek Pos Pintar Posyandu Pintar untuk Anak Sehat dan Cerdas. Pada tahap awal, aplikasi mPosyandu dipakai pada 150 posyandu yang tersebar di Jakarta, Surabaya dan Pontianak.

Implementasi mPosyandu di Jakarta dimulai di kelurahan Cilincing dan Semper Barat, Kecamatan Cilincing. Di Surabaya pada kelurahan Simolawang dan Sidodadi, Kecamatan Simokerto. Sedangkan di Pontianak dimulai dari kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliang dan Pal Lima. Semuanya berada di kecamatan Pontianak Barat.

Aplikasi mPosyandu dapat diunduh melalui ponsel pintar, dengan dua fungsi utama yakni: Pertama, membantu kader memantau pertumbuhan anak dengan data yang lebih akurat dan cepat; kedua, membantu kader memberikan konseling pemberian makan pada bayi dan anak. Sebelum diluncurkan, WVI telah mengujicoba penggunaan aplikasi ini pada tahun 2013-2015 di wilayah Sikka (NTT) dan Cilincing.

Upaya kerjasama WVI dan HSBC ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB. Pos Pintar merupakan inovasi berbasis Android untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu melalui penggunaan aplikasi mPosyandu, untuk pemantauan tumbuh kembang dan konseling gizi berbasis masyarakat.

Para kader Posyandu mengungkapkan besarnya manfaat program Pos Pintar bagi masyarakat. Menurut mereka, program ini dapat meningkatkan kehadiran ibu-ibu balita dalam mengunjungi kegiatan Posyandu. Sebagian besar ibu balita tidak sabar untuk menghadiri kegiatan Posyandu karena mereka ingin melihat tanda jempol di telepon pintar, yang memberikan petunjuk bahwa anaknya tumbuh sehat.

Seperti diketahui, sebanyak 19,6 persen balita di Indonesia memiliki berat badan rendah yang tidak sesuai dengan umur. Sementara itu 37,2 persen balita di Indonesia memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Sementara pada sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh posyandu adalah, kurangnya kapasitas kader, keterlambatan waktu pelaporan dan tantangan lainnya.

Namun melalui teknologi dan aplikasi posyandu, terjadi perubahan perilaku kader dan warga mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak. Aplikasi mPosyandu juga meningkatkan kualitas layanan posyandu, penentuan status pertumbuhan balita jadi lebih akurat dan meningkatkan kemampuan kader dalam merespon pertanyaan dalam status pertumbuhan anak.

“Teknologi mPosyandu sangat membantu kader. Laporan bisa didapat saat ini juga. Kami mendapat kemudahan lewat mPosyandu. Kalau pakai proses yang biasa, makan waktu lama. Laporan juga lama,” kata Karolus Marva, Kepala Puskesmas Nita, Sikka, NTT.

Bagi Hana Noviana, seorang pengunjung posyandu di Jakarta, menjadi lebih paham tentang pemberian gizi pada anaknya. Para kader juga datang mengunjunginya.

“Pelayanan posyandu sekarang lebih baik, banyak kasih informasi. Dari yang tadinya kita cuma tahu telur sebagai sumber gizi, ternyata banyak sumber gizi lainnya. Di hape juga ada gambarnya, jadi saya dapat lebih paham tentang pemberian gizi pada anak,” kata dia.

Suara dan Aksi Warga Negara

Pada tahun 2014 WVI mengimplementasikan program “Suara dan Aksi Warga Negara untuk Akuntabilitas Pemerintah dan Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan Ibu dan Anak” pada 60 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Kupang, TTU dan Sikka, Provinsi NTT, untuk mendukung keterlibatan masyarakat dalam mendorong akuntabilitas pemerintah.



Program ini didanai oleh World Bank melalui *program Global Partnership for Social Accountability (GPSA)*.

Pendekatan yang dipakai adalah Suara dan Aksi Warga Negara (*Citizen Voice and Action*) yang sudah digunakan oleh World Vision di lebih dari 40 negara. WVI melakukan pendampingan dan pelatihan kepada warga dan tokoh masyarakat tentang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Sebelum GPSA, pendekatan Suara dan Aksi Warga Negara sudah dimulai sejak tahun 2011 di Sikka dan Timor Tengah Utara (NTT) serta Cilincing (Jakarta) dengan dukungan dana dari World Vision Canada.

Warga menyampaikan keinginan mereka melalui berbagai forum, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa) musrembang, untuk pembangunan di desanya. WVI berfungsi sebagai fasilitator. Suara warga kemudian disampaikan kepada pemerintah. Aksi Warga Negara merupakan suatu bentuk pendekatan akuntabilitas sosial untuk meningkatkan dialog antara warga negara, penyedia layanan dan pemerintah. Tujuannya meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar.

Festival Pembelajaran
Suara dan Aksi Warga
Negara di Kupang, Juni
2018.

Masyarakat di 60 desa diajak untuk mengenal hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mengenal peraturan dan kebijakan pemerintah terutama menyangkut standar pelayanan yang harus dipenuhi di fasilitas layanan kesehatan ibu dan anak.

Melalui pendekatan Suara dan Aksi Warga Negara, penyedia layanan dilibatkan dalam pemantauan standar, yakni membandingkan kondisi aktual layanan yang diperoleh dengan standar pelayanan yang harus tersedia sesuai aturan dan kebijakan pemerintah. Selain itu, masyarakat diajak untuk memberikan penilaian dengan menggunakan kartu penilaian.

Masyarakat menilai kinerja layanan yang tersedia berdasarkan harapan mereka. Hasil dari pemantauan standar dan kartu penilaian ini didialogkan dalam pertemuan tatap muka antara masyarakat, penyedia layanan dan pemerintah untuk menyepakati rencana aksi yang harus dilakukan untuk peningkatan pelayanan dasar.

Tukang Jamban dari Manda dan Air Garam

Sebelum WVI memakai teknologi sebagai salah satu cara untuk menjaga akuntabilitasnya, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Yali Inggibal dan Wulep Kanelak telah membawa nama WVI ke tingkat nasional, atas karya mereka menggunakan teknologi berbasis kearifan lokal untuk membebaskan kampungnya dari kematian bayi yang kerap terjadi.

Karya WVI diakui oleh pemerintah melalui penetapan Kampung Manda dan Air Garam sebagai kampung bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Yali Inggibal berbadan langsing. Tingginya sekitar 170 cm. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih. Usianya menjelang 50 tahun.

Sementara Kepala Suku Wulep Kanelak berusia sekitar 70 tahun. Keriput pada wajahnya menegaskan usianya. Ia murah senyum. Jabat tangannya erat. Wulep hanya bisa berbahasa Walak.

Yali dan Wulep tidak tahu kapan persis lahir. "Saya lulus SMP Persamaan. Bapak Wulep tidak sekolah," kata Yali. Seseorang yang telah menerjemahkan omongan Yali membuat Wulep tersenyum.

Kampung Air Garam dan Manda di Distrik Bugi, berjarak 20 km dari Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Sekitar 50 menit berkendara. Jalan mula-mula beraspal mulus. Namun selepas Wamena jalan telah berlubang di sana-sini. Melalui rute ini pula Tolikara bisa dijangkau.

Sebelum WVI masuk ke Manda pada tahun 2013 kasus kematian bayi di kampung Air Garam dan Manda cukup tinggi. Antara 3-6 bayi setiap tahun. Dengan gejala demam tinggi. Disertai diare. Menurut Yali, "Panas sedikit langsung meninggal. Mencret sedikit langsung meninggal."

"Penyebabnya karena buang kotoran di sembarang tempat. Terus honai juga tidak berventilasi membuat asap terus-menerus dihirup. Bikin radang paru-paru," kata Yali lagi.

Secara turun temurun warga Air Garam dan Manda terbiasa buang air besar di sungai, kebun, hutan atau di belakang rumah. Tak ada tradisi membangun jamban.



Yali Inggibal dan Wulep Kanelak

Bulan November 2013 Yali menjadi penerjemah dalam lokakarya sanitasi yang diselenggarakan WVI di Kampung Manda dan Air Garam.



Pembicaraanya adalah dokter Candra Wijaya, Koordinator Tim Kesehatan WVI. Candra memakai alat palsu sebagai alat peraga. Alat ia taruh di atas kotoran yang mudah ditemukan di sekitarnya, lalu dicelupkan ke dalam segelas air minum. Adegan ini membuat jijik warga desa. Mereka menolak meminum air tersebut, meski terlihat jernih.

Yali (kanan) saat menunjukkan cara pembuatan 'semen' untuk jamban dari abu kepada dr. Candra (saat itu adalah Koordinator Tim Kesehatan WVI).

Warga mulai menyadari bahwa diare dan demam yang menyebabkan kematian pada anak-anak antara lain disebabkan oleh lalat yang hinggap di kotoran akibat BABS, lalu terbang dan hinggal di makanan. Ditambah pendampingan intensif oleh staf lapangan WVI membuat warga semakin sadar. Yali yang sejak lama menjadi kader kesehatan Puskesmas, kini menjadi kader kesehatan WVI juga.

Tetapi warga tak mampu membangun jamban karena harga bahan-bahan yang sangat mahal di Wamena. Satu sak semen seharga Rp800 ribu. Belum seng dan paku.

“Kalau pemerintah kasih kita bahan, baru bisa bangun,” kata Yali.

WVI bikin langkah awal dengan membangun dua jamban percontohan. Letaknya di depan gereja di Kampung Air Garam. Klosetnya dari seng. Dibuat seperti talang air, menuju lubang penampungan 3x3 meter di belakang. Tempat jongkok adalah kayu dari hutan-hutan di atas gunung.

Sebagai “semen”, Yali mengambil abu bekas pembakaran kayu. Ia aduk dengan air mendidih. Ternyata lengket. Jadilah semen “made in” Air Garam. Ketika Yali dan Wulep diundang dalam acara Kick Andy di MetroTV, Andy Noya geleng-geleng kepala atas prakarsa Yali dan Wulep ini. “Dua orang yang tidak sekolah tinggi tapi mampu menginspirasi,” kata Andy.

“Lubang *septic tank* kami tutup dengan susun kayu, lalu tutup dengan tanah. Agar uapnya bisa keluar kami pakai batang buah merah. Kasih lubang trus tancap di atas. Paralon mahal jadi...” Yali bicara dalam dialek Wamena.

Tetapi mengubah kebiasaan warga bukan hal mudah. Mereka protes dengan hal baru tersebut. Menurut mereka, jamban bukan budaya nenek moyang. Selama puluhan tahun mereka sudah terbiasa BAB di sembarang tempat. Di mana-mana.

Yali tak kurang akal. Dalam setiap penyuluhan yang diadakan WVI dan Dinas Kesehatan Jayawijaya, ia selalu menyertakan Wulep. Bagi orang Papua, kepala suku adalah panutan. Suaranya pasti didengarkan.

“Bapak Wulep ini orangnya sangat mengerti meskipun tidak bisa membaca dan menulis. Saya beritahu tentang pentingnya jamban. Saya beritahu kalau anak-anak kami banyak yang mati akibat mencret karena buang kotoran sembarangan. Setiap ada pertemuan dengan WVI dia ikut. Beliau setuju dengan saya.”

Yali dan Wulep menetapkan denda. Warga yang tertangkap tangan buang kotoran di sembarang tempat kena denda Rp300 ribu.

“Bapak Wulep yang jaga sendiri di depan jamban, ha-ha-ha” Yali terbahak.

Karena takut kena denda, warga mulai tertib. Awalnya karena takut. Lama-lama menjadi kebiasaan. Dua tahun sejak wajib jamban, jarang ada balita dan anak yang mencret. Kematian bayi bisa dihindari.

Kesadaran warga akhirnya benar-benar muncul setelah terbukti anak-anak mereka jarang sakit. Warga mulai membangun jamban sendiri. Atau dua-tiga keluarga bersekutu membangun satu jamban. Untuk dipakai bersama. Yali ringan tangan membantu mereka.

Tak ada lagi anak balita di kedua kampung itu yang meninggal gara-gara diare, demam, atau batuk. Pada bulan Januari 2015, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (kini Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kementerian Kesehatan, Muhammad Subuh meresmikan kampung Manda dan Air Garam sebagai daerah bebas dari BABS.

Usai jamban, WVI kembali membuat pemicuan membangun honai dan dapur sehat. Sebab salah satu penyebab utama radang paru pada balita karena terus-menerus menghirup asap dalam honai yang tak berjendela. Cuaca dingin sepanjang tahun membuat warga membangun honai hanya dengan satu pintu. Api terus dihidupkan untuk mengusir hawa dingin.

Yali memberi contoh. Honainya diberi jendela. Ia juga memisahkan antara dapur tempat memasak dengan honai tempat tinggal. Warga kembali berswadaya membangun dapur sendiri. Yali yang terampil bertukang membantu mereka.

Rupanya kabar baik dari Air Garam dan Manda menjangar ke kampung dan distrik lain. Yali mulai sibuk menanggapi permintaan mengajar cara membuat jamban dan dapur sehat. Setidaknya ada 12 kampung yang datang minta bantuan.

"Kampung Duto kami bikin 8 jamban. Terus pindah ke Walok Selatan ada 5 jamban. Kemudian ke Distrik Tagime 33 jamban. Jadi total sekitar 128 jamban sudah kami bikin," kata Yali semringah.



Mathius Awoitauw,
Bupati Jayapura,
Provinsi Papua.

Saya Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, Provinsi Papua. Kerja sama WVI dengan pemerintah Kabupaten Jayapura sangat menolong kami terutama dalam hal komunikasi, memberi solusi dan memberi penguatan terhadap keluarga dan anak-anak usia dini serta usia sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura.

Banyak program kerja sama WVI yang sudah terjalin dengan Dinas Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, BAPPEDA dan klasis-klasis yang ada di sekitar Kabupaten Jayapura dan wilayah Sentani. Kerja sama ini memberi wawasan baru serta semangat baru bahwa kami mempunyai mitra yang memiliki pengalaman dan informasi cukup serta bisa berbagi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin gencar membuat percepatan kemajuan di desa dan kota tidak seimbang dan menjadikan masalah sosial yang baru. Fenomena ini menjadi sebuah tantangan baru buat kita semua untuk terus berkontribusi dan bekerja sama sebagaimana WVI mengajak banyak pihak untuk mengatasi masalah serupa sebelumnya.

Terima kasih atas kerja sama WVI dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, masyarakat dan gereja serta masuk ke dalam kebutuhan mendasar yang diperlukan. Karena itu, pekerjaan-pekerjaan ini perlu kita tingkatkan dan lanjutkan serta terus berkolaborasi karena jika pemerintah sendiri yang bergerak, terkadang komunikasi dan pendekatan kami untuk menyelesaikan masalah kurang tepat.

Sejak 1970an WVI sudah hadir di Tanah Papua sehingga hasil kerjanya kini bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih untuk teman-teman di Kabupaten Jayapura dan wilayah Sentani. Tuhan memberkati karya dan kehidupan kita.***

Transformasi Menuju Kemandirian Penuh WVI

Upaya deregistrasi pelayanan World Vision Indonesia sudah mulai dilakukan sejak tahun 2018.

Langkah itu diawali dengan tidak diperpanjangnya MoU antara World Vision dengan Kementerian Sosial, sampai akhirnya pada penghujung tahun 2020, proses deregistrasi diterima oleh pemerintah Indonesia. Sejak itu pula WVI menjadi representasi tunggal kemitraan *global* World Vision International di Indonesia. Segala urusan yang terkait World Vision kini berada dalam diri dan dilakukan hanya oleh WVI, sebagai sebuah yayasan yang terdaftar di Kemenkumham.





Secara prinsip tak ada yang berubah. WVI tetap melanjutkan pelayanan World Vision sesuai dengan visi-misi dan nilai-nilai dasar yang diyakini selama ini. Barangkali yang berubah, seperti dikatakan Candra Wijaya, Direktur Manajemen Strategis WVI, hanya pada kegiatan administratif penyaluran bantuan asing dari World Vision International yang sebelumnya melalui kantor World Vision Indonesia, menjadi langsung kepada WVI.

WVI akan terus didukung oleh World Vision International. Antara lain yang telah dilakukan selama ini dengan membangun kapasitas kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dengan baik. Sehingga sampai akhir periode *Country Strategy* 2016-2020, WVI telah mendapatkan kepercayaan untuk membangun kerja sama lintas kementerian dan lembaga Pemerintah di tingkat nasional maupun daerah.

Pada tingkat nasional, kerja sama formal dilakukan melalui penandatanganan sejumlah *Memorandum of Understanding/ Memorandum of Agreement*. Sementara kerja sama informal melalui koordinasi dan kolaborasi program, telah dilakukan dan terus berproses.

Kerja sama WVI antara lain dilakukan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pemberian wewenang secara penuh kepada WVI oleh kemitraan *global* World Vision, karena mereka menilai WVI telah matang dan siap. Kesimpulan ini ditarik dari berbagai pencapaian WVI, antara lain tingkat kematangan governance, kapasitas kepemimpinan dan manajemen, keterampilan teknis operasional, sumberdaya manusia, kualitas program, tingkat akuntabilitas yang tinggi, dan banyak faktor lain yang merefleksikan kematangan entitas WVI.

Karena itu, peristiwa “deregistrasi” boleh dikatakan sebagai puncak dari segala persiapan tersebut. Kini WVI menjadi lembaga nasional yang mandiri (*interdependence*) dalam kemitraan *global* dengan World Vision. .

Doseba T. Sinay, CEO dan Direktur Nasional WVI periode 2014-2021 mengakui bahwa entitas nasional WVI sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Setidaknya, kata dia, persiapan secara serius untuk mandiri secara penuh dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini.

“Para direktur nasional sebelumnya, yakni Pak Trihadi Saptoadi pada awal 2010, dilanjutkan oleh Pak Tjahjono Soerjodibroto hingga 2014 dan pada masa kepemimpinan saya, sudah mempersiapkan transisi World Vision kepada WVI secara lebih serius. Banyak program untuk meningkatkan profesionalisme staf dalam mengelola organisasi, sistem kerja, penerapan standar kualitas kerja, kualitas akuntabilitas dan audit sudah dilakukan oleh mereka,” ujar Doseba, yang kerap disapa Ote.

Transisi WVI sebagai lembaga entitas lokal mandiri dilakukan secara bertahap, terukur dan penuh kehati-hatian. Artinya menurut Ote, segala perubahan yang terjadi dari sisi badan hukum harus mendukung kebutuhan WVI sebagai entitas lokal yang mandiri. Sementara itu pada sisi lain, World Vision sebagai lembaga internasional tidak lepas tangan. Ia tetap mendukung proses pembangunan kapasitas WVI.

“Dari soal *governance*, World Vision memastikan bahwa tatakelola WVI berjalan dengan baik, struktur organisasinya baik, ada tanggung jawab, ada pengurus, pembina dan pengawas dan mereka memastikan fungsi-fungsi itu berjalan. Yang tak kalah penting adalah kesamaan arah strategis. Harus dipastikan bahwa apa yang dilakukan WVI ke depan memang relevan dengan apa yang menjadi visi misi dari kemitraan *global* World Vision Internasional. Visi misi yang sama, tatakelola yang baik dan benar serta yang paling penting adalah nilai-nilai dasar organisasi yang ditaati bersama,” ujarnya.

Nilai-nilai dasar (*core values*) organisasi WVI yang dimaksud Ote adalah: Kami Kristen, kami melayani yang miskin, kami menghargai martabat manusia, kami penatalayan, kami mitra dan kami responsif.

Anggur Baru dalam Kirbat Baru

Ote yang akan melanjutkan kariernya memimpin World Vision Vietnam pada 2021 memakai analogi “Anggur Baru dan Kirbat Baru” seperti ditulis dalam Alkitab untuk menggambarkan transformasi yang terjadi dalam tubuh WVI. Transformasi dilakukan pada “wadah” dan “isi”nya sekaligus. Sebab keduanya merupakan satu kesatuan.

Pertama, transformasi tidak hanya dilakukan secara *de jure* (wadah), tetapi juga secara *de facto* (isi). Kalau hanya dilakukan pada wadahnya, perubahan pada aspek legalitas saja. Berarti hanya berubah nama lembaganya. Namun dalam hal WVI, transformasi juga dilakukan terhadap isinya, yakni kematangan dalam tata kelola dan program-program kontekstual dan relevan dengan kondisi dan situasi di Indonesia.

Kedua, transformasi terjadi dan dilakukan terhadap orang-orangnya. Terutama kepada para pemimpin manajemen dan board. Mereka dipilih secara prosedural berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Prosesnya pun dilakukan secara transparan dan bisa diikuti siapa saja. Hasilnya adalah orang-orang yang tepat pada bidangnya masing-masing.

Ketiga, keterampilan teknis operasional dan kualitas program di lapangan. Ketika melakukan respons bencana misalnya, WVI tidak sekadar hadir membawa bantuan, namun melakukan respons dengan program yang sudah teruji, efisien dan efektif. Program respons tersebut telah

teruji dalam banyak situasi bencana, antara lain ada standar operasional, perangkat yang lengkap, pengetahuan dan pengamanan, dan juga standar respons bencana lainnya. WVI hadir untuk meringankan penderitaan. Bukan sebaliknya memperkeruh suasana dan merugikan (*do no harm*).

Keempat, sistem pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan yang berkelanjutan. WVI memiliki seperangkat metode untuk melakukan survei agar sistem kepemimpinan dilakukan berkelanjutan dan dipastikan efektifitasnya.

"Ada forum baru untuk wadah *National Leadership Team*. Ini untuk memastikan para pemimpin masa depan pun sudah dipersiapkan dari sekarang," kata Ote.

Kelima, organisasi WVI bergerak secara akuntabel dalam semua kepentingan yang ada. Sebab itu, kemitraan dengan pemerintah dan jejaring yang lain terus diperkuat, seperti yang sudah dilakukan selama ini, tanpa WVI kehilangan identitas dan nilai-nilai dasar yang diyakininya.

Perkuat Pendanaan Lokal

Kemandirian WVI dibarengi oleh naiknya posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah (*upper middle income country*) seperti ditetapkan oleh World Bank.

Berarti Indonesia telah diakui sebagai negara dengan kekuatan ekonomi baru. Posisi ini telah membawa Indonesia keluar dari negara "dunia ketiga". Konsekuensinya bagi WVI adalah, dukungan donor dari luar negeri akan menurun seiring status tersebut. Sebab World Vision hanya akan memberikan dukungan kepada negara-negara yang berada dalam "*low income country*".

Sementara pada sisi lain, meskipun masuk dalam kategori negara dengan kekuatan ekonomi baru, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak daerah di Indonesia yang tingkat kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan anaknya sangat rendah. Stunting masih mudah ditemukan di kawasan NTT dan Papua. Perkawinan anak, kekerasan fisik, anak putus sekolah masih sering terjadi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT dan Papua masih di bawah IPM rata-rata nasional sebesar 71,9 persen. Papua dan NTT adalah dua daerah tempat WVI berkarya.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi WVI. Pada satu sisi WVI tidak lagi menjadi prioritas utama dalam pendanaan secara *global*, sementara di sisi lain pendanaan lokal belum kuat menyokong program-program yang akan dilakukan. "Pendanaan lokal kita baru berkisar antara 20-25 persen dari keseluruhan anggaran program WVI," kata Ote.

Strategi dipasang. WVI menempuh banyak cara untuk menggalang dana dari masyarakat Indonesia sendiri. Antara lain melalui *Digital Partnership and Innovation* (DPI), yakni menjalin kemitraan dan inovasi secara digital. Teknologi digital menjadi peralatan (*tools*) untuk mengembangkan kerja sama di bidang *sponsorship* lokal seperti sudah pernah dilakukan misalnya pada *crowdfunding* #Berani Mimpi dan program-program lainnya.

WVI percaya bahwa sebenarnya banyak orang ingin terlibat dalam *sponsorship*. "Bentuknya yang perlu diperbanyak, supaya meluas dan lebih banyak yang terlibat. Misalnya, apakah tidak bisa kita buat video tentang anak-anak di Sumba dan Papua yang isinya menyentuh dan mengetuk hati para calon sponsor? Dengan *sponsorship* kita bisa mengangkat derajat anak-anak di daerah yang masih tertinggal. Hanya melalui pendidikan kehidupan mereka bisa lebih cepat berubah. Dan bisa kita lakukan dengan menjalin *sponsorship* lebih banyak," yakin Guntur Tampubolon, ketua *board* WVI.

Perekonomian nasional yang semakin membaik menjadi kesempatan yang baik untuk menggalang pendanaan lokal yang lebih masif. Beberapa negara mitra World Vision seperti Thailand dan Meksiko telah menunjukkan hal tersebut. Keduanya bertransformasi dari negara "*low income*" menjadi "*middle up income*" dan bisa melakukan pendanaan lokal dalam jumlah yang signifikan.

"Indonesia sedang menuju ke sana. Kita memiliki potensi itu," yakin Ote.

Milestone Kemandirian Nasional



Germann Edey (1959 - 1963)

Atas permintaan Bob Pierce kepada Germann Edey, pelayan World Vision di Indonesia mulai dirintis pada bulan April 1960. Bantuan disalurkan kepada empat Panti Asuhan (PA) di Surabaya dan Mando yakni: PA William Booth di Bandung, PA Imanuel dan PA Wanita Protestan di Surabaya serta PA Rumah Pengasih di Manado. Pada 5 Mei 1962 atas saran dan dukungan Pendeta Petrus Octavianus dibentuk Yayasan World Vision yang berkedudukan di Malang. Kantornya dari garasi rumah German Edey. Pengurusnya adalah Germann Edey, Detmar Scheunemann dan Lois Fitzgerald.



Gene Daniels (1964 – 1977)

Untuk mewadahi pelayanan World Vision di Indonesia, pada 28 Oktober 1965 dibentuk Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia yang disingkat LEPKI, di bawah supervisi Departemen Agama (Depag). LEPKI memberikan pelayanan sosial kemanusiaan, pembinaan rohani dan penyediaan literatur Kristen.

Setahun kemudian terbit Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Keputusan bersama ini mengatur pemisahan antara pelayanan keagamaan dan sosial-kemanusiaan. LEPKI dan lembaga sejenis diminta fokus pada pelayanan kemanusiaan dan tidak menggabungkan pelayanan keagamaan dan sosial-kemanusiaan.

Program Pengembangan Keluarga dan Pengembangan Masyarakat mulai dikembangkan di Kalimantan, NTT dan Irian Jaya (Papua).



David L. Evans (1977-1979)

Kantor World Vision dipindahkan ke Jakarta. Dicapai pula kesepakatan untuk memisahkan secara tegas pelayanan di bidang sosial kemanusiaan dan pelayanan di bidang agama. World Vision memilih berkonsentrasi pada pelayanan sosial, sementara LEPKI akan menangani pelayanan di bidang agama. Sebab itu LEPKI tetap berada di Malang, sementara World Vision masuk Jakarta. James Tumbuan bersama tiga staf lainnya menyewa ruangan di sebuah rumah di Menteng sebagai kantor. Tahun 1980 World Vision membeli gedung di Jalan Wahid Hasyim 33, yang masih tetap dipakai hingga kini. Nama resmi yang dipakai adalah World Vision International-Indonesia Office atau World Vision Indonesia. Babak baru dalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Sosial dimulai.

Kaderisasi staf lokal mulai diprogramkan secara lebih nyata pada masa ini. Dua wilayah pelayanan WVII, yakni barat dan timur, mulai dipimpin staf lokal yakni Bert Mamoto (barat) dan James Tumbuan (timur).



Skip L. Hubby (1980 – 1983)

World Vision Indonesia mulai membuka program *National Development Training Center* (NDTC) di Jakarta untuk melatih kader-kader Pengembangan Keluarga dan Pengembangan Masyarakat dari berbagai daerah pelayanan di Indonesia. Sepanjang dekade 1980 hingga pertengahan tahun 1990-an NDTC menjadi sumber utama kader terlatih pengembangan masyarakat yang menangani berbagai proyek pengembangan World Vision.

World Vision Indonesia juga mulai membuka *Regional Training Center* (RTC) di Kalimantan Barat (Samalantan dan Tebang Bana), Iruan Jaya (Bokondini, Serui dan Sentani) serta di NTT yakni di Rote, Belu dan Ende.



Fram Jehangir (1984 – 1997)

Pada masa kepemimpinan Fram Jehangir, salah satu fokusnya adalah membentuk staf lokal sebagai pemimpin di Indonesia dan beberapa negara di Asia Pasifik. Program peningkatan kapasitas staf lokal dilakukan secara lebih masif dan terencana. Beberapa staf senior didukung mengikuti program magister dan sejumlah staf lain mengikuti studi lanjut di Yogyakarta, Jakarta dan Australia. Beberapa staf lokal seperti Roriwo Karetji, Saptono Jokopriadi, Susana Sрни, Soedarto, Trihadi Saptoadi, Esther Halim, Tri Budiardjo, Aryani Sardjono, Lily Wirawan dan Eddy Sianipar mulai tampak ke permukaan. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pimpinan.



James Tumbuan (1997 – 2006)

James adalah staf Indonesia pertama yang diangkat sebagai direktur nasional World Vision Indonesia. Pada masa kepemimpinannya World Vision Indonesia dipercaya melaksanakan dua program government to government peningkatan kesehatan dasar masyarakat “Women and Their Children’s Health (WATCH) di Pegunungan Tengah Papua serta “Sanggau Child Survival Project” (SCSP) di Sanggau Kalimantan. Dua proyek ini mampu membuat terobosan dalam meningkatkan ketahanan dan kualitas hidup anak dan ibu. Terjadi perubahan mendasar pada cara pendekatan program. World Vision secara *global* mengadopsi pendekatan pengembangan masyarakat berdasarkan wilayah (Area Development Program/ADP). Skala jangkauan pendekatan ADP lebih luas dan jangka waktunya pun lebih panjang, yakni antara 10-15 tahun, dan bila perlu bisa diperpanjang beberapa tahun lagi.

Pada masa kepemimpinan James Tumbuan, pengembangan kapasitas bagi staf lokal telah menjadi program dan dilaksanakan secara masif.



Trihadi Saptoadi (2006 – 2010)

World Vision memberi prioritas lebih tinggi pada upaya mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan-pelatihan tanggap bencana di Jawa, NTT, Sumatera, Kalimantan dan Papua agar masyarakat dan pemerintah lebih intensif melakukan advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan menekan laju penyebaran HIV dan AIDS, terutama di Jawa dan Papua. Selain melakukan tanggap darurat di Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu dan Sumatera Barat, World Vision terus meningkatkan efektivitas pelayanan di ADP agar sebanyak mungkin masyarakat mampu meningkatkan kualitas kehidupannya, terutama kehidupan anak-anaknya. Lebih dari 90.000 anak tercatat dalam program santunan anak yang dijalankan World Vision.

Secara internal World Vision pada masa ini mulai menerapkan kebijakan setiap karyawan bisa mengajukan diri untuk bekerja pada bidang yang menjadi passionnya.



Tjahjono Surjodibroto (2010 – 2014)

Dalam masa ini mulai dibuka pelayanan di Kampung Patriot di luar Merauke, yang dibiayai dari sponsor lokal. Kemudian menyusul pembukaan ADP Maro di kota Merauke dan Pantai Kasuari.

WVI mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi salah satu fokus untuk mengurangi angka kematian bayi, balita dan ibu hamil. WVI menaruh komitmen yang tinggi untuk pelayanan di Papua. Dukungan mitra dari dalam negeri termasuk para individual dan korporasi membawa dampak kepada lebih dari 13.000 anak di 13 wilayah yang didukung langsung sponsor Indonesia.

Pada masa ini pula seluruh kegiatan WVI dipindahkan dari Wahid Hasyim 33 ke kantor baru di Bintaro



Doseba T. Sinay (2014 – 2021)

Pendekatan program yang semula dengan sistem Area Development Program (ADP) menjadi Area Program (AP). Secara prinsip pendekatan kedua program ini tak jauh berbeda. Persiapan deregistrasi World Vision semakin mendekati puncaknya. Dalam masa ini kemitraan dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah semakin diperkuat. WVI mulai menandatangani MoU dengan berbagai Kementerian Departemen, serta dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya. Dalam hal pendanaan, WVI giat menginisiasi berbagai program pendanaan lokal seperti #BeraniMimpi dengan mengangkat tokoh atau artis sebagai “*brand of hope*”. Pada masa ini WVI melakukan terobosan dengan melaksanakan program berbasis teknologi seperti mPosyandu, LMMS, dll.

Puncaknya adalah deregistrasi World Vision dari Indonesia. WVI menjadi entitas nasional berbadan hukum yang menjadi satu-satunya mitra World Vision di Indonesia.

Memperkuat Kemitraan & Tantangan Masa Depan



WVI kini menjadi representasi tunggal World Vision di Indonesia. Setelah berjalan selama 60 tahun di Indonesia dan 70 tahun secara internasional, tantangan-tantangan ke depan sudah menanti WVI.

Selain menaati prinsip-prinsip utama dalam kemitraan lokal dan *global* seperti sudah dituliskan pada beberapa bab awal, yang tak kalah penting adalah bagaimana WVI tetap memelihara nilai-nilai dasar, visi dan misi agar tetap relevan dalam perubahan yang terus-menerus terjadi.

“Salah satu tugas utama kita adalah memelihara visi awal lembaga ini, tetapi pada saat yang sama terus melakukan interpretasi agar pelayanan WVI tetap relevan dalam perubahan yang terjadi di Indonesia maupun Asia Pasifik,” kata Trihadi Sptoadi seperti dikutip dari buku *World Vision Setengah Abad Melayani di Indonesia*¹.

Trihadi yang kini menjadi anggota *board* WVI periode 2019-sekarang dan Direktur Eksekutif Tahija Foundation menuliskan 5 tantangan besar yang dapat menjadi kekuatan pendorong (*driving force*) bagi pelayanan WVI² ke depan. Kelima tantangan besar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan lalu-lintas manusia

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia dan juga Indonesia telah melahirkan kelas sosial baru. Pendidikan yang makin merata dan berkualitas membawa dampak meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan lapangan kerja jumlah pencari kerja. Lalu lintas manusia antar negara, pertumbuhan kota dan urbanisasi yang sangat cepat akan membawa kesempatan pembangunan yang baru. Namun semua ini juga akan membawa tantangan-tantangan pembangunan kemanusiaan yang semakin kompleks. Dibutuhkan NGO-NGO yang mampu bekerja lintas batas negara dan dapat menangani wajah kemiskinan perkotaan yang kompleks.

2. Hubungan sosial yang semakin kompleks

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan miskin. Kesenjangan dan ketidakadilan ini juga dibarengi dengan tumbuhnya sikap dan perilaku sektarian dan radikalisme agama yang akan menjadi tantangan besar pembangunan manusia. Masih banyak penindasan terhadap kelompok sosial yang lemah terutama perempuan dan anak-anak. NGO di masa depan bukan hanya bekerja mendampingi yang miskin, namun juga membangun kesetiakawanan sosial dari mereka yang kaya dan beruntung. Pola pembangunan yang mengedepankan sikap inklusif dan perdamaian sangat diperlukan untuk membangun jembatan sosial ini.

3. Proses demokratisasi

Proses demokratisasi politik dan liberalisasi ekonomi di Indonesia dan juga di Asia Pasifik akan sulit ditahan lagi. Kemampuan negara dan masyarakat sipil mengelola perubahan ini akan menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Korupsi akan menjadi hambatan terbesar. Kemajuan teknologi informasi juga memberikan kesempatan baru untuk menjembatani kesenjangan kesempatan bagi mereka yang miskin dan tertinggal. NGO seperti World Vision harus berani menyuarakan perlunya sistem ekonomi *global* yang lebih adil dan pada saat yang sama ikut alam usaha memberikan akses keuangan, teknologi, dan pasar yang adil bagi yang miskin untuk berusaha secara layak.

4. Lingkungan hidup

Pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup konsumtif akan memberi tekanan pada kualitas lingkungan hidup kita. Dampak perubahan iklim bukan lagi hanya mitos namun sudah dirasakan di seluruh dunia. Kelompok yang paling menderita karena terkena dampak ini adalah kelompok yang paling miskin. Pendekatan dan strategi pembangunan yang tidak berdamai dengan lingkungan akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. NGO harus mulai melakukan adaptasi dan bahkan mitigasi yang dipadukan dengan usaha pengembangan masyarakat di tingkat akar rumput maupun gerakan advokasi di tingkat *global*.

5. Kerawanan bencana

Indonesia terletak di kawasan rawan bencana yang dijuluki *ring of fire*. Gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana lainnya akan terus menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kemampuan untuk ikut membangun masyarakat tahan bencana dan mampu melakukan tanggap darurat akan terus menjadi tantangan bagi pengembangan kapasitas organisasi kemanusiaan yang bekerja di Indonesia. WVI bertekad untuk terus membangun kemampuannya di bidang manajemen penanggulangan bencana dan mendorong masyarakat meminimalkan dampak bencana. Pada saat yang sama, organisasi juga harus terus meningkatkan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana.

Menjalin Kemitraan

Tantangan-tantangan besar di atas jelas tidak bisa ditangani sendiri oleh WVI. Apalagi saat ini politisasi agama kian menyempitkan ruang-ruang kemanusiaan. Lembaga seperti WVI bisa saja disalahpahami—dan sering terjadi—karena latar belakang Kristen yang diembannya.

Sebab itu, jalan yang ditempuh WVI, antara lain dengan menjalin kemitraan dengan semua pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk para pendukung dana, mitra kerja, masyarakat dan pemerintah patut diapresiasi.

Pemerintah adalah pendukung sekaligus juga penguat bagi upaya WVI menjalankan programnya, terutama untuk kesejahteraan anak-anak, perempuan dan masyarakat pada umumnya. Sebab itu, WVI akan selalu memastikan program-programnya sejalan dengan apa yang menjadi garis besar arah pembangunan dan rencana strategis pemerintah.

“Misalnya, pemerintah akan membangun Kabupaten/ Kota Layak Anak. WVI menangkap bahwa pemerintah punya visi untuk anak-anak agar mereka mendapatkan lingkungan tempat tumbuh kembang yang optimal. Kita memastikan, mendukung dan menggunakan arah tersebut sebagai payung dalam program-program WVI. Arah yang hendak dituju WVI dan pemerintah adalah mendukung Kota Layak Anak atau Kabupaten Layak Anak dengan berbagai indikatornya. Visi pemerintah sesuai dengan visi misi WVI,” kata Doseba T. Sinay, CEO dan Direktur Nasional WVI periode 2015-2021.

Menurut Ote, demikian Doseba T.Sinay disapa, pemerintah membangun kebijakan dan WVI memastikan programnya sejalan dengan kebijakan tersebut.

Sebagai penguat pemerintah, berarti WVI menjadi mitra yang kritis. Tidak hanya melakukan kritik terhadap yang salah, namun terutama memberikan solusi. Ote mengambil contoh di Papua. Pemerintah dan WVI bekerja sama membangun pendidikan pada tingkat sekolah dasar, yakni agar anak-anak memiliki kemampuan dasar baca-tulis-hitung. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan ini menjadi payung bagi program-program pendidikan yang dilaksanakan WVI.

“Kami adalah mitra pemerintah dalam mendukung program membangun pendidikan dan kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan. Pemerintah adalah mitra WVI,” ujarnya.

Pendidikan di Papua menurut Ote tetap menjadi prioritas WVI dalam 10-15 tahun ke depan. WVI akan hadir dan terus membantu anak-anak agar fasih dalam aspek baca-tulis-hitung maupun dalam program lain yang dapat membantu ekosistem yang menguatkan mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Kemitraan menurut Ote menjadi sebuah pendekatan baru. WVI tidak datang dan menyodorkan proposal dana, namun datang menawarkan misi bersama untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu anak-anak di daerah tertinggal.

“Dari semula WVI tidak mau dianggap datang minta dana, tetapi membawa visi bersama untuk kesejahteraan anak. Jadi kita jalan sebagai mitra dalam program tersebut,” kata Ote.

Dalam tanggap bencana di Lombok dan Maluku misalnya, WVI bermitra dengan toko ritel perabot rumah IKEA yang menyumbangkan tenda *knockdown* untuk kelas-kelas darurat. IKEA melakukannya, kata Ote, karena memiliki visi yang sama yakni peduli pendidikan.

“IKEA memiliki *concern* yang sama dengan WVI agar dalam situasi tanggap bencana anak-anak bisa tetap sekolah. IKEA memiliki teknologi untuk membangun sistem kelas-kelas *knockdown*, sementara WVI memiliki kompetensi respons bencana. Kita hadir di sana dan menjadi fasilitator untuk bertemu masyarakat dan memastikan bantuan ini diterima dengan baik, dijaga bersama, dikelola, dipelihara dan digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan anak-anak,” jelasnya.



Ote bersama anak-anak di Ruang Sahabat Anak dalam Respons Gempa Lombok, 2018.

Rencana Strategis 2020-2030

Rencana strategis WVI mengacu kepada apa yang menjadi arahan dari *global strategy* dari World Vision dan apa yang akan menjadi strategi nasional di WVI.

Secara garis besar WVI tetap melayani di area tertinggal dan miskin sesuai indikator-indikator kemiskinan yang berlaku.

“Ada banyak kantong kemiskinan di Indonesia karena pembangunan ekonomi yang tidak merata,” kata Ote. WVI akan memberikan perhatian dan tetap fokus kepada anak-anak yang rentan dan kantong-kantong kemiskinan tadi.

Digital Partnership and Innovation (DPI) yang telah dibangun WVI adalah departemen untuk membangun *Ministry Funding Strategy* 2021-2025 sebagai strategi fungsional, sebagai turunan dari *Country Strategy* 2021-2025.

Menurut Candra Wijaya, *Ministry Funding Strategy* ini secara serius dikembangkan sejak November 2020 untuk memetakan daya tarik dan posisi kompetisi di industri kemanusiaan pada tingkat makro dan mikro, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang external serta kekuatan dan kelemahan internal.

Strategi ini telah mendapat masukan dari berbagai pihak lintas unit dan departemen di dalam WVI. Juga memperoleh masukan dari World Vision International. Pada bulan April 2021 telah siap diimplementasikan sesuai pilihan produk (program) kesejahteraan anak yang kontekstual.

Pandemi COVID-19

Tak disangka, pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia. Banyak hal berubah dari hidup manusia. Kebiasaan-kebiasaan baru bermunculan, terutama untuk terhindar dari virus mematikan tersebut.

Menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker menjadi "hukum" baru yang perlu ditaati. Metode kerja *Work from Home* menjadi kebiasaan. Demikian pula yang dialami oleh WVI. Meskipun demikian, lembaga ini tak angkat tangan menyerah. Mereka tetap berkarya secara produktif dan efisien di tengah pandemi demi mendukung pemerintah menghadapi pandemi.





Sampai dengan tahun 2020, WVI mendampingi anak, keluarga, masyarakat di 58 Kabupaten/Kota, 136 Kecamatan dan 656 Desa melalui 127 proyek pengembangan masyarakat berfokus pada anak. Lebih dari 451.498 orang merasakan manfaat langsung dari pendampingan WVI di berbagai bidang sepanjang tahun 2020³.

Dengan memprioritaskan kesehatan dan keamanan staf, WVI terus berupaya menjalankan program di tengah pandemi yang melanda Indonesia. Antara lain membangun 1.227 sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di berbagai fasilitas publik (puskesmas, stasiun, kantor desa, dll) untuk mendukung pemerintah mengatasi pandemi COVID-19.

Pada bidang pendidikan, 6.258 guru menerima pelatihan Belajar dari Rumah (BdR) dan 33.451 anak difasilitasi untuk belajar aktif di rumah melalui distribusi paket buku cerita, radio, dan materi rekreasional. Sebanyak 53 Forum Anak didampingi untuk terus terlibat dalam penelitian, kampanye dan diskusi publik guna mendorong lahirnya praktik dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Tahun 2020 WVI semakin intensif melibatkan anak dalam kegiatan perumusan kebijakan dari level daerah hingga level nasional. Sepanjang tahun 2020 lebih dari 1.5 juta orang mendapatkan manfaat dari pendampingan program tanggap bencana termasuk di dalamnya program respons COVID-19. WVI dengan semangat melayani anak dan masyarakat yang paling rentan, terus berupaya melakukan program pendampingan di banyak wilayah dengan konteks yang berbeda-beda.

Selain itu, untuk pertama kalinya, WVI mendapat kepercayaan untuk mengelola dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Organisasi Penggerak (POP). Area Program Alor mendapat kepercayaan untuk mengelola dana dari APBD dan kemitraan lainnya.

¹ World Vision Setengah Abad, hal.xvi-xvii

² Ibid hal. xvi-xvii

³ Sambutan Doseba T. Sinay, CEO dan Direktur Nasional WVI dalam "Laporan Tahunan 2020"

Kesaksian Dari Garis Depan

Grace Hukom⁹

**Direktur Program Transformational Development
WVI Periode 2009 - 2016**

WVI adalah lembaga pelayanan kemanusiaan yang memakai pendekatan Transformational Development (TD) pada banyak programnya di lapangan. Iman Kristen menjadi landasan dalam pelayanan mereka.

⁹Saat ini menjabat Program
Director ChildFund International
di Indonesia



Grace Hukom bersama dengan anak-anak terdampak gempa dan tsunami Aceh tahun 2004.

Iman Kristen menjadi landasan dalam pelayanan mereka. WVI tidak sekadar datang membawa program, namun memicu kesadaran dan melahirkan kemandirian pada masyarakat yang menjadi tujuan.

WVI misalnya mengupayakan air bersih. Mereka tidak berhenti menjawab isu fisik bahwa air telah tersedia. Sebab semua agensi bisa melakukan hal yang sama. Namun WVI sampai pada tahapan, apakah masyarakat merasa bersyukur dengan air yang tersedia itu, karena bisa menghidupi diri mereka selanjutnya? Apakah masyarakat menyadari bahwa mereka telah terbebaskan dari penindasan orang yang dulu menguasai air? Transformasi terjadi pada titik ini!

Kami pernah membangun pipanisasi air di wilayah Sumba Barat, NTT. Kita jangan lupa bahwa tanah-tanah yang harus dilalui untuk pemasangan pipa itu milik tuan tanah. Tanpa melibatkan mereka, pengembangan transformasi tidak bisa terjadi. Para pemilik tanah ini perlu disadarkan bahwa dengan merelakan tanah mereka dilalui oleh pipa, maka mereka sudah melayani sesamanya yakni rakyat miskin yang tidak punya akses terhadap air bersih. Kami bisa saja langsung menarik pipa sesuai perintah kepala desa. Tetapi yakinlah, tiga sampai empat tahun kemudian pipa bisa hancur dipotong-potong. Tantangan TD di sini. Kalau sekadar kerja melakukan proses pengembangan, itu gampang.

Dalam TD selalu dipegang prinsip: Masyarakat jangan dijadikan "objek" yang terus ada, supaya kita bisa terus mendapatkan sponsor dan bisa juga hidup dari sana. Pengembangan transformatif harus membuat masyarakat sadar bahwa mereka telah dimerdekakan dari masa lalu yang mengungkung. Mereka akan berseru, "Kami telah merdeka!" Atau berkata, "*We know who is our Lord.*" Karena Tuhan telah membebaskan mereka dari relasi yang buruk dengan diri sendiri, relasi yang buruk dengan sesama, tidak memperlakukan alam semena-mena, dan kini mereka telah merdeka untuk berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik.

Pertanyaan untuk mengukurnya mudah, yakni: Apakah masyarakat yang pernah kita bantu, dan kemudian kita tinggalkan, merasa bersyukur bahwa kita pernah hadir di sana? Apakah mereka merasa telah dimerdekakan dari keterbelakangannya? Atau jangan-jangan kita justru membuat mereka semakin tergantung dengan bantuan?

Pengembangan transformasional memang perlu waktu yang lama untuk bisa melihat hasilnya. Dan kebanyakan kita tidak betah dengan itu. Kita mau yang instan saja. Banyak orang tidak sabar dengan proses. Dan banyak yang tidak mau menerima karena prosesnya yang panjang itu. WVI adalah lembaga yang taat dalam proses ini.

Saya selalu bilang, WVI bisa bertahan selama puluhan tahun seperti sekarang ini oleh karena mereka menyadari pelayanan ini milik Tuhan. WVI bertahan bukan karena siapa yang menjadi direktornya atau siapa stafnya, dan lain-lain.

Saya kasih contoh. Tahun 1997 terjadi kelaparan di Karubaga, Pegunungan Tengah, Papua. James Tumbuan yang menjadi direktur nasional kala itu. WVI mau melakukan respons bencana dengan rencana akan mengirimkan obat-obatan dan makanan. Tetapi kita tidak punya uang. Yang bisa dilakukan adalah kami masuk ke dalam ruangan dan mulai berdoa. Mohon kepada Tuhan, kalau Ia berkenan warga bisa memakai WVI sebagai perpanjangan tangan-Nya untuk menyalurkan bantuan. Tuhan berkenan membuka jalan. Tentu saja setelah itu kami tidak tinggal diam.

Tak disangka, setelah berdoa itu, telepon berdatangan dari mana-mana. WVI diminta datang mengambil obat-obatan. Datang mengambil bahan pangan dan pakaian. Semua yang dibutuhkan untuk respons bencana tersedia dalam waktu relatif singkat. Ada juga sumbangan uang yang cukup untuk kita kirimkan ke Papua. Proses-proses seperti inilah yang saya alami. Terjadi dari waktu ke waktu.

Tahun 1998 krisis datang. Kita mau membantu tapi juga tidak ada dana. Kami berdoa, minta Tuhan sendiri menuntun dan membuka jalan. Tiba-tiba bantuan datang kayak angin ribut. Sampai kita perlu tambah staf untuk mengurus semuanya. Dari 200 orang naik menjadi 1.000 orang. Kita merekrut anak-anak muda terbaik.

Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Semua ini terjadi karena WVI taat pada visi-misi yang sudah Tuhan berikan. Taat pada *core value*-nya. Taat pada mandatnya yakni, bergantung kepada Tuhan!

Saya selalu bilang: Kamu boleh pintar, boleh hebat. Tapi kalau kamu mengandalkan diri sendiri, kamu nggak ada apa-apanya. Sebab semua orang bisa bikin proposal. Teman-teman pasti jago bikin proposal. Tapi kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita tak ada apa-apanya.

Semua uang yang “datang” itu kan bukan uang WVI. Semua itu titipan para pendonor, agar kita melakukan pengembangan transformasional tadi.

Dalam rancangan seperti itulah yang membuat WVI bertahan sampai sekarang dan nanti. Saya sangat yakin!

Mau lembaganya berubah, pimpinannya siapa pun, selama takut akan Tuhan dan organisasi berjalan sesuai mandat-Nya, WVI akan tetap ada.

Asih Silawati
Area Program Manager Jakarta

Saya bekerja di WVI sejak tahun 2003 dengan tugas pertama saya di Sumba Timur sebelum akhirnya pindah ke Cawang dan Urban Jakarta hingga sekarang.



Asih bersama dengan anak-anak di Urban Jakarta

Saya senang bekerja di WVI karena kami bisa menjadi penyalur berkat dari donor dan sponsor kepada anak dan masyarakat. Di sini saya juga belajar soal pengembangan masyarakat. Dari sini saya tahu bahwa pengembangan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang melibatkan mereka untuk menemukan permasalahan yang mereka hadapi dan mencari solusi dari sumber daya yang mereka miliki.

Pengembangan masyarakat bukan hanya bicara soal permasalahan tapi bersama masyarakat, kita bersama membangun mimpi mereka, membangun harapan mereka tentang bagaimana masyarakat dan anak-anak dapat hidup lebih sejahtera, terpenuhi kebutuhannya dan dapat mengakses semua standar atau pun pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Program pengembangan masyarakat tentunya menjadi program, metode, tools atau pendekatan bagi orang di luar komunitas masyarakat tuntut mendorong masyarakat setempat supaya berdaya dan bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan sumber daya yang mereka punya sendiri.

Menurut saya, program pengembangan masyarakat dipilih karena WVI adalah organisasi eksternal yang berada di luar masyarakat. Kita, sebagai organisasi, memiliki keterbatasan waktu dalam mendampingi mereka dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita hanya mendampingi beberapa saat dan pindah ke wilayah lain untuk mengembangkan masyarakat lainnya. Menurut saya program pengembangan masyarakat sangat baik karena tujuan dari program ini supaya dimiliki oleh masyarakat sehingga program bisa tetap sustain dan berlanjut. Untuk melakukan program ini, kita tidak hanya melibatkan masyarakat dan anak di wilayah tersebut namun juga pemangku kepentingan seperti pemerintah lokal dan lembaga lokal di sekitar masyarakat. Bersama kita bisa membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Tujuan dari program pengembangan masyarakat yang dilaksanakana di berbagai area termasuk Jakarta tentunya sesuai dengan visi misi WVI yaitu mewujudkan hidup utuh sepenuhnya bagi anak-anak. Program WVI juga bertujuan untuk memperkuat masyarakat dan mendampingi mereka dalam memperjuangkan hak-hak anak karena mereka adalah pemimpin masa depan sebuah bangsa. Tentunya, tujuan program pengembangan seperti yang kita ambil di Jakarta ini tidak hanya mengembangkan secara fisik namun juga transformasional dan holistik. Yang mengalami transformasi bukan hanya masyarakat dan anak-anak yang kami layani namun kami sebagai staf juga mengalami transformasi tidak hanya secara fisik namun juga spiritual.

Dalam pemberdayaan masyarakat ini ada banyak kegiatan yang kami selenggarakan bersama masyarakat dan juga anak-anak antara lain menggali masalah dan potensi bersama-sama dengan masyarakat. Berdiskusi tentang masalah dan keberhasilan di wilayah mereka serta identifikasi sumber daya lokal yang mereka punya termasuk kapasitas serta menggali bersama anak dan masyarakat yang dirumuskan dalam program kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan program pengembangan masyarakat ini, banyak pengalaman berkesan yang saya dapat terutama perubahan positif yang kita lihat pada masyarakat dan anak-anak yang didampingi. Salah satu anak dampingan WVI di Kramat Jati, Jakarta Timur bernama Agus sekarang menjadi ASN di Lampung. Ibunya seorang penjual sayur di pasar. Namun anak ini tak pernah menyerah dan dulu sangat aktif di Forum Anak. Selain Agus, ada beberapa anak lain yang diterima kuliah dengan beasiswa. Perubahan positif lain juga ada pada salah satu pengusaha yang dulu didampingi WVI. Namanya Ibu Sri. Dulu WVI memberikan Ibu Sri *capacity building* sehingga beliau bisa terus maju dengan usahanya. Sekarang usahanya sangat maju. Bersyukur beliau menerapkan *value* yang diterapkan WVI, peduli pada orang lain. Waktu bencana gempa bumi di Sulawesi Barat, Ibu Sri menyumbangkan 500 keping *puzzle* untuk para penyintas terutama anak-anak. Ibu Sri adalah salah satu contoh mutiara yang ada di dasar laut yang kita temukan. Saat dipoles, mutiara ini bisa memancarkan kecantikannya berupa potensi yang mereka punya.





Marcel Sinay

Advocacy Coordinator, PHINLA Project

PHINLA Project adalah program pengelolaan sampah yang dilakukan pada tiga negara (Filipina, Indonesia, Sri Lanka).

Saya bergabung dengan WVI sejak tahun 2010. Penugasan pertama di Rote, Nusa Tenggara Timur lalu pindah ke Nias dan kini berada di Jakarta.

Saya lulus dari fakultas Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung. Meski latar belakang saya adalah sains, namun saya terpanggil untuk bekerja di bidang sosial karena tertarik dengan pengembangan masyarakat. Waktu itu saya belum mengerti tentang pengembangan masyarakat, dan berharap dengan bergabung ke dalam WVI saya bisa menjalankan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Akhirnya keinginan saya terwujud dan sampai sekarang saya sudah 10 tahun 2 bulan bekerja bersama WVI.

Dalam pengalaman saya, pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh WVI sangat baik karena memakai model intervensi atau pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Metode ini membuat masyarakat tidak hanya diam, namun mereka diajak terlibat secara aktif. Merekalah yang merencanakan dan menjalankan program tersebut. Masyarakat adalah pemain utama dan subjek program sosial yang berlangsung.

Tujuan akhirnya tentu saja masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Jika pada awalnya masyarakat seperti tidak berdaya oleh pelbagai hambatan, kini mereka memiliki kekuatan untuk bisa mandiri dan meraih keberhasilan dengan upaya sendiri.

Sebab itu sangat tepat menurut saya ketika WVI memilih pengembangan dalam jangka waktu yang panjang yakni 10-15 tahun. Selain bisa mendampingi masyarakat sampai bisa mandiri, kelak ketika WVI keluar dari sana masyarakatlah yang secara mandiri melanjutkan program tersebut di wilayah mereka. Sebab semua program WVI baik itu pada sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan ekonomi, semua ditujukan agar masyarakat dapat mandiri dan mereka memiliki pola pikir yang ramah terhadap anak. Diharapkan dampak dari program tersebut dapat berlanjut pada generasi-generasi berikutnya.

Berdasarkan pengalaman selama delapan setengah tahun di Nias, WVI memang tidak bisa bergerak sendiri. WVI perlu bermitra dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga agama, lembaga masyarakat, sekolah-sekolah dan terutama masyarakat sendiri. Tanpa kemitraan ini hasil yang dicapai tak akan maksimal.

Ketika di Nias saya melihat banyak perubahan terjadi pada masyarakat melalui program pengembangan yang dilakukan. Saya melihat banyak ibu balita yang akhirnya mengerti tentang makanan bergizi untuk anak-anak dan keluarganya. Banyak PAUD bisa berdiri berkat campur tangan warga. Forum Anak mulai aktif. Anak-anak mulai berani tampil menyuarakan suara mereka di berbagai forum, baik di desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi, bahkan ke dunia internasional. Salah satu anak Nias pernah berbicara dalam sebuah forum internasional di Belgia.

Perubahan dalam diri anak-anak ini membuat mereka tak sungkan menyampaikan keresahan atau pemikirannya dengan baik kepada orang dewasa, baik di dalam keluarga maupun di forum-forum. Perubahan dalam diri anak-anak ini sangat berkesan buat saya.

Tepat sebelum proyek di Nias berakhir, satu desa bisa mendeklarasikan diri untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Peristiwa ini sangat bersejarah. Sebab tidak mudah membuat orang-orang di desa tersebut tidak buang air besar sembarangan. Namun dengan pendekatan dan penyadaran, mereka dengan bangga berhasil melakukannya. Mereka mendeklarasikan diri Stop BABS.

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, desa tersebut adalah desa pertama di Pulau Nias yang diverifikasi bisa melakukan Stop BABS.



Margarettha (dua dari kiri)
saat berada di Pakistan

Margarettha Siregar

Humanitarian and Emergency Affairs Director

Ketika di Wahana Visi Indonesia (WVI) saya bertemu dengan orang-orang asing yang mau datang ke Indonesia dan bekerja di WVI, saya menemukan banyak hal baru saat berbagi pengalaman dengan mereka, seperti perkembangan kegiatan kemanusiaan di negara lain, bahkan di tingkat *global*, juga perbedaan budaya yang bisa saling memperkaya.

Mereka juga mau belajar mengenai budaya di Indonesia, bersama belajar bagaimana mengkontekstualisasikan standar dan prinsip kemanusiaan internasional dan *global* dalam kondisi Indonesia yang majemuk dan sedang berkembang.

WVI mengadakan berbagai pelatihan mengenai standar kemanusiaan, standar program, akuntabilitas dan juga hal-hal baru yang terjadi secara *global* yang dapat mempengaruhi Indonesia, yang banyak dilakukan oleh tenaga asing yang sudah mendalami hal tersebut sebelumnya di negaranya maupun di tingkat *global*. Hal ini sangat membantu staf untuk bisa melakukan program bersama masyarakat dengan pendekatan yang baru yang diharapkan memberikan pencapaian lebih baik.

Beruntung, saya juga diberi kesempatan untuk berbagi ke negara-negara lain yang juga sedang bergelut dalam tanggap kemanusiaan, seperti bencana banjir di Pakistan tahun 2010, tanggap kemanusiaan di Turki dan Yordania pada tahun 2013 bagi para pengungsi dan masyarakat Suriah di perbatasan. Segala yang sudah saya pelajari saat masih bekerja di Indonesia, bisa saya terapkan di negara-negara tersebut. Termasuk mentransfer ilmu dan pengalaman ke rekan-rekan sekerja di negara tersebut yang baru atau bahkan belum pernah bekerja dalam tanggap bencana. Sebaliknya, saya sendiri bisa belajar banyak hal baru, seperti budaya, bahasa, serta pendekatan-pendekatan kontekstual yang berbeda dari Indonesia. Semua itu memperkaya saya, sehingga bisa meningkatkan kinerja maupun kelenturan saya dan organisasi dalam berbagai situasi dan tantangan yang berbeda-beda.

Mual Situmeang

Community Engagement and Sponsorship Planning Specialist

Merupakan sebuah pengalaman berharga bagi saya karena bisa melayani di World Vision Laos tepatnya di Kota Vientiane, Laos.



Mual (kelima dari kanan) bersama tim dari WV Laos.

World Vision Laos merupakan salah satu dari 12 kantor nasional yang mendapat perhatian besar dari kantor regional World Vision Asia Pasifik. Sekitar tahun 2009 hingga 2014 Saya mendapat kesempatan bekerja di Vientiane, kantor World Vision Laos yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam program *sponsorship*. Ini merupakan kesempatan yang kedua bagi saya bekerja di negara lain membantu pengembangan kapasitas staf *sponsorship*.

Berbeda dengan penugasan pertama saya di World Vision Kamboja yaitu membangun program *sponsorship development* dimulai dari tahap awal ketika mereka transisi dari program *emergency relief* ke *development*, sedangkan di World Vision Laos saya mendapat tugas untuk membangun kapasitas staf di kantor nasional dan juga di kantor lapangan dalam mengantisipasi pertumbuhan program *sponsorship*. WVI sebagai kantor nasional yang sudah berpengalaman panjang dalam program *sponsorship* menjadi *resource* strategis bagi kantor regional untuk mendukung kantor nasional di wilayah APRO. Oleh karena itu kantor regional APRO sering meminta WVI untuk membantu berbagai kantor nasional yang baru memulai program *sponsorship* atau juga memperkuat program *sponsorship*. World Vision Nepal, WV Papua New Guinea, World Vision India, World Vision Myanmar, dan World Vision Timor Leste merupakan negara yang pernah mendapat dukungan dari WVI. Penugasan dalam 10 terakhir ini adalah di World Vision Laos. Banyak staf baru yang membutuhkan pendampingan dan kapasitas teknis sehingga seluruh kepemimpinan di kantor nasional dipegang oleh tenaga asing dari berbagai negara.

Pada *sponsorship department* saya ditugaskan untuk melatih *sponsorship manager* dan timnya dalam mengelola *sponsorship*. Di samping itu juga memberikan konsultasi dan advis strategis kepada manajemen World Vision Laos terkait pertumbuhan program *sponsorship* dan juga mengintegrasikannya dalam operasional program yang sudah ada. Proses pendampingan yang saya lakukan di kantor nasional dan juga kantor lapangan sebenarnya hanya sebuah proses berbagi pengalaman kerja yang pernah saya jalani di WVI.

Beragam kesempatan belajar melalui peran dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh manajemen WVI adalah basis utama saya untuk bagikan kepada teman-teman di negara lain. Di samping itu rangkaian peningkatan kapasitas melalui *training*, *exposure*, dan penugasan khusus sangat bermanfaat memperkuat kapasitas serta menambah wawasan yang lebih luas terhadap pekerjaan. WVI juga merupakan kantor nasional yang terdepan dalam program *sponsorship* di wilayah Asia Tenggara sehingga pembelajarannya menjadi referensi bagi kantor nasional yang relatif masih muda. Sungguh menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya dapat meninggalkan World Vision Laos karena mereka sudah mandiri dapat mengelolanya dengan baik.

Fachruddinsyah

Connectivity Analyst / Digital Workspace Analyst

Saya akrab disapa Ade. Saya bekerja di WVI sejak tahun 2007. Pertama kali bergabung saat WVI masih ada di Aceh dalam masa transisi respons tsunami Aceh. Setelah tiga tahun di Aceh, saya sempat bekerja di Kantor Nasional selama enam bulan sebelum akhirnya pindah ke Papua selama lima tahun, lalu ke Palu selama dua tahun.



Ade (paling kanan) bersama rekan-rekan WVI di Aceh.

Tiga tahun terakhir ini saya kembali ke Kantor Nasional sebagai staf pada Departemen IT.

Saya terdorong untuk bergabung bersama WVI karena sebagai seorang Putra Aceh saya ingin membantu pemulihan daerah saya yang terdampak tsunami waktu itu. Saya tidak memiliki banyak uang dan kekuatan, namun saya punya kemampuan di bidang IT dan butuh wadah untuk menyalurkan kemampuan saya ini. Sebelum bergabung dengan WVI saya sempat bergabung dengan NGO lain seperti GTZ dan Oxfam. Saya pikir saya hanya bertahan setahun saja di WVI, seperti pada NGO sebelumnya. Ternyata saya salah. Kini, lebih dari 10 tahun saya masih bertahan di WVI.

Salah satu alasan saya bertahan adalah karena WVI memiliki suasana kerja yang berbeda. Kami akrab satu sama lain, meski hanya sebatas rekan kerja. Waktu itu, Pak Suryanto, manajer IT yang juga atasan saya, sangat baik dan peduli terhadap saya.

Waktu pindah ke Jayapura, Papua, saya satu-satunya staf beragama Islam di sana. Namun teman-teman dengan hangat menyambut kehadiran saya. Saya mendapat banyak saudara dan bapak angkat di sana meski berbeda suku, ras, dan agama. Meski berbeda, tetapi itu tidak menjadi halangan buat kami untuk saling mengenal.

Jujur waktu pertama kali bergabung, saya sempat kuatir. Kemana nantinya hasil karya pekerjaan saya dibawa? Akankah digunakan untuk keperluan tertentu yang berpengaruh buruk pada saya? Ternyata semua pertanyaan saya tersebut terjawab dari hari ke hari. WVI tidak membawa pengaruh buruk buat pekerjaan saya. Meski WVI adalah lembaga berbasis keyakinan Kristen namun saya kembalikan lagi kepada diri saya. Sebagai seorang Muslim saya tidak terpengaruh. Dulu waktu Aceh dilanda tsunami, banyak orang asing dari berbagai latar belakang keyakinan dan suku tetap membantu. Ini berarti mereka tidak memandang perbedaan agama. Meski berbeda agama saya tetap berteman akrab dengan mereka. Saya terbiasa menyaksikan teman-teman berdevosi. Mereka juga kadang mengingatkan saya untuk sholat jika jamnya sudah tiba. Ini adalah sebuah anugerah buat saya. Berbeda namun saling menerima.

Dengan devosi serta kebiasaan teman-teman WVI untuk beribadah, saya termotivasi untuk semakin tekun juga dalam menjalankan ibadah saya. Apakah saya sudah sholat tepat waktu? Apakah saya menjalankan nilai-nilai ibadah saya yang lain? Akhirnya saya terdorong untuk refresh diri dan meningkatkan ibadah saya.

Sebagai seorang staf IT, saya paham bahwa kemampuan saya juga harus meningkat seiring kemajuan zaman. Sebenarnya ini sudah terjadi saat saya bergabung dengan WVI pada 2007 lalu. Waktu itu atasan saya adalah orang asing, jadi saya juga harus meningkatkan keahlian saya dalam menggunakan Bahasa Inggris untuk komunikasi. Kemudian waktu saya dipindah ke Papua, saya langsung bertugas untuk menyelesaikan permasalahan *sponsorship* dalam waktu yang cepat. Dengan bantuan teman-teman, perlahan saya bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Saat saya kembali ke Kantor Nasional, saya juga harus mengikuti transformasi digital dari sistem lama ke sistem baru untuk pelayanan yang lebih baik. Sekarang saya harus mengurus konektivitas untuk seluruh Area Program dengan menguasai beberapa teknik informasi saat ini.

Banyak pelayanan WVI yang berkesan buat saya. Salah satunya adalah program *sponsorship*. Di negara kita, masih banyak anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau bukan kita yang membantu mereka lewat program *sponsorship*, siapa lagi yang bisa membantu mereka di tempat asal mereka?

Pada sisi pengembangan ekonomi, saya terkesan dengan cara organisasi ini bekerja. Dulu saya pernah mengikuti acara saat ibu-ibu rumah tangga dilatih untuk mengelola keuangan mereka dan membuat donat yang unik serta memiliki nilai jual. Tak hanya itu mereka juga dilatih tentang manajemen keuangan termasuk menyalurkan dan menggunakan uang di rumah tangga. Menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa.

Dalam respons bencana, karena saya banyak terlibat untuk respons, saya juga belajar bahwa bencana memang membuat orang terdampak menjadi miskin. Saya bersyukur bisa terlibat dalam respons, karena saya belajar hal-hal baru seperti Bantuan Nontunai serta sistem lain yang digunakan supaya hasilnya lebih cepat.

Radika Pinto

General Manager Zonal Sulawesi dan Maluku

Selama 15 tahun, saya bekerja di WVI (sejak 2006) dengan memulai karir sebagai *Monitoring and Evaluation Coordinator* di Jayapura, Papua. Saya juga pernah bekerja selama 11 tahun di pesisir Papua (Biak, Jayapura, Merauke, Keerom, Mappi, dan Boven Digoel).



Radika Pinto bersama anak-anak Papua.

Seperti melewati kawah candradimuka, di Papua saya sudah melihat semua permasalahan kompleks yang dialami oleh masyarakat: Masalah kesehatan, pendidikan, politik, fasilitas umum, dan lainnya. Saat awal berada di Papua, saya sempat bertanya kepada Tuhan, "Untuk apa semua ini?" Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kesehatan saja saya harus berpikir banyak. Namun di Papua pula, saya justru dibentuk oleh berbagai pengalaman dan pelatihan dari WVI.

Saya sarjana Teknik Perencanaan Kota, tapi di WVI saya belajar banyak pengetahuan lain: ASI Eksklusif dan HIV AIDS; menjadi *trainer* penyuluh HIV AIDS bersertifikat; pelatihan tentang malaria; tentang pendidikan dengan metode Aktif, Menyenangkan dan Efektif (MBS Pakem); tentang manajemen bencana, perlindungan anak, dan penguatan ekonomi keluarga. Selain itu saya juga belajar banyak tentang peacebuilding, bagaimana mempraktikkan *Do No Harm* di sebuah wilayah, juga belajar tentang kemitraan tiga tungku tokoh agama, adat dan pemerintah.

Berbeda dengan Papua. Wilayah Sulawesi dan Maluku lebih rentan terhadap bencana alam karena lokasinya yang berada di pusaran ring of fire. Semua bencana ada di sini termasuk gunung meletus, gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Wilayah ini juga memiliki latar belakang sejarah konflik etnis, agama, dan kepentingan beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, setiap staf dibekali dengan kapasitas manajemen bencana serta kapasitas untuk bekerja di wilayah dengan konteks agama yang berbeda.

Salah satu hal yang dicapai di regional Sulawesi dan Maluku, bisa dilihat di wilayah Parigi Moutong yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Banyak proyek yang berjalan baik di sana karena ada kemitraan dengan MUI, Yayasan Alkhairat dan bertemu dengan orang-orang yang tepat karena mereka tahu WVI tidak memiliki kepentingan syiar agama selain melakukan program pengembangan masyarakat.

Melalui bencana gempa bumi, tsunami serta likuifaksi pada tahun 2018, saya juga belajar banyak hal mengenai *partnership* atau kemitraan. Dalam perspektif WVI, bencana dua tahun lalu di Palu masuk dalam "Kategori 3" atau kategori bencana dengan skala respons besar karena jumlah korban, masyarakat terdampak dan kerusakan infrastruktur sangat masif. Melalui *partnership* World Vision, saat itu juga kita mampu merespons H+I bencana, dan mendapat dukungan dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Saya ingat sejumlah donor yang mendukung antara lain: ADH, UNICEF, WFP, AUSAID, Taiwan ICDF, USAID dan lainnya. Semua dukungan selama dua tahun (2018-2020) ini sangat membantu mengangkat beban anak dan masyarakat yang terdampak bencana. *Partnership* ini tidak hanya membangun kapasitas mereka namun juga mitra lokal kita termasuk lembaga agama dalam menghadapi ancaman-ancaman bencana berikutnya.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan buat saya terjadi beberapa waktu sejak bencana terjadi, Departemen Komunikasi dari Kantor Nasional mengontak saya dan Rina (manajer wilayah Sigi, Palu, dan Donggala waktu itu) sebagai narasumber utama dalam berbagai interview media. Dari sini saya sadar bahwa banyak orang luar baik di luar Sulawesi maupun luar negeri, peduli terhadap kondisi kami saat itu. Kami merasa tidak sendirian. Kami bertekad juga untuk segera melakukan respons bencana meski cukup rumit karena waktu itu kami juga merupakan *survivor* atau penyintas.

Selain itu, kerja sama atau *partnership* yang terjalin selama respons ini membuat kami *ter-update* dengan inovasi baru termasuk inovasi program dan pendekatan. Salah satunya adalah Bantuan Nontunai. Inovasi ini jika disandingkan dengan konteks kami di lapangan akan memunculkan kolaborasi yang baik dan menolong banyak anak dan masyarakat.

Kemitraan juga memberi dukungan anggaran yang besar, cakupan intervensi yang luas sehingga kami bisa bergerak di berbagai model. Dengan ini, intervensi diharapkan jauh lebih banyak dan luas serta memungkinkan pengembangan kapasitas mitra lokal.

Secara lokal kami bermitra dengan banyak pihak. Untuk lembaga agama, kami bermitra dengan MUI di Palu untuk modul pengasuhan dengan cinta dengan konteks Muslim, lalu bermitra dengan GMIH di Maluku Utara untuk mengembangkan gereja ramah anak.

Sementara untuk lembaga, kami bermitra dengan Daur Mala (Daulat Perempuan Maluku Utara) untuk perlindungan anak dan *livelihood*. Kami juga bermitra dengan Lembaga Hohidiai Maluku utara yang akan memperkuat program penanganan COVID-19.

Menurut saya, dari 60 tahun perjalanannya, World Vision sudah sangat serius dalam membesarkan WVI. Dalam 60 tahun kita melihat kemandirian dalam banyak hal termasuk *funding* dan sumber daya manusia. Saya yakin, setelah ini kita bisa sama-sama berjalan untuk memperkuat kemitraan lokal.

Hostia Kelo

Community Engagement and Sponsorship Plan Coordinator Kemitraan dan Dukungan Keluarga



Hostia sedang memberikan sosialisasi kepada remaja dalam acara Pertemuan Remaja.

Hostia Yulian Christy Kelo (55) bergabung dengan World Vision International Indonesia melalui Badan Kerjasama Yayasan Immanuel, Yayasan Tunas Harapan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan Prokesmas Bala Keselamatan Palu, sebagai *Project Correspondence Analyst* (PCA) pada tahun 1992. Tahun yang sama ketika anak pertamanya lahir.

Tahun 1999 WVI melalui mitranya, WVI, mulai melakukan pendampingan masyarakat secara langsung di wilayah Kabupaten Poso. Hostia ikut bergabung melalui ADP Poso sebagai *Sponsor Relation Assisstant* (SRA). Beberapa tahun kemudian ia menjadi *Child Sponsorship Management Project Coordinator* (CSMPC). Sejak 2014 Hostia bertugas di Area Program (AP) Parigi Moutong sebagai CSMPC. Sekarang ia adalah koordinator CESP untuk Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, Hostia diikuti pada banyak program pelatihan, *workshop* dan seminar. Antara lain pelatihan administrasi *sponsorship*, *Training of Trainers* (ToT) untuk staf WVI, *Leadership Training*, *Operation Meeting*, *Customer Relation Service*, seminar tentang Perlindungan Anak dan Stop Kekerasan Terhadap Anak, Pertemuan/Konsultasi Anak di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten, ToT "*Channels of Hope HIV & AIDS*"; dan memfasilitasi ToT "*Channels of Hope HIV & AIDS*"; Peningkatan Kapasitas Melalui *Batch*, *Advocacy Training*, *South East Asia 4/14 Window Conference*, *The Interfaith Training of Facilitators*, *Training "Be a great facilitator"*, ToT Pengasuhan dengan Cinta, (Tokoh Agama Kristen) serta banyak pelatihan lainnya.

Menjalin Kemitraan

Dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat, WVI di wilayah dampingan Poso telah menjalin kemitraan dengan kelompok dan tokoh adat untuk peraturan adat yang melindungi anak; menjalin kemitraan dengan Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan tokoh-tokoh agama untuk materi Sekolah Minggu dan Remaja yang mencakup Perlindungan Anak; menjalin kemitraan dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Poso untuk Pendidikan Harmoni, yang membuat kabupaten ini mendapatkan MDGs Award.

WVI juga menjalin kemitraan dengan DPRD Kabupaten Poso, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A; dan mitra terkait lainnya untuk Kegiatan-kegiatan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Hal yang sama dilakukan WVI di Kabupaten Parigi Moutong, antara lain menjalin kemitraan dengan Dinas DP3AP2KB untuk kegiatan anak, Perlindungan Anak, PATBM dan bersama dinas terkait lainnya untuk Kabupaten Layak Anak; Kementerian Agama Kabupaten, MUI Kabupaten, Tokoh-tokoh agama Kristen dan Muslim untuk Perlindungan Anak dan Positif Parenting; Dinas Pendidikan untuk pendampingan PAUD dan guru-guru PAUD; Dinas Kesehatan untuk pendampingan Posyandu dan STBM; Dinas Pertanian dan PPL untuk Pendampingan petani kakao dan kegiatan livelihood lainnya, dan mitra terkait lainnya. WVI juga bermitra dengan Kader/ KPM (Kelompok Peduli Masyarakat) dalam pendampingan anak di masyarakat.

Pada level provinsi, WVI bermitra dengan lembaga-lembaga swasta lokal dan DPRD Provinsi untuk Perda Perlindungan Anak; Pemerintah Provinsi, Lembaga Agama (Muhamadiyah), dan Dinas Pendidikan untuk Pendidikan Harmoni;

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi (dinas-dinas) dan lembaga lokal terkait lainnya untuk kegiatan anak di tingkat provinsi. Hostia juga mendukung Regional Manager Sulawesi Maluku, Erwin Simangunsong, dalam melakukan kemitraan dan advokasi di level provinsi untuk mendorong Perda Perlindungan Anak, kemitraan dengan gereja, pemerintah dan lembaga lokal terkait lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, WVI bukanlah pemain tunggal. Menurut Hostia, WVI tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai target-target yang telah direncanakan. Kemitraan yang dilakukan sangat membantu untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Bekerja sama dalam kemitraan, tidak hanya saling mendukung untuk terlaksananya kegiatan untuk pencapaian bersama tetapi juga mereka semakin mengenal WVI dan cara kerjanya. Dengan demikian kita bisa menjadi agen perubahan, melibatkan orang lain menjadi agen perubahan dan membuat orang lain secara sadar menjadi agen perubahan,” ujarnya.

Banyak tantangan dan suka-duka yang terjadi selama Hostia menjalankan tugasnya. Namun semua tantangan itu berhasil ia lewati berkat campur tangan Tuhan melalui dukungan orang-orang di sekitarnya. Terutama karena dukungan doa dari suami dan kedua anak mereka. Karena “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku,” kata Hostia mengutip Filipi 4 :13.

“Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan mendapatkan keterampilan dan pembelajaran yang luar biasa melalui WVI bersama rekan-rekan sekerja yang juga menjadi saudara-saudara saya,” ujarnya.

Eben Ezer Sembiring

General Manager Zonal Nusa Tenggara Timur

Saya bersyukur karena lewat peran saya saat ini, saya bisa terjun langsung ke masyarakat serta menyaksikan langsung bagaimana program berjalan serta proses akuntabilitas berlangsung.

Menurut saya akuntabilitas di organisasi sebesar WVI sangat penting karena entitas yayasan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara kualitas dan kuantitas program, administratif maupun dampak yang terjadi di lapangan mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu mengubah kehidupan masyarakat yang dilayani dan dampak pada kehidupan anak-anak menjadi lebih baik.

Dalam wilayah dampingan zonal dan area program, akuntabilitas menjadi standar utama kualitas operasional yang dicatat melalui monitoring pencapaian, sistem kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan sumber daya. Hal ini penting sehingga operasional program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kepercayaan dari semua mitra kerja dapat diperoleh atau dipertahankan secara konsisten.



Eben bersama dengan seorang anak dari wilayah NTT.

Supaya prinsip akuntabilitas untuk pemerintah, donatur, perusahaan serta sponsor tetap terjaga, maka kami mengembangkan sistem atau saluran umpan balik yang dapat dipercaya untuk melibatkan para pihak dalam memberi penilaian, usul dan saran supaya bisa ditindaklanjuti secara konsisten dan transparan. Selain itu kami juga melibatkan media serta saluran komunikasi publik untuk meliput dan memberitakan kegiatan-kegiatan program yang dikerjakan. Kami juga melakukan pelaporan keuangan sebagai akuntabilitas ke arah vertikal dan horizontal (ke pemerintah, donor, dan masyarakat). Melibatkan masyarakat termasuk anak-anak, mitra dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan program, implementasi dan sampai dengan evaluasi program. (Kami juga menerapkan) Standar Operasional dan Prosedur/ Bisnis Proses untuk berbagai komponen manajemen operasional serta panduan implementasi program/ *project model*.

Pada Zonal NTT dan wilayah lainnya, WVI dikenal sebagai pembawa transformasi dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah mengakui kualitas staf WVI yang memiliki integritas, jujur, dan profesional baik dalam pengelolaan keuangan dan program, termasuk juga dalam membangun relasi dan memperlakukan anak atau orang dewasa penerima manfaat. Selain itu pemerintah juga mengakui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan pengadaan barang WVI sangat baik sehingga mempersempit ruang bagi tindakan korupsi dan kecurangan. WVI juga dipercaya mengelola dana pemerintah sebagai wujud kepercayaan dan pengenalan pemerintah terhadap program yang dijalankan.

Salah satu pencapaian program dan bukti bagaimana prinsip akuntabilitas ini bisa berjalan baik di masyarakat dapat dilihat di Desa Nita, Kabupaten Sikka. Desa Nita pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu Desa Terbaik pada tahun 2016 atas *good governance* atau standar pemerintahan yang baik dan perubahan baik yang terjadi di sana.

Secara pribadi saya senang melihat perubahan baik ini karena bagi saya, hidup ini bukan tentang mereka yang selalu ada untuk membantu kesulitan kita, namun tentang kita yang belajar untuk mandiri dan membantu orang lain.

Ada beberapa pengalaman berkesan buat saya ketika berada di wilayah atau desa yang kami layani. Seorang anak yang kami layani di Kabupaten Alor menuliskan ucapan terima kasihnya kepada WVI saat dia mendengar program pengembangan masyarakat yang dilakukan di wilayahnya selama kurang lebih 15 tahun di desanya akan segera diakhiri. Saat itu ia sedang kuliah di luar daerahnya. Ia memberikan pesan yang sangat menyentuh: Selain mengucapkan terima kasih, ia menyebutkan berbagai program dan bantuan yang pernah diterima oleh dirinya, teman-teman, keluarga maupun masyarakat di desanya. Yang sangat berkesan buat saya adalah ketika dia menyampaikan terima kasih kepada semua staf WVI yang dia kenal dan pernah berinteraksi dengannya.

Ucapan terima kasihnya tersebut bukan atas bantuan dan program yang dibawa oleh staf, namun sikap dan perilaku staf yang menginspirasi dia. Antara lain sikap dalam memperlakukan dia dan teman-temannya yang ramah dan bersahabat. Kata-kata motivasi dan dorongan semangat yang pernah disampaikan staf. Semangat dan kesetiaan staf untuk datang, tinggal dan bergaul akrab dengan masyarakat seperti keluarga sendiri. Anak ini sepertinya menemukan cinta dan penerimaan dari staf dan terinspirasi berbuat yang sama bagi orang lain sebagai bukti cinta dan semangat kebersamaan sebagai manusia.

Selain itu, pengalaman menarik lainnya berasal dari salah seorang staf WVI di wilayah program yang pernah saya pimpin pernah menceritakan pengalamannya berbelanja di salah satu warung makan yang menjadi vendor WVI. Pada saat staf tersebut tiba di warung tersebut dia tekejut sekaligus bangga ketika pemilik warung menyampaikan kepada pelanggannya yang lain dengan pernyataan sebagai berikut: "Kalian ini harus contoh bapak dari WVI ini, mereka tidak pernah meminta dituliskan harga yang lebih mahal dari pada yang mereka bayar. Seberapa besar harga yang mereka bayar, sebesar itulah yang kami tulis dalam nota (kuitansi). Tidak seperti kalian yang selalu minta dituliskan harga yang jauh lebih besar dari harga yang sesungguhnya kalian bayar. Kalian ini mengajari kita untuk tipu-tipu dan bikin dosa. Kalian harus harus jujur seperti bapak dari WVI ini."

Kesaksian seorang staf ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kehadiran WVI, bukan hanya tentang pencapaian program, akan tetapi dampak terhadap perubahan nilai-nilai kejujuran bagi para vendor dan mitra sebagai bukti akuntabilitas yang tinggi.

Asteria Aritonang
Digital Partnership and Innovation Director

Saya bersyukur, perjalanan saya bersama World Vision dan WVI cukup panjang dan beragam.



Asteria (ketiga dari kiri) mewakili WVI ketika menerima donasi untuk Gempa Lombok pada tahun 2018.

Pertama kali bergabung bersama World Vision Indonesia pada tahun 1997 sebagai seorang *Research Assistant for Corporate Planning and Development*. Kemudian pada tahun 2015 saya mendapat kesempatan menjadi seorang *Advocacy Specialist* untuk *World Vision East Asia*. Lalu pada tahun 2017, saya menjadi *National Resource Development Director* untuk WVI dan sekarang saya mengemban tugas sebagai *Digital, Partnership, and Innovation Director*. Secara pribadi, saya mengucapkan syukur karena Tuhan melibatkan saya dalam pekerjaan sosial ini untuk mengembangkan sesama kita sesuai dengan visi dan misi WVI. Melalui WVI juga, saya juga bertumbuh secara spiritual, secara pengetahuan, keterampilan karena saya juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri sejauh yang saya harapkan.

Dalam peran saya saat ini, akuntabilitas bagi organisasi sebesar WVI sangat penting karena kita adalah lembaga publik yang mengelola dana serta beragam bentuk donasi baik uang maupun barang yang ditujukan untuk anak-anak yang menjadi prioritas pelayanan kita.



Salah satu bentuk akuntabilitas yang kita sampaikan secara umum adalah laporan pendanaan serta pencapaian sebuah program. Laporan ini kita sampaikan secara individu maupun institusi. Secara umum, laporan pertanggungjawaban organisasi juga bisa dilihat dalam bentuk cerita perubahan, berita baik, foto serta video di kanal media sosial serta *website* WVI. Bentuk pertanggungjawaban tersebut sekaligus menyampaikan laporan bahwa seluruh sumber daya yang WVI miliki sudah kita sesuaikan untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kepentingan terbaik anak dan masyarakat yang dilayani.

Khusus untuk program *sponsorship* kami juga menyediakan laporan tahunan berupa Laporan Tahunan Perkembangan Anak, Surat Balasan dari Anak serta Tanda Terima Donasi. Dalam era digital ini kami juga memberi laporan dalam bentuk digital seperti *Child Update Video* dan *Community Video* yang dapat diakses Sponsor melalui portal MySponsorship di laptop maupun telepon seluler. Sponsor juga bisa mengirim surat kepada anak santun serta mendapat update via portal tersebut. Bagi perusahaan serta lembaga donor, selain tertulis, laporan pertanggungjawaban juga disampaikan lewat video, publikasi berita di media serta artikel di *website* dan media sosial milik organisasi.

Menurut pengalaman saya, akuntabilitas yang baik akan menolong pelayanan organisasi supaya bisa terus berjalan. Misalnya saja ketika bencana terjadi, banyak lembaga donor dan juga perusahaan yang menjadikan WVI sebagai '*Top of Mind*' organisasi yang menjadi perpanjangan tangan mereka untuk membantu anak serta masyarakat yang terdampak.

Salah satu inovasi yang pernah kita lakukan dalam pengumpulan dana adalah melalui kegiatan crowdfunding lewat Berani Mimpi yang pernah kita lakukan di Sumba Barat Daya - NTT, Jayawijaya - Papua dan Sikka di Nusa Tenggara Timur. Secara bertahap, kita menyampaikan kepada para donor dari awal pengumpulan dana, proses pembangunan atau penggunaan dana hingga hasil akhirnya. Kita juga pernah menggalang dana untuk program respons tanggap darurat malnutrisi di Asmat, Papua pada tahun 2018 lalu dan melalui kegiatan ini, kita bisa melibatkan lebih banyak mitra yang terlibat seperti Keuskupan Agats.

Menurut saya dari sisi akuntabilitas serta penggalangan dana, lewat berbagai proses yang berjalan selama bertahun-tahun ini, saya percaya WVI dalam beberapa tahun lagi sudah bisa mandiri dan bertumbuh secara independen dan siap untuk melakukan hal yang lebih besar di masa mendatang untuk kepentingan anak-anak Indonesia, yang bisa dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak.

Eninofa Rambe

General Manager Zonal Papua

Saya bergabung di WVI sejak 2003 melalui program *batch* (semacam *Management Trainee*)



Eninofa bersama anak-anak di Asmat, Papua.

Kemudian pada tahun 2011 saya sempat keluar dan bergabung lagi dengan WVI pada tahun 2014. Saya pernah bekerja di wilayah Waingapu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jakarta, serta Port Numbay dan Eruwok di Papua. Saya pernah juga terlibat sebagai manajer di Singkawang, kemudian menjadi Area Manager untuk wilayah Sumba, Timor dan Alor di NTT.

Saat ini saya menjabat sebagai *General Manager* Zonal Papua sejak tahun 2018. Beberapa kali saya juga pernah bergabung dengan program respons bencana WVI untuk banjir Garut, banjir Malaka di NTT, gempa bumi Lombok, malnutrisi Asmat, dan konflik di Wamena.

Papua merupakan wilayah yang sangat menantang, karena pendanaan yang digunakan murni pendanaan lokal. Oleh karenanya, fokus intervensi kami juga kecil. Hanya mencakup sektor pendidikan. Namun demikian, untuk wilayah Asmat, kami tetap berfokus pada sektor kesehatan karena kebutuhan mendesak di wilayah tersebut tercakup dalam sektor kesehatan.

Salah satu bentuk dukungan dari hasil partnership atau kerja sama yang kami terima berasal dari UNICEF untuk mendukung wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) untuk program pendidikan di Papua. Beberapa bentuk kerja sama lainnya terjalin dengan mitra kami, lembaga agama yaitu gereja. Pada tahun 2019, kami menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman dengan GKI di Wamena, gereja di Biak Selatan, gereja di Biak Utara dan Klasis Sentani, GPI di Papua Barat serta Keuskupan di Agats, Asmat. Serta MoA atau Perjanjian Kerja sama dengan Klasis Bonggo Sarmi dan Keuskupan Agats.

Menurut saya di tengah pendanaan yang terbatas, kolaborasi atau kerja sama dengan gereja, pemerintah dan mitra ini sangat berdampak besar buat program yang dijalankan bagi anak dan masyarakat. Justru dari sinilah saya bisa mendalami "Our Promise 2030" yang dipromosikan oleh organisasi. Dengan keterbatasan ini kita menjadi lebih kreatif dan tertantang.

Selama menjalankan program, salah satu pencapaian yang sangat berkesan buat saya adalah saat seluruh anak di salah satu desa di Kabupaten Biak memiliki 100 persen akta kelahiran. Selain itu saya juga melihat dampak pelayanan kami di berbagai gereja yang menjalin kemitraan dengan kami. Salah satunya adalah ketika para guru di Sekolah Minggu yang berada di Klasis Biak Selatan membantu anak-anak yang tidak bisa membaca di gerejanya.

Saya juga melihat seorang tokoh kunci, Mama Hani, seorang wanita tangguh dan kader dari Sentani yang mengajari literasi ke anak-anak di kampungnya melalui Rumah Baca Yoboi.

Saya berharap pelayanan di Papua terus berjalan, baik di wilayah pantai maupun gunung, melalui kemitraan. Karena dengan kemitraan serta kerja sama dengan lembaga seperti WVI, perubahan itu dapat terjadi.

Kalau melihat ke belakang, saya bersyukur karena Tuhan melibatkan saya dalam panggilan-Nya. Ada masa-masa sukar. Ada masa sulit. Tetapi jika kita hanya mengandalkan manusia saja tanpa Tuhan, kita tidak bisa bertahan.

Candra Wijaya
Strategy Management Director

Kemandirian WVI dan keberlangsungan pelayanannya di masa depan tidak lepas dari sejarah panjang World Vision International di Indonesia yang ditopang oleh dua hal penting dalam perjalanannya, yaitu: strategi pelayanan yang fokus dan dinamis serta para pemimpin yang berdoa.



Lokakarya pengembangan strategi nasional bersama pimpinan dan staf WVI.

Strategi yang Fokus dan Dinamis

Dengan berakhirnya semua kegiatan operasional World Vision International di Indonesia pada akhir tahun 2020, maka WVI menjadi representasi tunggal kemitraan *global* World Vision di Indonesia.

WVI akan tetap melanjutkan pelayanannya sesuai visi, misi, nilai dasar, *Statement of Faith*, dan *the Covenant of Partnership* dengan World Vision International, serta mengacu pada *Country Strategy* WVI yang diperbaharui secara berkala. Hal khusus yang berubah hanya pada kegiatan administratif penyaluran bantuan asing dari World Vision International yang sebelumnya melalui kantor World Vision International di Indonesia, menjadi langsung kepada WVI.

Country Strategy WVI 2021-2025 disusun dengan memperhatikan perubahan lanskap eksternal dan internal untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dari luar serta kekuatan dan kelemahan dari dalam Organisasi. Hasil kajian ini memberikan masukan dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis terkait dampak pelayanan, pendanaan, operasional, dan pengembangan sumber daya manusianya. Prinsip yang dianut adalah fokus dan dinamis. Fokus pada tujuan strategis yang berkontribusi pada visi dan misi Organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Dinamis pada implementasi rencana strategis dalam cakupan, target, cara, pendekatan, dan penahapan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Organisasi.

Country Strategy WVI 2021-2025 juga disusun dengan memperhatikan arahan *World Vision Global Strategy Our Promise*, dengan lima *strategic imperatives*-nya, yaitu: *live out our Christian faith and calling with boldness and humility; deepen our commitment to the most vulnerable boys and girls; focus our ministry for greater result; collaborate and advocate for broader impact; dan deliver high quality and sustainable funding*. Kelima *strategic imperatives* ini didukung oleh empat *mindset & behavior* yang membangun budaya organisasi, yaitu: *unity and trust; wise stewardship; looking outward; timely truth telling with love*.

Keberanian menghidupi iman dan panggilan Kristiani dengan rendah hati dalam menjalankan pelayanan dibangun melalui komunikasi dan diskusi mendalam tentang visi, misi, nilai dasar, *statement of faith* dan *the Covenant of Partnership* yang menjadi dokumen inti organisasi di kalangan para pimpinan dan staf, dengan semangat *diversity, equity, dan inclusive*.

Komitmen yang lebih mendalam terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki yang paling rentan dibangun dengan mengidentifikasi faktor-faktor kerentanan anak, khususnya yang mengalami kemiskinan ekstrem, *abusive relationship, serious discrimination*, dan hidup dalam lingkungan yang rentan bencana, dan mengikutsertakan mereka dalam program-program pelayanan.

Fokus pelayanan diprioritaskan pada isu-isu kesejahteraan anak, termasuk di bidang gizi dan kesehatan anak, perlindungan anak, hubungan anak, serta pendidikan anak yang disesuaikan dengan konteks klaster wilayah dampingan yang berbeda-beda. Intervensi program pada anak didukung dengan intervensi program pada keluarga dan masyarakat, termasuk peningkatan akses air bersih dan sarana sanitasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kebijakan yang berpihak pada anak. Dengan menjalankan prioritas pelayanan untuk setiap klaster wilayah, diharapkan akan memberikan hasil yang lebih besar untuk setiap isu kesejahteraan anak yang spesifik di setiap konteksnya.

Kolaborasi dan advokasi dijalankan untuk mendapatkan dampak yang lebih luas, melampaui batas-batas wilayah dampingan WVI. Kemitraan dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan swasta dikembangkan secara strategis di tingkat nasional dan daerah.

Di tingkat nasional, kerja sama dengan Pemerintah secara formal melalui sejumlah *Memorandum of Understanding* dan/ atau *Memorandum of Agreement* dan secara informal melalui koordinasi dan kolaborasi program telah dan terus berproses dalam pengembangan dan implementasinya, termasuk dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Badan Nasional Pembangunan Bencana (BNPB), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada masa pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2020, WVI semakin intensif berkolaborasi dengan Pemerintah untuk merespons bencana ini melalui pemetaan kebutuhan anak di masa pandemi COVID-19, distribusi Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan, pengembangan strategi dan distribusi materi komunikasi penanggulangan COVID-19, pengembangan panduan kader dalam melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam situasi COVID-19, pedoman guru dan orang tua dalam mendukung anak belajar secara daring, advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak di masa pandemi, dan lainnya. Upaya kolaborasi ini diapresiasi oleh Pemerintah dengan diberikannya penghargaan oleh BNPB kepada WVI pada bulan Maret 2021 atas kiprah WVI dalam menanggulangi pandemi COVID-19 bersama-sama pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Pada tahun yang sama, untuk pertama kalinya WVI mendapat kepercayaan mengelola dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Organisasi Penggerak (POP), khususnya untuk wilayah Papua yang sungguh-sungguh membutuhkan dukungan finansial untuk pelayanan di bidang pendidikan.

Di tingkat daerah, semua Area Program di tingkat kabupaten juga telah membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah setempat, didukung oleh koordinasi di tingkat provinsi oleh kantor operasional zona. Beberapa Area Program mendapatkan kepercayaan mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan program di lapangan, misalnya di Kabupaten Alor. Visi, misi dan nilai dasar WVI yang memfokuskan pelayanannya pada upaya meningkatkan kesejahteraan anak, dengan etos kerja sebagai penatalayan yang bijaksana (*wise stewardship*) merupakan kekuatan organisasi yang dilihat pemerintah sebagai mitra strategis dalam kolaborasi program kesejahteraan anak di Indonesia.

Kolaborasi untuk advokasi dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki panggilan yang sama untuk kesejahteraan anak juga berkembang secara strategis dan dinamis, termasuk melalui Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), *Indonesia Joining Forces to End Violence Against Children*

(IJFtEVAC) yang terdiri dari *ChildFund International*, *Yayasan Plan International Indonesia*, *Save the Children Indonesia*, *terre des homes Germany*, *SOS Children's Villages Indonesia*, dan *WVI*, Jejaring Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL), Koalisi Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD), dan *Humanitarian Forum Indonesia (HFI)*.



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2014-2019, Yohana Yembise menandatangani komitmen Indonesia Tanpa Kekerasan Anak dalam peluncuran Kampanye PKTA 2017.

Kolaborasi dengan pihak swasta juga terus dibangun sejalan dengan berpadunya visi misi dan strategi WVI dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan untuk memenuhi *corporate social responsibility*-nya.

Salah satu tantangan WVI ke depan adalah masuknya Indonesia dalam kategori *middle to upper income country*. Konsekuensinya, perhatian donor luar negeri terhadap Indonesia akan menurun. Kenyataan ini mulai dirasakan oleh WVI dengan adanya tren penurunan komitmen pendanaan *sponsorship* internasional mulai tahun 2021 dan ke depannya karena *World Vision International* akan lebih memprioritaskan *low income country* sebagai bagian dari portofolio *global*.

Walaupun secara nasional Indonesia masuk dalam kategori *middle to upper income country*, namun masih banyak kabupaten/ kota di sebagai provinsi di Indonesia yang masalah kesejahteraan anaknya masih tinggi di bidang kesehatan, perlindungan anak, dan pendidikan. Hal ini terlihat dari indikator *prevalensi stunting* yang masih

di atas 30 persen, kekerasan anak secara fisik, seksual, dan verbal termasuk perkawinan anak masih marak terjadi, serta akses ke layanan pendidikan dasar yang masih di bawah rata-rata nasional terutama di Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada banyak wilayah di Indonesia masih berada di bawah rata-rata nasional, persentase penduduk miskin masih di atas rata-rata nasional, akses ke sarana sanitasi dan air bersih yang masih di bawah rata-rata nasional, indeks risiko bencana tinggi di atas 144, dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada anak serta akuntabilitas sosial yang melibatkan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa ladang pelayanan bagi WVI sebagai mitra untuk meningkatkan kesejahteraan anak, keluarga, dan masyarakat masih luas. Tuhan yang empunya pelayanan ini, yang memanggil kita untuk bekerja di ladang-Nya, akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pengembangan dan keberlangsungan pelayanan pada waktu-Nya.

Tantangan menurunnya perhatian donor internasional terhadap Indonesia karena status Indonesia sebagai *middle to upper income country*, dapat menjadi peluang untuk WVI mulai meluaskan pandangan kepada hati para mitra, donatur dan sponsor dalam negeri (*outward looking*), untuk berbagi visi dan misi organisasi dan menjajaki potensi kemitraan baru dengan dukungan sumber daya nasional melalui perjumpaan-perjumpaan dalam rancangan Tuhan.

Untuk mendukung upaya promosi dan penggalangan dana, sebuah tim kerja dari *Digital Partnership and Innovation (DPI) Department* telah dibentuk untuk membangun *Ministry Funding Strategy 2021-2025* sebagai strategi fungsional, turunan dari *Country Strategy 2021-2025*. *Ministry Funding Strategy* ini dikembangkan secara sungguh-sungguh sejak November 2020 dalam pertemuan mingguan 2 jam secara virtual di tengah pekerjaan lainnya, untuk memetakan daya tarik pasar (*market attractiveness*) dan posisi kompetisi (*competitive position*) dalam industri kemanusiaan di tingkat makro dan mikro, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Strategi ini telah mendapat masukan dari berbagai pihak lintas unit dan departemen WVI serta dari World Vision International, dan telah dirampungkan pada bulan April 2021 untuk siap diimplementasikan sesuai pilihan produk (program) kesejahteraan anak yang kontekstual dan sesuai dengan segmen pasar (donor/sponsor) dari sudut konteks *emergency/development*, lintas sektor, dan geografis sesuai prinsip *Impact Driven, Market Informed*.

Dengan *Ministry Funding Strategy* yang dibangun sendiri selama 40 jam secara sistematis oleh internal organisasi dengan berpedoman pada kerangka konsep, referensi, dan masukan dari banyak pihak, serta discernment dalam mencari, meminta, dan mengetuk hati Tuhan untuk mengetahui dan mau taat pada pimpinan-Nya, kita percaya bahwa bersama Tuhan, dalam semangat kesatuan dan saling percaya (*unity & trust*) dan penyampaian kebenaran di waktu yang tepat dalam kasih (*timely truth telling with love*), segenap entitas organisasi dapat terus melanjutkan pelayanan ini untuk mewujudkan setiap anak di Indonesia hidup utuh sepenuhnya, melalui doa yang tidak pernah putus untuk setiap hati tergerak bertekad untuk ikut mewujudkannya.

Para Pemimpin yang Berdoa

Perjalanan sejarah pelayanan WVI ditapaki oleh para pemimpin yang mempunyai hati seorang hamba. Mereka melayani dengan berserah diri kepada Tuhan untuk menggenapkan rencana-Nya, yakni setiap anak dapat hidup utuh sepenuhnya.

Para pemimpin WVI telah memberi teladan, bagaimana menjalani nilai-nilai dasar organisasi untuk mencapai visi dan misi, yang diinspirasi dari panggilan-Nya. Dengan lutut yang bertelut, menyeru doa untuk lebih banyak hati yang tergerak dan bertekad ambil bagian dalam mewujudkannya.

Para pemimpin WVI adalah Bapak dan Ibu bagi para stafnya, yang memimpin dengan kasih dan bijaksana, membentuk setiap staf menjadi penatalayan yang menghargai manusia, responsif, siap bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk membantu yang miskin dan terpinggirkan, sebagai perwujudan kasih kepada Tuhan dan sesama.

Para pemimpin WVI bukan tidak pernah berbuat salah. Namun mereka adalah teladan dalam kebesaran hati untuk meminta maaf atas kekhilafan yang mungkin terjadi. Mereka terbuka menerima koreksi dan masukan demi kebaikan dan terwujudnya tujuan bersama.

Adalah **James Tumbuan**, orang Indonesia pertama yang menjadi Direktur Nasional WVI periode 1997-2006, yang memulai perkenalannya dengan organisasi sebagai anak sponsor. Dalam satu perjumpaan pribadi pada tahun 2006, James menggambarkan perjalanan misi organisasi untuk mewujudkan visinya seperti sebuah kapal besar yang berlayar untuk menjawab seruan minta tolong dari seberang lautan. Kapalinya tidak sempurna, demikian juga orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi panggilan ini sejati, dan Sang Empunya kapal adalah setia. Maka kapal harus segera berlayar untuk memenuhi panggilan pelayanan, sambil terus membangun di dalamnya agar semakin siap dalam melayani. Dan setiap pekerja baru yang bergabung mempunyai tugas khusus untuk melanjutkan karya di atas pekerjaan baik orang lain, saling bertolong-tolongan untuk menjalankan pelayanan yang bermakna bagi mereka yang membutuhkan.

Kepemimpinan James dilanjutkan oleh **Trihadi Saptoadi** dari tahun 2006 – 2010. Trihadi dikenal dengan pemikirannya yang strategis dan kritis. Ia juga seorang humoris yang tutur kata dan tulisannya tertata rapi. Ia lembut dan tidak pernah memaksakan kehendaknya, namun mampu menggerakkan orang lain.

Tjahjono Soerjodiborto adalah penerus kepemimpinan di kepengurusan WVI pada periode 2010-2014 setelah sebelumnya menjadi Ketua Pembina WVI. Beliau dikenal dengan ketegasannya dalam memimpin, lincah dalam berpikir, kritis dalam mengambil keputusan, namun juga lembut hati.

Kepemimpinan Tjahjono dilanjutkan oleh **Doseba Tua Sinay** mulai tahun 2014 sampai 2021. Doseba dikenal sebagai pemimpin yang membawa organisasi berlari dengan cepat dan tepat di tengah tantangan zaman yang berubah dengan tidak pasti. Proaktif mempersiapkan diri dan organisasi dalam menangkap peluang baru, profesional dalam bidangnya, berani ambil risiko dengan perhitungan yang cermat.

Di balik para direktur nasional WVI yang memimpin dengan baik, ada peran Pembina dan Pengawas (*board*) yang mendampingi dengan bijaksana. Termasuk di dalamnya adalah **Anugerah Pekerti** yang pernah menjadi anggota *board* WVI dan World Vision International; **Utomo Josodirdjo**, **Nafsiah Mboi** dan **Yozua Makes**, yang merupakan tokoh di dunia akuntansi dan bisnis, kesehatan dan pemerintahan, serta hukum dan konsultansi.

Ruddy Koesnadi, Ketua Pembina WVI periode 2015-2019 dan anggota *board* World Vision International periode 2010-2019 adalah orang yang mempunyai peran besar dalam membentuk para pemimpin di WVI. Ruddy dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang lembut, bijaksana dan mengayomi. Ia pandai menyatukan berbagai pandangan yang berbeda dan selalu berusaha menjaga semangat persaudaraan sebagai satu keluarga besar WVI. Ruddy cerdas dalam berpikir, tangkas dalam berbicara, luwes dalam menenangkan situasi, perhatian, suka menolong, dan jitu dalam memberi nasihat. Dalam usianya yang sudah sangat senior saat ini, Ruddy masih aktif sebagai *Senior Advisor* Ernst & Young, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan anggota majelis kehormatan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Peran Ruddy sebagai Ketua Pembina WVI kemudian dilanjutkan oleh **Guntur Tampubolon**. Beliau adalah seorang pemimpin yang ramah, efisien, *simple*, rendah hati, berjiwa sosial tinggi, hangat dan suportif.

Dan kepemimpinan ini akan terus berlanjut lintas generasi dengan kesetiaan mengikuti teladan Tuhan dan Juruselamat, Yesus Kristus. Bekerja bersama yang miskin dan tertindas untuk mempromosikan transformasi manusia, mengupayakan keadilan, dan menyaksikan kabar baik Kerajaan Allah, untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya, dan setiap hati tekad untuk mewujudkannya.



Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender.